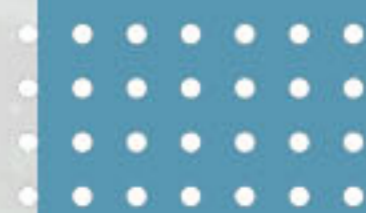


PETA PEMBINAAN INOVASI DAERAH
WILAYAH KABUPATEN/KOTA

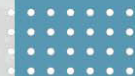
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR





PETA PEMBINAAN INOVASI DAERAH
WILAYAH KABUPATEN/KOTA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR





Peta Pembinaan Provinsi Kalimantan Timur

Jakarta: Bina Praja Press, 2022
Copyright © BSKDN Kemendagri

Penyunting : Aji Nur Cahyo
Desain sampul, grafis dan penata letak : Fajar Haramukti

Diterbitkan dan dicetak oleh Bina Praja Press
Dikeluarkan oleh BSKDN Kementerian Dalam Negeri

ISBN :

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.



Alamat Redaksi:
Jalan Kramat Raya No. 132, Jakarta Pusat
pid@litbangkemendagri.com
Telp. (021) 3913201

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta**

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

TIM PENULIS

Pengarah:

Menteri Dalam Negeri
Sekretaris Jenderal

Penanggungjawab:

Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri
Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam Negeri

Penulis:

1. Adinda Aura Salsabil, S.Stat
2. Drs. Awan Yanuarko, M.S
3. Muhammad Khairil Basyar, S.STP

SAMBUTAN KEPALA BSKDN KEMENDAGRI

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Era Revolusi 4.0 menuntut kesiapan aparatur yang andal, unggul untuk peningkatan daya saing bagi daerah. Buku ini, secara kompleks menggambarkan penerapan inovasi daerah. Kemajuan IPTEK menjadi salah satu landasan berpikir bagi daerah dalam mempersiapkan aktor inovasi daerah yang dapat bersaing di kancah Internasional. Pengembangan inovasi menjadi kekuatan untuk meningkatkan kapasitas daerah sesuai dengan potensinya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah, menegaskan peran strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri dalam melakukan pembinaan inovasi daerah melalui Indeks Inovasi Daerah (IID), penilaian dan pemberian penghargaan *Innovative Government Award* (IGA). Dengan tujuan untuk melihat tingkat daya saing daerah berdasarkan kuantitas dan kualitas inovasi daerah.

Buku ini sebagai sarana edukasi dan literasi yang dapat menciptakan budaya inovasi yang kuat pada skala nasional. Dengan terbitnya buku ini dapat menjadi referensi Kementerian/Lembaga Non Kementerian dan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan program daya saing daerah.

Membangkitkan semangat berinovasi menjadi harapan terbesar dalam buku ini. Saya berbangga hati terhadap Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang berinovasi. Kreasi dan Karsa inovasi daerah menjadi ciri khas dan keunikan tanpa meninggalkan kearifan lokal yang ada. Inilah yang menjadikan inovasi daerah kembali ke marwahnya. Inovasi daerah bukan lagi dipandang sebagai sesuatu hal yang sulit dan rumit, tetapi dapat dilihat sebagai sesuatu yang mudah dan murah.

Kami mengharapkan buku ini dapat menguatkan implementasi inovasi daerah secara masif. Berkat dukungan dari semua pihak untuk membaca, menjadikan buku ini sebagai panduan bagi daerah untuk mengembangkan ide dan gagasan berdasarkan kemanfaatan, efisiensi, efektivitas, serta perbaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Semangat daerahku, semangat bangsaku, maju daerahku. Salam Inovasi.

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kepala Badan Strategi
Kebijakan Dalam Negeri
Kemendagri

Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd

SAMBUTAN KEPALA PUSAT LITBANG INOVASI DAERAH

Saat ini kebutuhan inovasi menjadi indikator kinerja utama pemerintah daerah. Daerah dengan segala keterbatasannya, mampu menghadirkan inovasi sebagai solusi untuk percepatan akselerasi pembangunan. Amati, Tiru dan Modifikasi menjadi sesuatu yang semestinya disikapi oleh daerah dalam berinovasi. Ide kreatif inovator memberikan ruang dan suasana baru bagi inovasi, apresiasi kami sangat tinggi terhadap adanya perubahan mindset. Inovasi bukan lagi menjadi sebuah kewajiban, akan tetapi keharusan bagi daerah untuk berbuat seberapa besar dan seberapa banyak inovasi yang dihasilkan dapat bermanfaat. Data Indeks menggambarkan keseriusan Pemerintah Daerah dalam mengawal inovasinya. Mulai dari kelengkapan data pendukung sebagai dokumentasi, publikasi inovasi, maupun pelibatan stakeholder antara Provinsi Dengan Kabupaten/Kota, OPD dengan OPD lainnya, maupun antara Masyarakat dengan ASN. Kolaborasi dan elaborasi menjadi cerminan bahwa inovasi daerah menjembatani koordinasi horizontal dan vertikal dalam pengembangan inovasi daerah.

Keberanian dan tumbuh kembangnya inovasi daerah di tingkat provinsi/Kabupaten/Kota karena didasarkan pada beberapa hal. Pertama daerah sudah menyadari inovasi daerah tidak terkait /dengan diskresi, kedua, daerah menyadari bahwa adanya inovasi daerah berdasarkan kebutuhan bukan keinginan sepihak, ketiga, inovasi daerah menjadi indikator penilaian kinerja pemerintah daerah, keempat, penilaian Laporan Kegiatan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah membahas mengenai indeks inovasi daerah, kelima adanya Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi ASN di daerah dengan memperhitungkan bobot perhitungan indeks inovasi daerah.

Buku Peta Pembinaan Inovasi Daerah merupakan rangkuman efektivitas pengembangan inovasi daerah di Provinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia pada periode penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021 Kementerian Dalam Negeri. Buku ini khusus mengulas inovasi daerah yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota di daerah, tahun 2019, 2020 dan dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui penerapan indeks inovasi daerah tahun 2021. Dengan demikian, buku ini sekaligus menjadi jembatan penghubung antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maupun Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Memainkan peranan sebagai unsur pembinaan dan pengawasan dalam inovasi daerah. Bukan hanya pengawasan yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri terhadap Provinsi/Kabupaten/Kota, namun juga bagaimana kementerian teknis turut andil di dalam mengembangkan inovasi.

Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah

Drs. Aferi S. Fudail, M.Si

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Pasal 388 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Daerah, menegaskan peran strategis Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri dalam melakukan pembinaan inovasi daerah melalui Indeks Inovasi Daerah (IID), penilaian dan pemberian penghargaan Innovative Government Award (IGA), dengan tujuan untuk melihat tingkat daya saing daerah berdasarkan kuantitas dan kualitas inovasi daerah.

Tahun 2021 dapat dikatakan sebagai tahun pembuktian bagi daerah. Sebanyak 25.124 inovasi daerah yang termuat dalam IID dilakukan oleh Provinsi/ Kabupaten/Kota, Daerah Tertinggal dan Daerah Perbatasan meramaikan inovasi dengan dominasi dari berbagai aspek. Aspek Pelayanan publik sebanyak 14.580 inovasi, dilanjutkan dengan inovasi bentuk lainnya sebanyak 6.668 inovasi, dan inovasi tata kelola pemerintahan sebanyak 3.606 inovasi terdiri atas : (1) Kategori Provinsi Terinovatif 5 Pemda Provinsi; (2) Kategori Kabupaten Terinovatif 10 Pemda Kabupaten; (3) Kategori Kota Terinovatif 10 Pemda Kota; (4) Kategori Daerah Tertinggal Terinovatif 3 Pemda Kabupaten; (5) Kategori Daerah Perbatasan Terinovatif 3 Pemda Kabupaten.

Buku ini sebagai sarana edukasi dan literasi yang dapat menciptakan budaya inovasi yang kuat pada skala internasional. Dengan terbitnya buku ini dapat menjadi referensi Kementerian/ Lembaga Non Kementerian dan Pemerintah Daerah dalam merumuskan program daya saing daerah. Membangkitkan semangat berinovasi menjadi harapan terbesar dalam buku ini. Kreasi dan Karsa inovasi daerah menjadi ciri khas dan keunikan tanpa meninggalkan kearifan lokal yang ada. Inilah yang menjadikan inovasi daerah kembali ke marwahnyanya. Inovasi daerah bukan lagi dipandang sebagai sesuatu hal yang sulit dan rumit, tetapi dapat dilihat sebagai sesuatu yang mudah dan murah.

Kami mengharapkan buku ini dapat menguatkan implementasi inovasi daerah secara masif. Berkat dukungan dari semua pihak untuk membaca, menjadikan buku ini sebagai panduan bagi daerah untuk mengembangkan ide dan gagasan berdasarkan kemanfaatan, efisiensi, efektivitas, serta perbaikan kualitas pelayanan.

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR TABEL	

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG	1
B. MANFAAT	2
C. TUJUAN	2
D. RUANG LINGKUP	2

BAB II INOVASI DAERAH KLASTER KABUPATEN DAN KLASTER KOTA

A. KABUPATEN BERAU	5
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	5
Aspek Satuan Inovasi Daerah	6
B. KABUPATEN KUTAI BARAT	10
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	11
Aspek Satuan Inovasi Daerah	12
C. KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA	17
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	17
Aspek Satuan Inovasi Daerah	17
F. KABUPATEN KUTAI TIMUR	17
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	18
Aspek Satuan Inovasi Daerah	24
G. KABUPATEN PASER	25
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	25
Aspek Satuan Inovasi Daerah	31
H. KABUPATENPENAJAM PASER UTARA	31
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	32
Aspek Satuan Inovasi Daerah	38
I. KOTA BALIKPAPAN	39
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	39
Aspek Satuan Inovasi Daerah	45
J. KOTA BONTANG	46
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	46
Aspek Satuan Inovasi Daerah	52
K. KOTA SAMARINDA	52
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	53
Aspek Satuan Inovasi Daerah	59
L. KABUPATEN MAHAKAM ULU	60
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	60
Aspek Satuan Inovasi Daerah	60

BAB III REKOMENDASI KEBIJAKAN

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Berau
- Gambar 2. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Berau
- Gambar 3. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Berau
- Gambar 4. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Berau
- Gambar 5. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Berau
- Gambar 6. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Berau
- Gambar 7. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Berau
- Gambar 8. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Berau
- Gambar 9. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Berau
- Gambar 10. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Berau
- Gambar 11. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah
- Gambar 12. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Kutai Barat
- Gambar 13. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Kutai Barat
- Gambar 14. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Kutai Barat
- Gambar 15. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Kutai Barat
- Gambar 16. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Kutai Barat
- Gambar 17. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Kutai Barat
- Gambar 18. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Kutai Barat
- Gambar 19. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Kutai Barat
- Gambar 20. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Kutai Barat

Gambar 21. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Barat

Gambar 22. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 23. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Kutai Kartanegara

Gambar 24. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Kutai Kartanegara

Gambar 25. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Kutai Kartanegara

Gambar 26. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Kutai Kartanegara

Gambar 27. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Kutai Kartanegara

Gambar 28. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Kutai Kartanegara

Gambar 29. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Kutai Kartanegara

Gambar 30. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Kutai Kartanegara

Gambar 31. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Kutai Kartanegara

Gambar 32. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Gambar 33. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 34. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Kutai Timur

Gambar 35. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Kutai Timur

Gambar 36. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Kutai Timur

Gambar 37. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Kutai Timur

Gambar 38. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Kutai Timur

Gambar 39. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Kutai Timur

Gambar 40. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Kutai Timur

Gambar 41. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Kutai Timur

Gambar 42. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Kutai Timur

Gambar 43. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Timur

Gambar 44. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 45. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Paser

Gambar 46. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Paser

Gambar 47. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Paser

Gambar 48. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Paser

Gambar 49. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Paser

Gambar 50. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Paser

Gambar 51. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Paser

Gambar 52. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Paser

Gambar 53. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Paser

Gambar 54. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Paser

Gambar 55. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 56. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Penajam Paser Utara

Gambar 57. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Penajam Paser Utara

Gambar 58. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Penajam Paser Utara

Gambar 59. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Penajam Paser Utara

Gambar 60. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Penajam Paser Utara

Gambar 61. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Penajam Paser Utara

Gambar 62. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Penajam Paser Utara

Gambar 63. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Penajam Paser Utara

Gambar 64. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Penajam Paser Utara

Gambar 65. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

Gambar 66. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 67. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kota Balikpapan

Gambar 68. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Balikpapan

Gambar 69. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kota Balikpapan

Gambar 70. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kota Balikpapan

Gambar 71. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kota Balikpapan

Gambar 72. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kota Balikpapan

Gambar 73. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kota Balikpapan

Gambar 74. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kota Balikpapan

Gambar 75. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kota Balikpapan

Gambar 76. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kota Balikpapan

Gambar 77. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 78. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kota Bontang

Gambar 79. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Bontang

Gambar 80. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kota Bontang

Gambar 81. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kota Bontang

Gambar 82. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kota Bontang

Gambar 83. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kota Bontang

Gambar 84. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kota Bontang

Gambar 85. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kota Bontang

Gambar 86. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kota Bontang

Gambar 87. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kota Bontang

Gambar 88. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 89. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kota Samarinda

Gambar 90. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Samarinda

Gambar 91. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kota Samarinda

Gambar 92. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kota Samarinda

Gambar 93. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kota Samarinda

Gambar 94. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kota Samarinda

Gambar 95. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kota Samarinda

Gambar 96. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kota Samarinda

Gambar 97. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kota Samarinda

Gambar 98. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kota Samarinda

Gambar 99. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Indikator Indeks Inovasi Daerah

Tabel 2. Daftar Inovasi Kabupaten Berau beserta Skor Kematangannya

Tabel 3. Daftar Inovasi Kabupaten Kutai Barat beserta Skor Kematangannya

Tabel 4. Daftar Inovasi Kabupaten Kutai Kartanegara beserta Skor Kematangannya

Tabel 5. Daftar Inovasi Kabupaten Kutai Timur beserta Skor Kematangannya

Tabel 6. Daftar Inovasi Kabupaten Paser beserta Skor Kematangannya

Tabel 7. Daftar Inovasi Kabupaten Penajam Paser Utara beserta Skor Kematangannya

Tabel 8. Daftar Inovasi Kota Balikpapan beserta Skor Kematangannya

Tabel 9. Daftar Inovasi Kota Bontang beserta Skor Kematangannya

Tabel 10. Daftar Inovasi Kota Samarinda beserta Skor Kematangannya

The Page Left is Blank

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Inovasi Daerah merupakan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan inovasi daerah tersebut diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui: peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Adapun pelaksanaannya diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah. Regulasi tersebut mendorong optimalisasi penyelenggaraan otonomi daerah, dengan memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk berkreasi dan berinovasi dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangannya berdasarkan konteks dan dinamika di masing-masing daerah. Upaya tersebut dapat menjadi pengungkit kinerja pemerintahan daerah untuk percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah.

Sesuai dengan amanat regulasi diatas, Kementerian Dalam Negeri telah menyelenggarakan Penilaian Inovasi Daerah dan Pemberian Penghargaan *Innovative Government Award* (IGA). Penilaian inovasi daerah didasarkan pada laporan Kepala Daerah atas pelaksanaan inovasi daerah bersangkutan melalui mekanisme pengisian data indeks inovasi daerah. Secara general, penilaian inovasi daerah melalui empat (4) tahapan yaitu: Tahap Penjaringan, Tahap Pengukuran, Tahap Presentasi Kepala Daerah dan Tahap Peninjauan Lapangan. Sedangkan untuk pelaksanaan *Innovative Government Award* (IGA), kegiatan tersebut telah diselenggarakan sejak tahun 2017 dan mulai tahun 2018 penilaian IGA diperkuat dengan aplikasi Indeks Inovasi Daerah.

Setiap tahun, Kementerian Dalam Negeri melakukan penjaringan atas berbagai macam data inovasi yang pemerintah daerah lakukan, baik itu berbentuk inovasi tata kelola pemerintahan, inovasi pelayanan publik, maupun inovasi lainnya sesuai dengan urusan kewenangan daerah. Pada tahun 2021 lalu, Kementerian Dalam Negeri telah menghimpun sebanyak 25.124 inovasi yang dilaporkan oleh 519 pemda melalui aplikasi indeks inovasi daerah pada laman indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id. Inovasi tersebut mengalami eskalasi yang tajam dari tahun tahun sebelumnya, yaitu: pada tahun 2018 lalu diikuti oleh 188 pemerintah daerah dengan jumlah inovasi 3.718, tahun 2019 diikuti oleh 260 pemerintah daerah dengan jumlah inovasi 8.016 dan di tahun 2020 diikuti oleh 484 pemerintah daerah dengan jumlah inovasi 17.779. Kenaikan jumlah inovasi tersebut menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah untuk melakukan reformasi dan transformasi organisasional, dengan penekanan pada peningkatan mutu pelayanan publik yang lebih cepat (*faster*), lebih mudah (*easier*), lebih murah (*cheaper*), lebih pintar (*smarter*) dan lebih baik (*better*) baik melalui inovasi digital maupun inovasi non-digital.

Adapun penilaian indeks inovasi daerah tahun 2021 lalu diperoleh hasil: 37 Pemerintah Daerah berkategori Sangat Inovatif, 316 Pemerintah Daerah berkategori Inovatif, 166 Pemerintah Daerah berkategori Kurang Inovatif dan 23 Pemerintah Daerah berkategori Tidak Dapat Dinilai. Selanjutnya Penerima Penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri terhadap daerah dengan kategori 5 Provinsi Terinovatif, 10 Kabupaten Terinovatif, 10 Kota Terinovatif, 3 Daerah Perbatasan Terinovatif dan 3 Daerah Tertinggal Terinovatif. Sementara khusus untuk klaster daerah kabupaten/kota terinovatif kategori Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sejauh ini belum dapat diberikan mengingat rendahnya partisipasi pelaporan inovasi daerah di wilayah tersebut.

Penerima penghargaan *Innovative Government Award* merupakan daerah yang tidak hanya mampu menghasilkan inovasi dari sisi kuantitas namun juga kualitas (kematangan inovasi) serta memiliki komitmen kuat dalam mendorong budaya inovasi di daerahnya. Hal tersebut

direpresentasikan dengan upaya pelembagaan inovasi dan kemampuan mensinergikan antara kepemimpinan, sumber daya, kemampuan berkolaborasi dalam mencapai kemanfaatan inovasi untuk masyarakat.

Hadirnya inovasi tersebut tentu memperkuat simpul-simpul pertumbuhan nasional, sebab inovasi pastinya diciptakan untuk mengatasi tantangan-tantangan pembangunan seperti isu kemiskinan, kesenjangan wilayah, defisit infrastruktur, keterbatasan anggaran dan sebagainya. Adanya inovasi akan menopang peningkatan daya saing daerah, yang pada akhirnya berakumulasi pada naiknya daya saing nasional. Menurut laporan survey *World Competitiveness Yearbook (WCY)* 2021, daya saing Indonesia naik menjadi peringkat 37 dari sebelumnya peringkat 40 di tahun sebelumnya. Jika ditelisik lebih dalam, dari 4 komponen utama penilaian survei (kondisi perekonomian, efisiensi pemerintahan, efisiensi bisnis, infrastruktur), komponen efisiensi pemerintahan yang menyumbang tertinggi peningkatan daya saing. Ini menunjukkan efisiensi yang kita lakukan sudah ke arah yang tepat dan berdampak cukup signifikan.

Pemerintah daerah perlu berstrategi secara cermat agar inovasi yang dihadirkan dapat memberi manfaat yang optimal dan berkelanjutan bagi masyarakat. Inovasi daerah memerlukan dukungan dari berbagai aspek, seperti aspek kepemimpinan, kapasitas dan kompetensi kelembagaan, sumber daya, dan lingkungan yang mendukung budaya organisasi yang tangguh, adaptif dan fleksibel. Pemerintah daerah dapat menempuh berbagai strategi dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya. Sumber daya tersebut mengacu pada pengaturan organisasi, manajemen data, dan jejaring atau kemitraan strategis. Untuk mendorong kinerja inovasi daerah, Kementerian Dalam Negeri melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah yang belum mendapatkan penghargaan dan/atau insentif inovasi daerah; dan pemerintah daerah yang telah menerima penghargaan dan/atau insentif inovasi daerah, dengan melibatkan banyak pihak dan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui buku pembinaan inovasi daerah.

B. MANFAAT

Buku ini memberikan gambaran kinerja inovasi daerah di kabupaten/kota wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Dengan demikian dapat dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan kebijakan pembinaan inovasi daerah baik oleh provinsi maupun kementerian/lembaga.

C. TUJUAN

Penyusunan Buku Peta Pembinaan Inovasi Daerah tahun 2022 ini dimaksudkan untuk memberikan :

- a. Gambaran kinerja inovasi daerah;
- b. Bahan evaluasi kebijakan pembinaan inovasi daerah
- c. Bahan perumusan dan pengembangan kebijakan pembinaan inovasi daerah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah

D. RUANG LINGKUP

Buku Peta Pembinaan Inovasi Daerah merupakan rangkuman dari perkembangan kinerja inovasi daerah di wilayah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia pada periode penilaian Indeks Inovasi Daerah Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021. Buku ini secara khusus mengulas inovasi daerah yang telah diterapkan oleh pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2019 dan 2020 dan dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui aplikasi Indeks Inovasi Daerah tahun 2021. Adapun pemerintah kabupaten/kota yang akan dideskripsikan dalam buku ini adalah Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, Kota Bontang, dan Kota Samarinda.

Informasi capaian kinerja inovasi di kabupaten/kota pada wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang disajikan, diharapkan dapat memberi gambaran perkembangan kekuatan dan kelemahan inovasi di wilayah tersebut baik dari Aspek Satuan Pemerintahan Daerah (SPD) maupun Aspek Satuan Inovasi Daerah (SID). Indeks Inovasi Daerah terdiri dari 2 aspek, 8 variabel dan 36 indikator. Aspek SPD memuat 3 variabel yaitu variabel Institusi, variabel Sumber Daya Manusia dan Jumlah Inovasi, serta variabel Ekosistem Inovasi dan Kajian. SPD terdiri atas 16 indikator yang merupakan indikator *output* dan *outcome*. Adapun Aspek SID terdiri dari 5 variabel yaitu variabel Infrastruktur, variabel Output Pengetahuan dan Teknologi, variabel Kecepatan Bisnis Proses, variabel Kecanggihan Produk, serta variabel Hasil Kreatif. Pada aspek SID tersebut mencakup 20 indikator yang merupakan indikator input dan proses. Indikator input dan proses merupakan indikator pengaktif inovasi di suatu daerah. Tabel berikut merupakan daftar indikator Indeks Inovasi Daerah sesuai dengan variabel dan aspek masing-masing.

Tabel 1. Daftar Indikator Indeks Inovasi Daerah

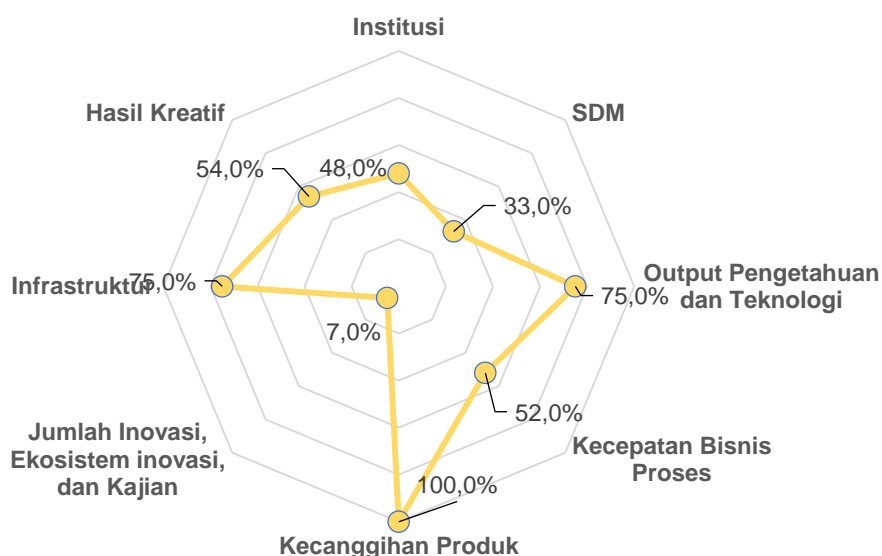
ASPEK	VARIABEL	INDIKATOR
SPD	Institusi	Visi Misi
		Tingkat Lembaga Kelitbangan
		APBD Tepat Waktu
		Kualitas Peningkatan Perizinan
		Jumlah Pendapatan Perkapita
		Tingkat Pengangguran Terbuka
		Jumlah Peningkatan Investasi
		Jumlah Peningkatan PAD
		Opini BPK
		Nilai Capaian Lakip
		Penurunan Angka Kemiskinan
		Jumlah Inovasi, Ekosistem inovasi, dan Kajian
	Jumlah penelitian atau kajian yang mendukung Inovasi	
	Roadmap SiDA	
	SDM	Nilai IPM
		Penghargaan Bagi Inovator
SID	Hasil Kreatif	Kemanfaatan Inovasi
		Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah
		Kualitas Inovasi Daerah
	Infrastruktur	Regulasi Inovasi Daerah
		Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah
		Dukungan Anggaran
		Penggunaan IT
		Bimtek Inovasi
		Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD
		Replikasi
	Kecanggihan Produk	Online Sistem
		Kecepatan Inovasi
		Pedoman Teknis
	Kecepatan Bisnis Proses	Kemudahan Informasi Layanan
		Penyelesaian Layanan Pengaduan

ASPEK	VARIABEL	INDIKATOR
		Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan
	Output Pengetahuan dan Teknologi	Jejaring Inovasi
		Pelaksana Inovasi Daerah
		Keterlibatan aktor inovasi
		Sosialisasi Inovasi Daerah

BAB I

PENDAHULUAN

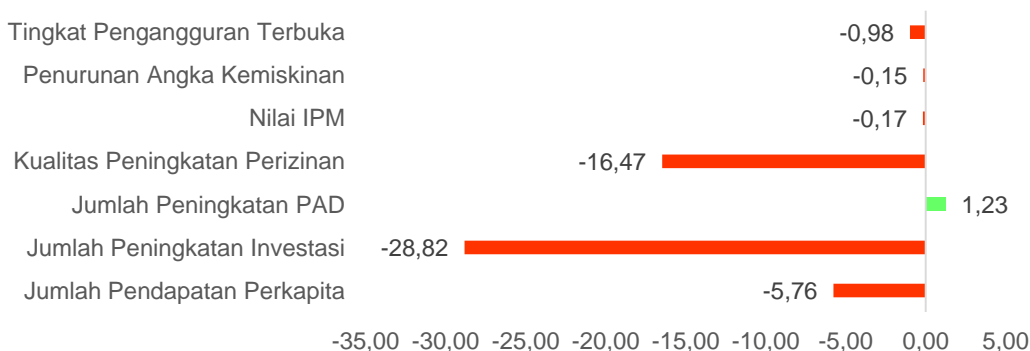
A. KABUPATEN BERAU



Gambar 1. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Berau

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Berau memiliki skor tertinggi pada variabel Kecanggihan Produk, yaitu 100,0%. Artinya, secara umum indikator - indikator pada variabel Kecanggihan Produk sudah mencapai skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian masih rendah, hanya sebesar 7,0%. Dengan kata lain, secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih sangat rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



Gambar 2. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Berau

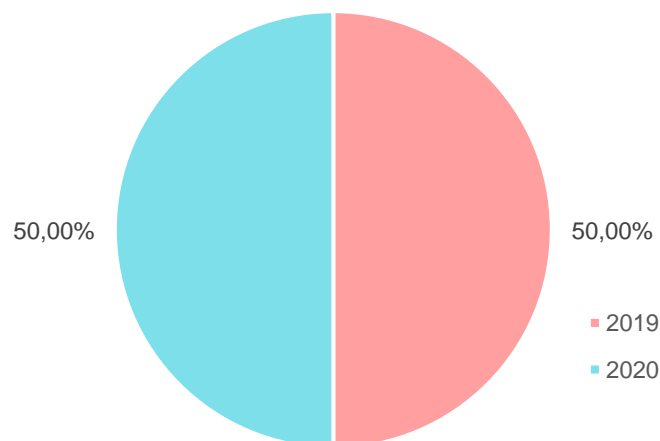
Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Berau belum mengalami perkembangan yang signifikan walaupun beberapa di antaranya masih belum signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Data menunjukkan adanya penurunan pada hampir keseluruhan indikator, kecuali Jumlah Peningkatan PAD.

Jumlah Peningkatan PAD meningkat sebesar 1,23%, namun nilai tersebut belum mencapai standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya naik sebesar 8%.

Indikator Penurunan Angka Kemiskinan tercatat naik sebesar 0,15% di mana nilai tersebut memiliki selisih yang cukup jauh dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya turun sebesar 0,02%. Pemerintah Kabupaten Berau juga mengalami penurunan pada Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 0,17% dimana seharusnya standar nasional parameter indeks inovasi sebesar 0% atau tetap. Selanjutnya, Tingkat Pengangguran Terbuka juga mencatat adanya penurunan sebesar 0,98%. Pada tahun 2020, jumlah pengangguran terbuka naik sebesar 0,98% dibandingkan tahun 2019. Kenaikan ini belum mencapai standar nasional parameter indeks inovasi daerah mengingat capaian yang berada sedikit di atas standar tersebut, yakni naik sebesar 0,92%. Demikian pula dengan Jumlah Pendapatan Perkapita yang mengalami penurunan sebesar 5,76%. Penurunan ini berada di bawah standar standar nasional parameter indeks inovasi daerah di mana indikator tersebut seharusnya hanya turun 1,85%. Adapun Kualitas Peningkatan Perizinan Kabupaten Berau terlihat menurun sebesar 16,47%, yang masih belum mencapai standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya naik sebesar 5%. Terakhir, Jumlah Peningkatan Investasi Kabupaten Berau mengalami penurunan yang paling signifikan, yakni sebesar 28,82%. Penurunan ini belum melampaui standar nasional parameter indeks inovasi daerah, yaitu sebesar 0,45%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

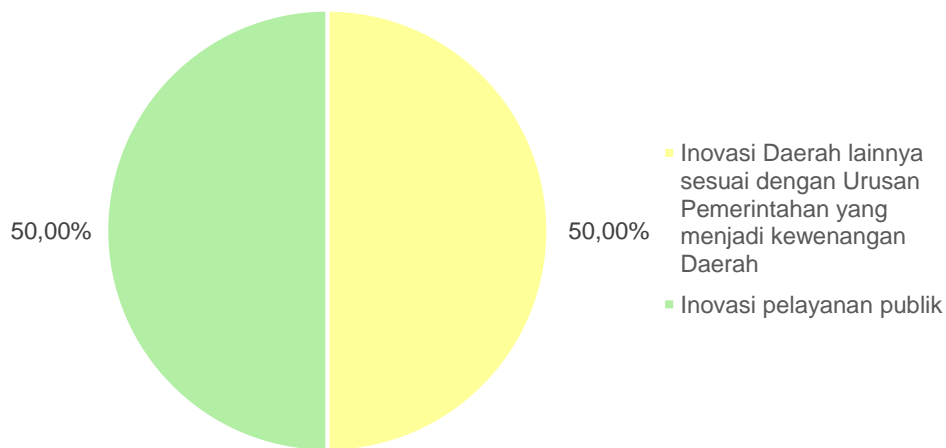
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 3. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Berau

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, terdapat proporsi yang sama antara inovasi yang dilaporkan dan telah diterapkan oleh Kabupaten Berau sejak tahun 2019 dan 2020. Dari total 8 inovasi yang dilaporkan, terdapat 4 (50%) inovasi yang diterapkan pada setiap tahunnya.

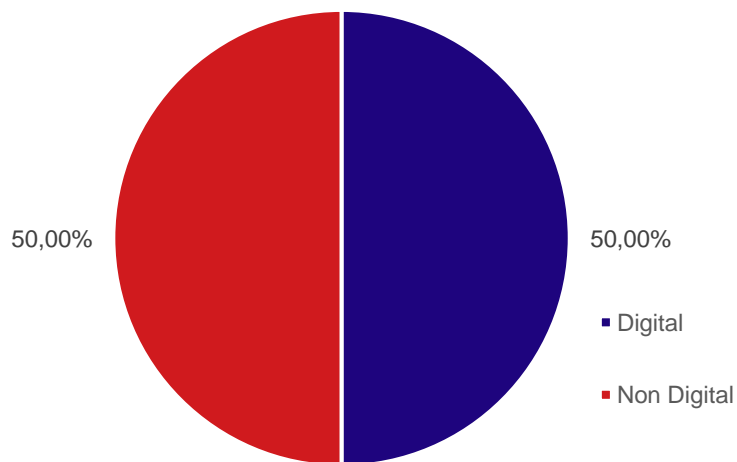
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 4. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Berau

Berdasarkan bentuk inovasi, Kabupaten Berau memiliki dua bentuk inovasi, yaitu inovasi pelayanan publik dan inovasi lainnya. Dari sisi proporsi, kedua inovasi tersebut memiliki proporsi yang sama. Terdapat masing-masing sebanyak 4 (50,00%) inovasi, baik pada inovasi pelayanan publik maupun inovasi lainnya.

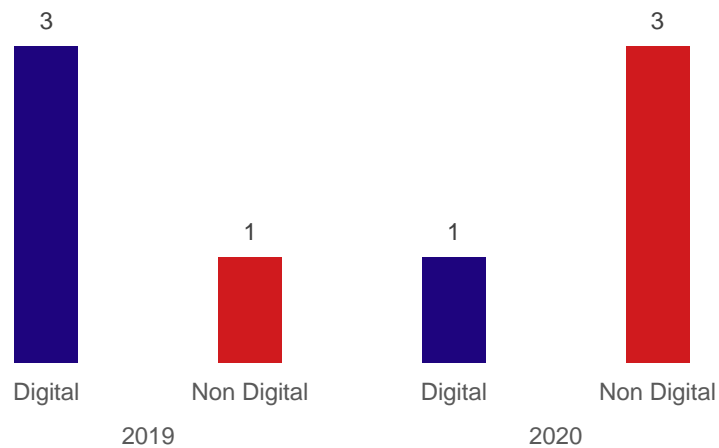
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 5. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Berau

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 berdasarkan jenis inovasinya, inovasi daerah yang dilaporkan Kabupaten Berau terdiri atas inovasi digital dan inovasi non digital. Kedua inovasi tersebut memiliki jumlah dan proporsi yang sama, yakni sebanyak 4 (50,00%) inovasi.

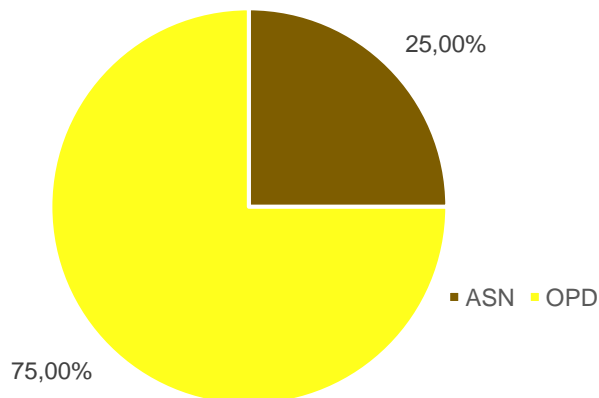
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 6. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Berau

Secara umum, jumlah inovasi dari tahun 2019 ke tahun 2020 tidak memiliki perubahan. Namun, jika dilihat berdasarkan jenis inovasinya kedua tahun tersebut memiliki perkembangan yang bertolak belakang. Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 terdapat 3 inovasi digital dan 1 inovasi non digital. Sebaliknya, pada tahun 2020 terdapat 1 inovasi digital dan 3 inovasi non digital.

e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 7. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Berau

Inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Berau pada tahun 2021 diinisiasi oleh 2 unsur, yakni Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan ASN. Sebagian besar inovasi diinisiasi oleh OPD, yaitu sejumlah 6 (75,00%) inovasi. Lebih lanjut, sebanyak 2 (25,00%) inovasi diinisiasi oleh ASN. Di sisi lain, inovasi yang diinisiasi oleh Masyarakat, Kepala Daerah, dan DPRD belum dilaporkan di tahun 2021.

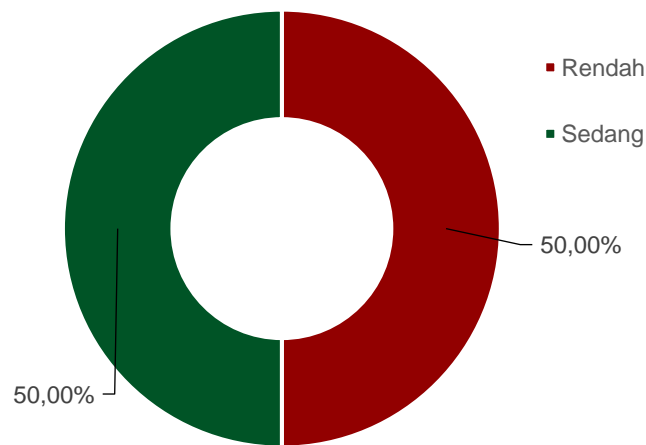
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 8. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Berau

Sebaran inovasi daerah pada Kabupaten Berau berdasarkan urusan pemerintahan tersebar pada enam urusan, di mana satu di antaranya adalah urusan wajib pelayanan dasar, yaitu urusan pendidikan dengan jumlah inovasi sebanyak 2 inovasi. Sementara itu, lima urusan lainnya adalah urusan penanaman modal, koperasi, usaha kecil, dan menengah, kelautan dan perikanan, kearsipan, serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Urusan yang paling banyak adalah inovasi pada urusan kelautan dan perikanan, yaitu sebanyak 2 inovasi. Sementara itu, inovasi pada 4 urusan lainnya memiliki jumlah inovasi yang sama, yakni sebanyak masing-masing 1 inovasi.

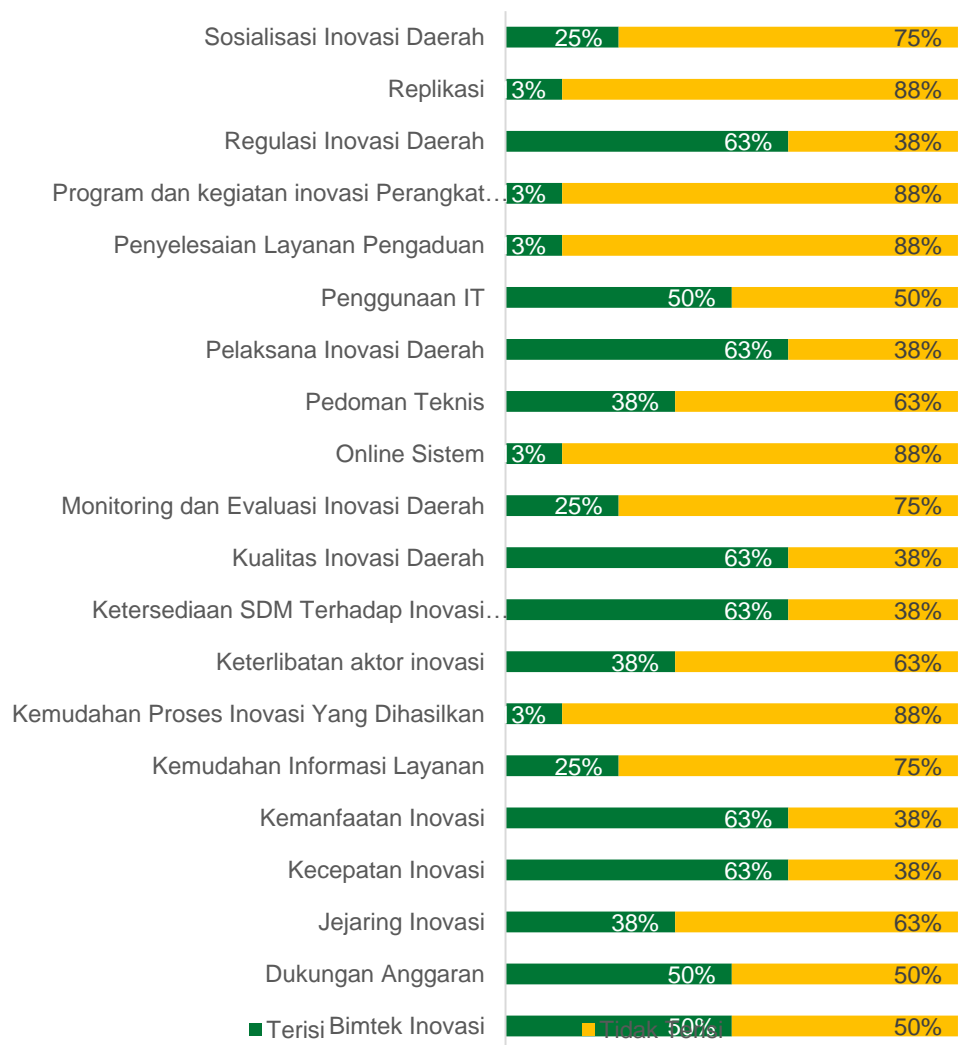
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 9. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Berau

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, terdapat proporsi yang sama antara inovasi dengan skor kematangan rendah dan sedang. Sebanyak masing-masing 4 (50,00%) inovasi berada pada skor kematangan rendah dan sedang. Selain itu, tidak terdapat inovasi yang memiliki skor kematangan tinggi. Sebagai informasi, skor kematangan tinggi adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

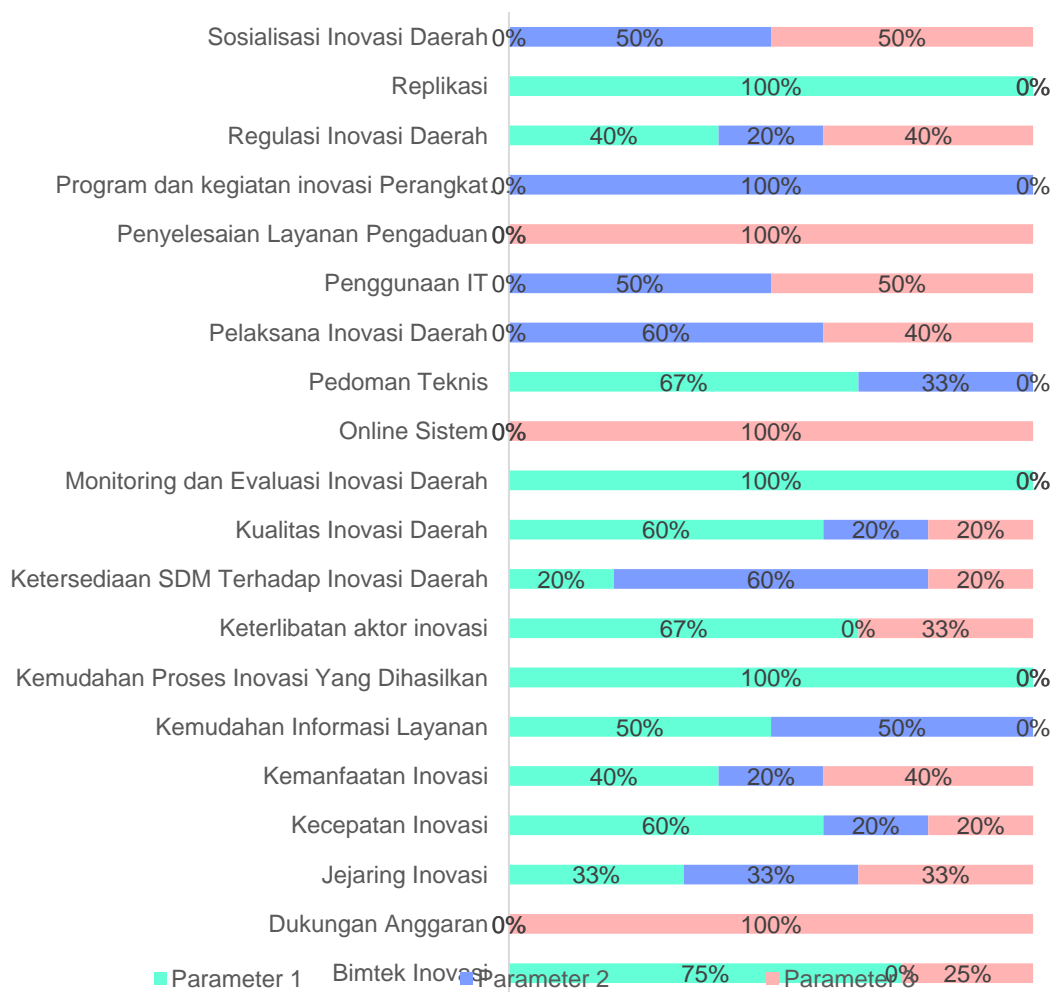
h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 10. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Berau

Dari 8 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Berau, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 61,25% sedangkan 38,75% lainnya telah terisi data pendukung. Selanjutnya, berdasarkan gambar di atas, indikator Regulasi Inovasi Daerah, Pelaksana Inovasi Daerah, Kualitas Inovasi Daerah, Ketersediaan SDM terhadap Inovasi Daerah, Kemanfaatan Inovasi, dan Kecepatan Inovasi memiliki persentase keterisian tertinggi, yaitu sebesar 63%. Hal tersebut menunjukkan bahwa 63% inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Berau telah terisi data pendukung pada indikator-indikator tersebut. Di sisi lain, masih terdapat beberapa indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung sebesar 13%, yaitu indikator Replikasi, Program dan Kegiatan Inovasi Daerah dalam RKPD, Penyelesaian Layanan Pengaduan, *Online System*, dan Kemudahan Proses Inovasi yang Dihasilkan. Dengan kata lain seluruh inovasi yang dilaporkan masih belum terisi data pendukung dari indikator-indikator tersebut.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 11. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

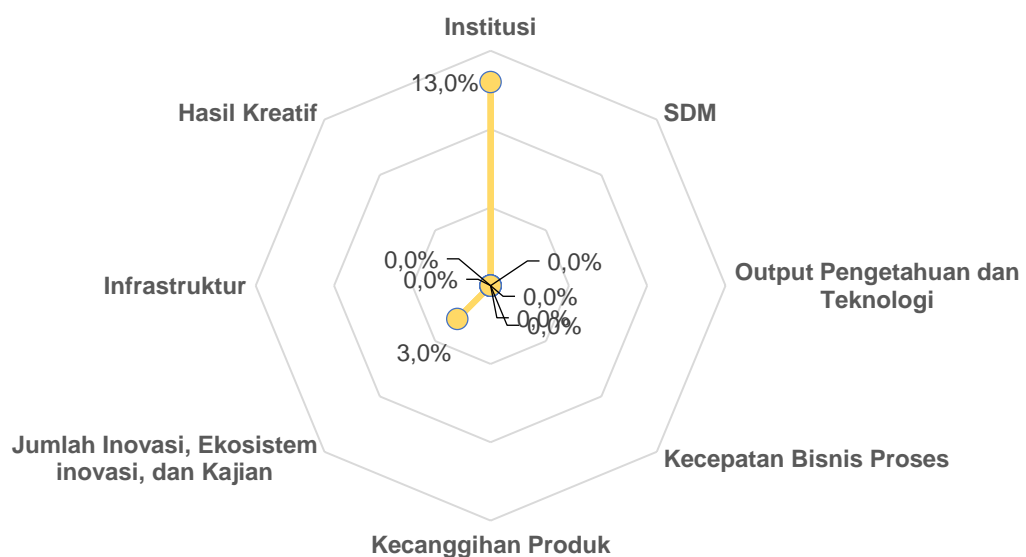
Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Penyelesaian Layanan Pengaduan, *Online System*, dan Dukungan Anggaran sebesar 100%, artinya seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada ketiga indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Program dan dan Kegiatan Inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD sebesar 100%, artinya seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Replikasi, Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah, dan Kemudahan Proses Inovasi yang Dihasilkan sebesar 100%. Dengan kata lain, seluruh inovasi telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk indikator-indikator tersebut.

j. Daftar Inovasi Kabupaten Berau beserta Skor Kematangannya

Tabel 2. Daftar Inovasi Kabupaten Berau beserta Skor Kematangannya

Nama Inovasi	Skor Kematangan
NEW NORMAL PSAD	0
Pelayanan PTSP New Normal pada situasi pandemi covid-19 di Kabupaten Berau	0
Layanan Pengaduan Masyarakat Digital	0
Si PURI (Sistem Kemitraan Pelaku Utama Perikanan)	87
SUKA SUKA ANDA (Satu Kampung Perikanan, Satu Kelompok Andalan)	63
Aplikasi Digitalisasi Kepegawaian	31
Percepatan Pemerataan Mutu Pendidikan Dasar	65
Si Penyus Beramal (Sistem Pelayanan Kependudukan Berbasis Android untuk Masyarakat Batiwakkal)	84

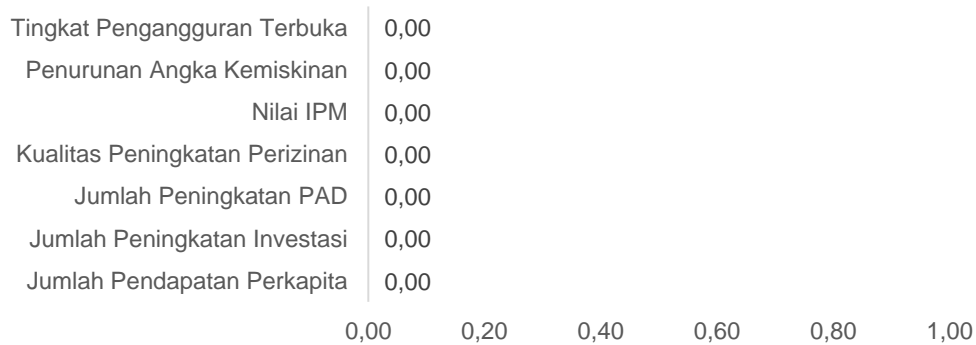
B. KABUPATEN KUTAI BARAT



Gambar 12. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Kutai Barat

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Kutai Barat memiliki skor tertinggi pada variabel Institusi, yaitu 13,0%. Artinya, secara umum indikator - indikator pada variabel Institusi masih belum mencapai skor maksimal (parameter 3). Di sisi lain, variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi, dan Kajian memiliki skor capaian sebesar 3% dan variabel-variabel lainnya masih memiliki capaian 0%. Dengan kata lain, sebagian besar capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih sangat rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



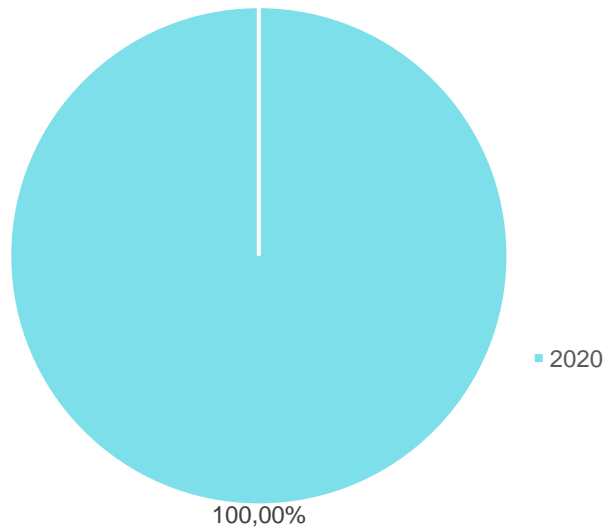
Gambar 13. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Kutai Barat

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa seluruh indikator pada Kabupaten Kutai Barat tidak mengalami perubahan. Meskipun demikian, beberapa di antaranya masih belum memenuhi standar nasional parameter indeks inovasi daerah, yaitu Jumlah Peningkatan Investasi, Jumlah Peningkatan PAD, Kualitas Peningkatan Perizinan, dan Penurunan Angka Kemiskinan. Pertama, Jumlah Peningkatan Investasi seharusnya mengalami peningkatan paling tidak sebesar 0,45%. Kedua, Jumlah Peningkatan PAD juga ditargetkan naik, yaitu sebesar 8%. Ketiga, standar nasional pada Kualitas Peningkatan Perizinan adalah adanya peningkatan sebesar 5%. Terakhir, Penurunan Angka Kemiskinan seharusnya naik sebesar 0,02%. Artinya, Angka Kemiskinan ditargetkan menurun sebesar 0,02% pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan periode 2019.

Di sisi lain, indikator yang sudah memenuhi standar nasional parameter indeks inovasi daerah di antaranya adalah Jumlah Pendapatan Perkapita, Nilai IPM, dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Capaian Kabupaten Kutai Barat pada Jumlah Pendapatan Perkapita sudah melampaui standar nasional parameter indeks inovasi daerah di mana indikator tersebut mengalami penurunan sebesar 1,85%. Demikian pula dengan nilai IPM yang sudah memenuhi standarnya di mana nilai IPM ditargetkan tidak mengalami perubahan atau tetap (0%). Terakhir, Tingkat Pengangguran Terbuka juga tidak mengalami perubahan. Indikator tersebut sudah sesuai dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah di mana jumlah pengangguran terbuka pada tahun 2020 naik 0,92% dibandingkan tahun 2019.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

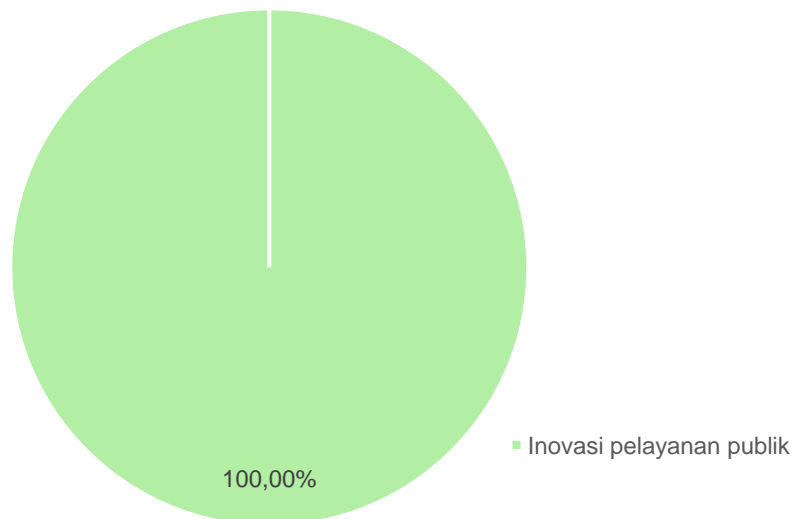
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 14. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Kutai Barat

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Kutai Barat telah diterapkan sejak tahun 2020, dengan total sebanyak 8 inovasi. Sementara itu, belum ada inovasi yang diterapkan sejak tahun 2019.

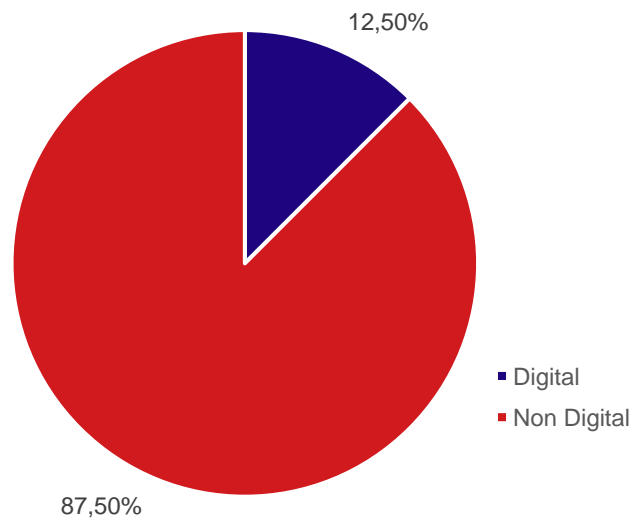
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 15. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Kutai Barat

Berdasarkan bentuk inovasi, hanya terdapat 1 bentuk inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Kutai Barat, yaitu inovasi pelayanan publik sebanyak 8 inovasi. Sementara itu, inovasi tata kelola pemerintah daerah dan inovasi bentuk lainnya belum terlapor.

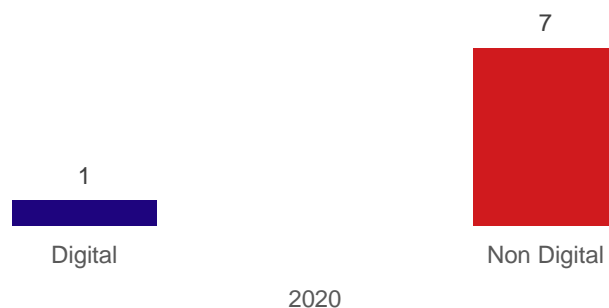
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 16. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Kutai Barat

Berdasarkan jenis inovasinya, Indeks Inovasi Daerah di Kabupaten Kutai Barat pada tahun penilaian 2021 terdiri atas dua jenis, yaitu inovasi digital dan inovasi non digital. Dilihat dari proporsinya, 7 (87,50%) dari 8 inovasi daerah yang dilaporkan Kabupaten Kutai Barat merupakan inovasi non digital, dan 1 (12,50%) inovasi sisanya merupakan inovasi digital. Sementara itu, belum ada inovasi teknologi yang dilaporkan.

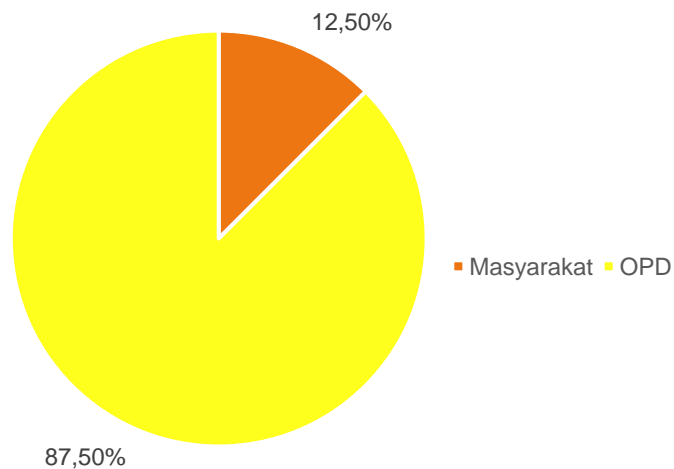
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 17. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Kutai Barat

Secara umum, terdapat perbedaan jenis inovasi yang dilaporkan pada tahun 2019 dan tahun 2020. Pada tahun 2019, inovasi yang dilaporkan hanya inovasi digital, dengan jumlah inovasi sebanyak 1 inovasi. Sementara itu, 7 inovasi dilaporkan pada tahun 2020 dan merupakan inovasi non digital.

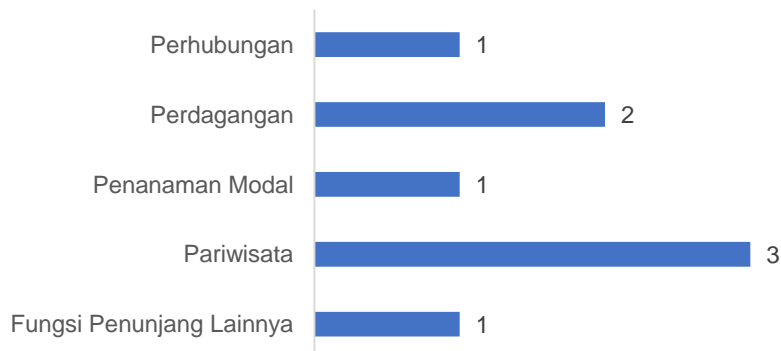
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 18. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Kutai Barat

Gambar di atas menunjukkan bahwa inovasi daerah pada Kabupaten Kutai Barat hanya diinisiasi oleh 2 unsur, di antaranya adalah Masyarakat dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sebagian besar inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2021 diinisiasi oleh OPD, yaitu sejumlah 7 (87,50%) inovasi. Sementara itu, sebanyak 1 (12,50%) sisanya diinisiasi oleh masyarakat. Untuk inovasi yang diinisiasi oleh DPRD, ASN, dan Kepala Daerah belum dilaporkan di tahun 2021.

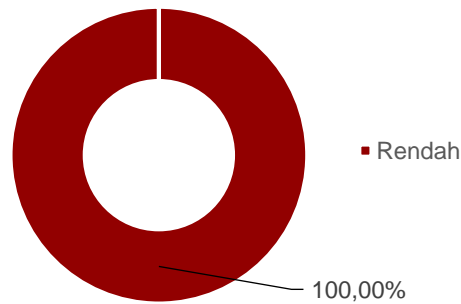
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 19. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Kutai Barat

Inovasi daerah pada Kabupaten Kutai Barat berdasarkan urusan pemerintahan tersebar pada 5 urusan. Namun, tidak ada inovasi yang terkait dengan urusan wajib pelayanan dasar. Mayoritas urusan inovasi di Kabupaten Kutai Barat adalah inovasi pada urusan pariwisata sebanyak 3 inovasi. Selanjutnya, 2 inovasi merupakan urusan perdagangan dan masing-masing 1 inovasi berada pada urusan perhubungan, penanaman modal, dan fungsi penunjang lainnya.

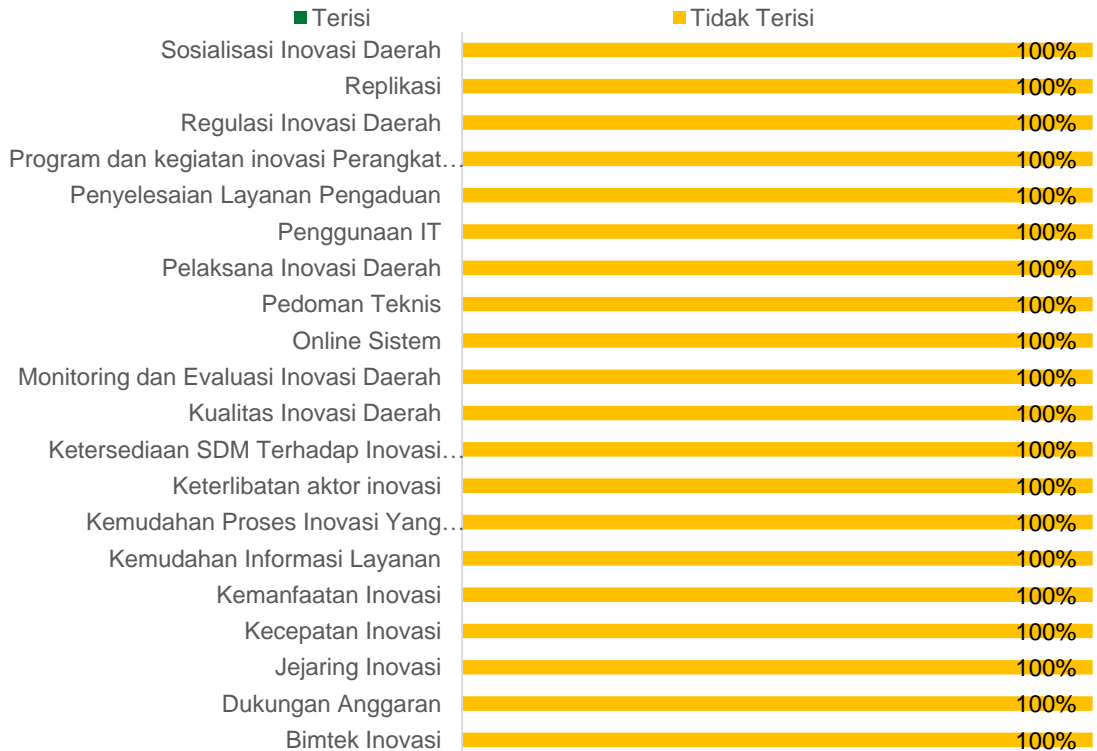
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 20. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Kutai Barat

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan inovasinya, seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Kutai Barat memiliki skor kematangan yang rendah. Sementara itu, belum terdapat inovasi dengan skor kematangan sedang dan tinggi. Sebagai informasi, skor kematangan tinggi adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

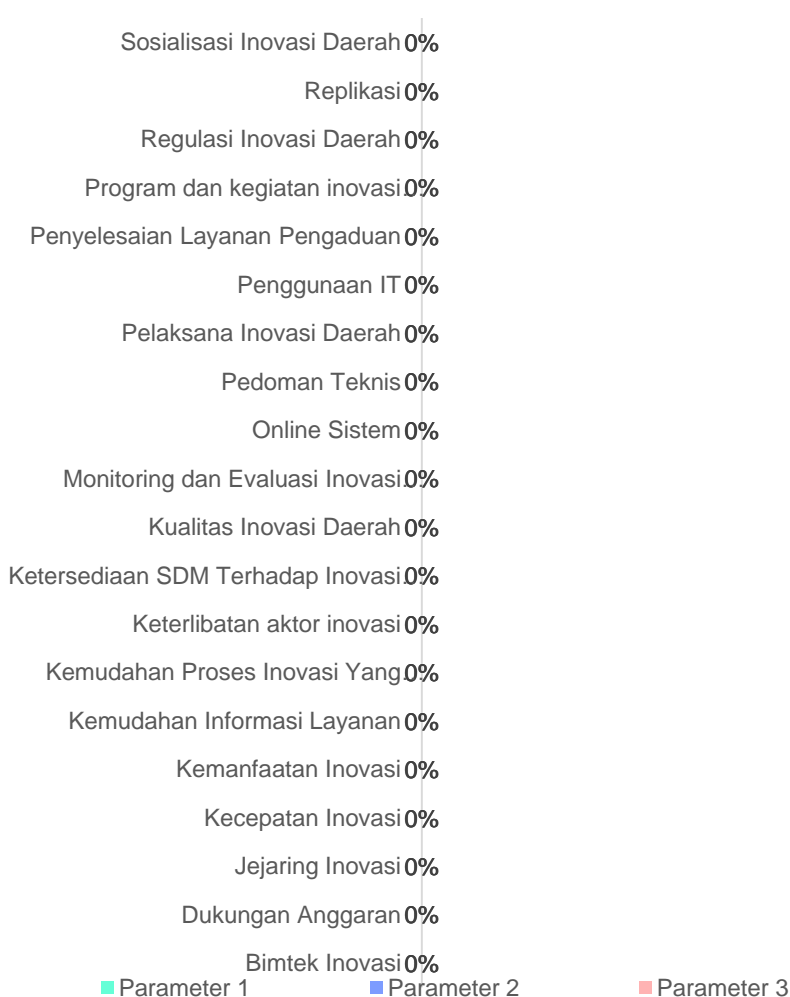
h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 21. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Barat

Dari 8 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Kutai Barat, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 100% sedangkan 0% lainnya telah terisi data pendukung. Dengan kata lain, seluruh indikator dalam satuan inovasi daerah masih belum terisi data pendukung yang diperlukan.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 22. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung bahwa seluruh indikator masih belum terisi data pendukung yang diperlukan, baik pada parameter 3 (tiga), parameter 2 (dua), maupun parameter 1 (satu).

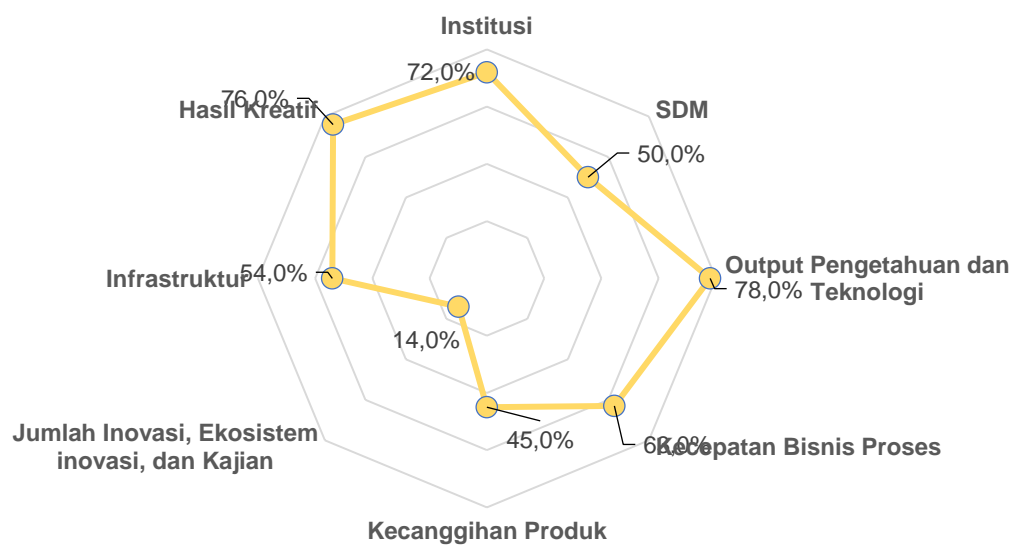
j. Daftar Inovasi Kabupaten Kutai Barat beserta Skor Kematangannya

Tabel 3. Daftar Inovasi Kabupaten Kutai Barat beserta Skor Kematangannya

Nama Inovasi	Skor Kematangan
Inovasi Daerah Pencegahan Covid-19 Pada Sektor Pasar Tradisional	0
Inovasi Daerah Pencegahan Covid 19 Pada Sektor Transportasi Umum	0
Hotel C-19	0

Inovasi Daerah Pencegahan Covid-19 Pada Sektor Tempat Wisata	0
Inovasi Daerah Pencegahan Covid-19 Pada Sektor Restoran	0
Inovasi Daerah Pencegahan Covid-19 Pada Sektor PTSP	0
Inovasi Daerah Pencegahan Covid-19 pada Sektor Pasar Modern / Mal	0
Paduka Barjas 2020 (Pelayanan Terpadu Unit Kerja Barang Jasa)	0

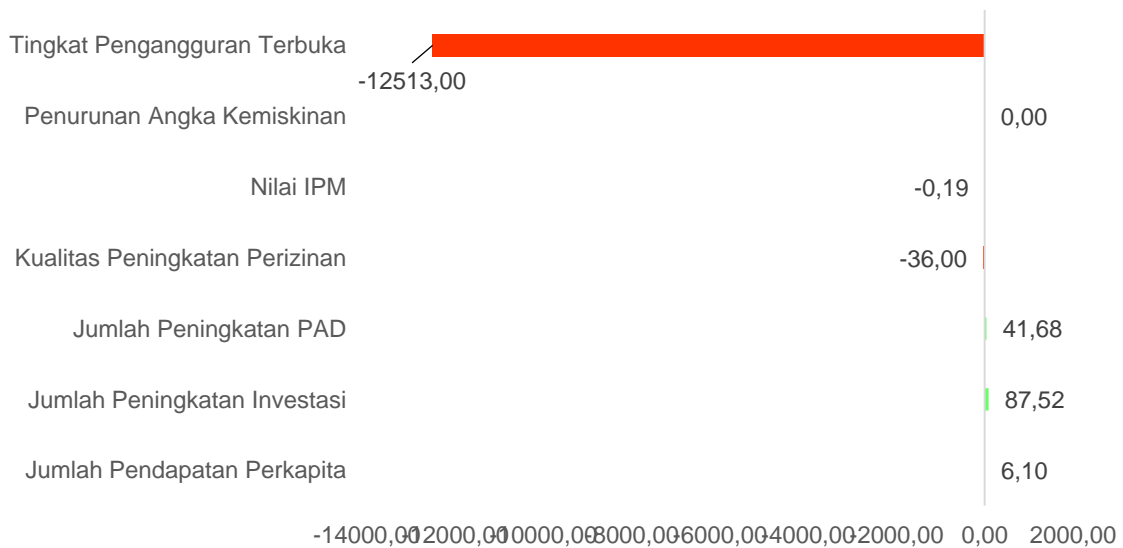
C. KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



Gambar 23. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Kutai Kartanegara

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki skor tertinggi pada variabel Output Pengetahuan dan Teknologi, yaitu 78,0%. Artinya, secara umum indikator - indikator pada variabel Output Pengetahuan dan Teknologi sudah mencapai skor yang cukup mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi, dan Kajian masih cukup rendah, yakni berada pada skor 14%. Dengan kata lain, secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



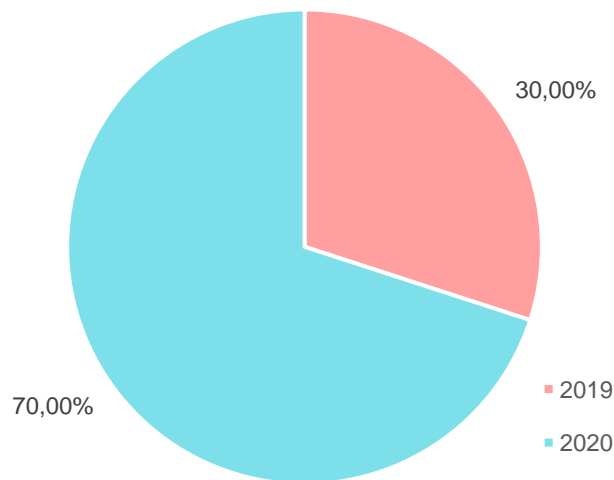
Gambar 24. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Kutai Kartanegara

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Kutai Kartanegara cukup mengalami perkembangan yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Meskipun demikian, terdapat beberapa penurunan pada beberapa indikator. Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan yang paling signifikan, bahkan melampaui 100%. Hal tersebut menunjukkan bahwa selain capaian yang tidak memenuhi standar nasional parameter indeks inovasi daerah (naik 0,92%), data yang diinput pada indikator tersebut tidak sesuai yang diminta. Selanjutnya, pada indikator Kualitas Peningkatan Perizinan terdapat penurunan sebesar 36,00%. Penurunan ini masih belum sesuai dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah di mana seharusnya terdapat kenaikan sebesar 5%. Nilai IPM juga mengalami penurunan sebesar 0,19%, dimana nilai tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah sebesar 0% atau tetap. Adapun indikator Penurunan Angka Kemiskinan tidak mengalami perubahan, dan capaian tersebut masih belum memenuhi standar nasional parameter indeks inovasi daerah di mana seharusnya turun sebesar 0,02%.

Adapun indikator-indikator yang sudah mencapai atau melampaui standar nasional parameter indeks inovasi daerah di antaranya adalah Jumlah Pendapatan Perkapita, Jumlah Peningkatan PAD, dan Jumlah Peningkatan Investasi. Jumlah Pendapatan Perkapita Kabupaten Kutai Kartanegara naik sebesar 6,10%, melampaui standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang turun 1,85%. Selanjutnya, Jumlah Peningkatan PAD terpantau naik 41,68% pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019. Angka tersebut sudah melampaui standar nasional parameter indeks inovasi daerah di mana Jumlah Peningkatan PAD naik sebesar 8%. Terakhir, indikator yang mengalami peningkatan paling signifikan adalah Jumlah Peningkatan Investasi. Jumlah Peningkatan Investasi Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami peningkatan sebesar 87,52%. Jika dibandingkan dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah, angka tersebut sudah sangat melampaui angka standarnya, dengan peningkatan investasi sebesar 0,45%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

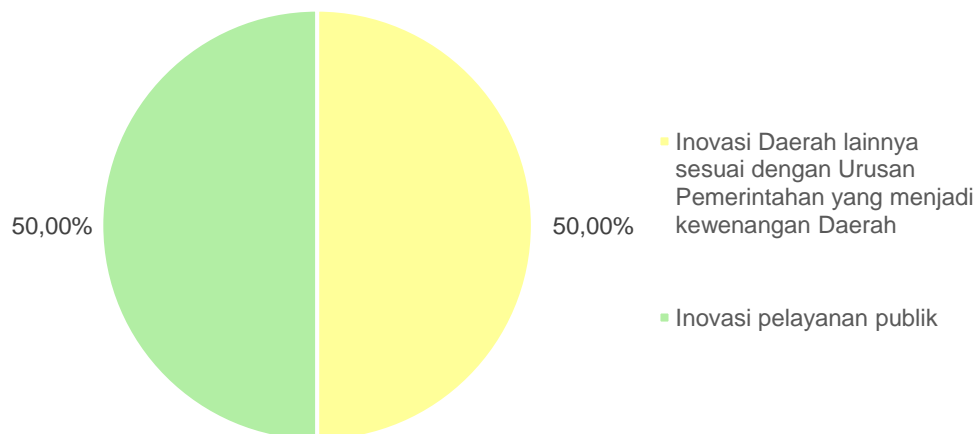
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 25. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Kutai Kartanegara

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, mayoritas inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Kutai Kartanegara telah diterapkan sejak tahun 2020. Terdapat 14 (70,00%) inovasi dari 20 inovasi yang dilaporkan tersebut diterapkan sejak tahun 2020 dan 6 (30,00%) inovasi lainnya diterapkan sejak tahun 2019.

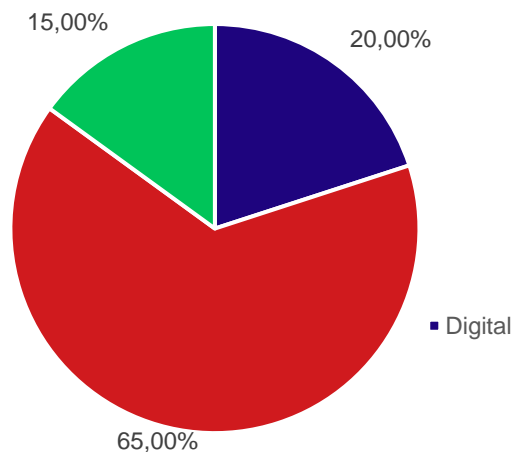
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 26. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Kutai Kartanegara

Berdasarkan bentuk inovasi, inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri atas inovasi pelayanan publik dan inovasi lainnya. Kedua bentuk tersebut memiliki proporsi yang sama, yaitu masing-masing sebanyak 10 (50,00%) inovasi. Sementara itu, belum ada inovasi tata kelola pemerintahan daerah dilaporkan.

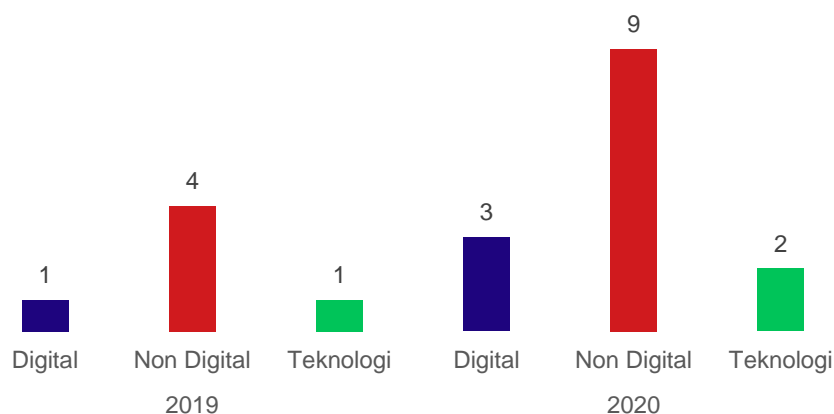
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 27. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Kutai Kartanegara

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 13 (65,00%) dari 20 inovasi daerah yang dilaporkan Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan inovasi non digital. Sementara itu, 4 (20,00%) inovasi merupakan inovasi digital dan 3 (15,00%) inovasi lainnya merupakan inovasi teknologi.

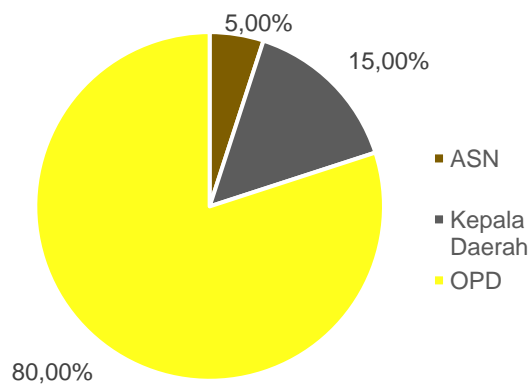
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 28. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Kutai Kartanegara

Secara umum, jumlah inovasi mengalami sedikit peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Pada tahun 2019, inovasi digital yang diterapkan adalah sejumlah 5 inovasi kemudian pada tahun 2020 meningkat menjadi 3 inovasi. Inovasi non digital juga mengalami peningkatan di mana pada tahun 2019 terdapat 4 inovasi lalu pada tahun 2020 menjadi 9 inovasi. Selain itu, pada tahun 2019 terdapat 1 inovasi teknologi, sedangkan pada tahun 2020 inovasi teknologi yang dilaporkan meningkat menjadi 2 inovasi.

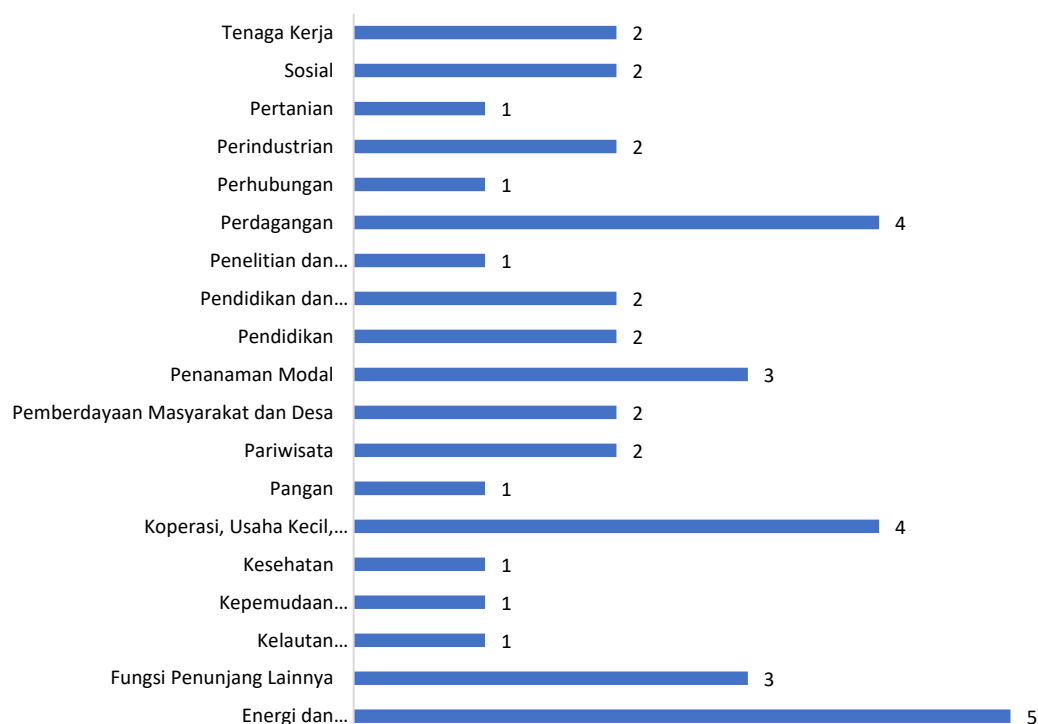
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 29. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Kutai Kartanegara

Inovasi pada Kabupaten Kutai Kartanegara diinisiasi oleh tiga unsur, di antaranya adalah ASN, Kepala Daerah, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Berdasarkan gambar di atas, mayoritas inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2021 diinisiasi oleh OPD, yaitu sejumlah 16 (80,00%) inovasi. Selanjutnya, 3 (35,29%) inovasi diinisiasi oleh Kepala Daerah dan 1 (5,00%) inovasi sisanya diinisiasi oleh ASN. Untuk inovasi yang diinisiasi oleh DPRD dan Masyarakat belum dilaporkan di tahun 2021.

f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan

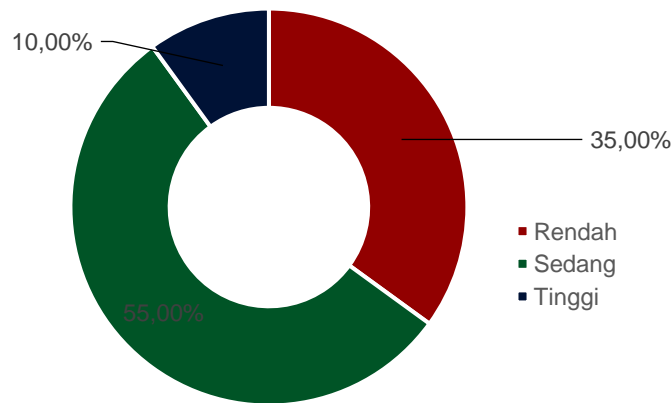


Gambar 30. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Kutai Kartanegara

Bagan di atas menunjukkan bahwa inovasi daerah pada Kabupaten Kutai Kartanegara tersebar pada berbagai urusan berbeda. Dari urusan tersebut, terdapat 3 urusan yang

berkaitan dengan pelayanan dasar, yakni urusan Sosial dan Pendidikan dengan jumlah inovasi masing-masing sebanyak 2 inovasi, serta urusan Kesehatan dengan 1 inovasi. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan urusan dengan jumlah inovasi terbanyak, yaitu sebanyak 5 inovasi. Selanjutnya, terdapat masing-masing 4 inovasi yang merupakan urusan Perdagangan serta Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah. Adapun urusan Penanaman Modal serta Fungsi Penunjang Lainnya memiliki jumlah inovasi masing-masing sebanyak 3 inovasi. Sementara itu, terdapat masing-masing 2 inovasi pada urusan Tenaga Kerja, Perindustrian, Pendidikan dan Pelatihan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Pariwisata. Adapun 7 urusan sisanya memiliki jumlah inovasi sebanyak 1 inovasi pada masing-masing urusan, yang meliputi urusan Pertanian, Perhubungan, Penelitian dan Pengembangan, Pangan, Kepemudaan dan Olahraga, serta Kelautan dan Perikanan.

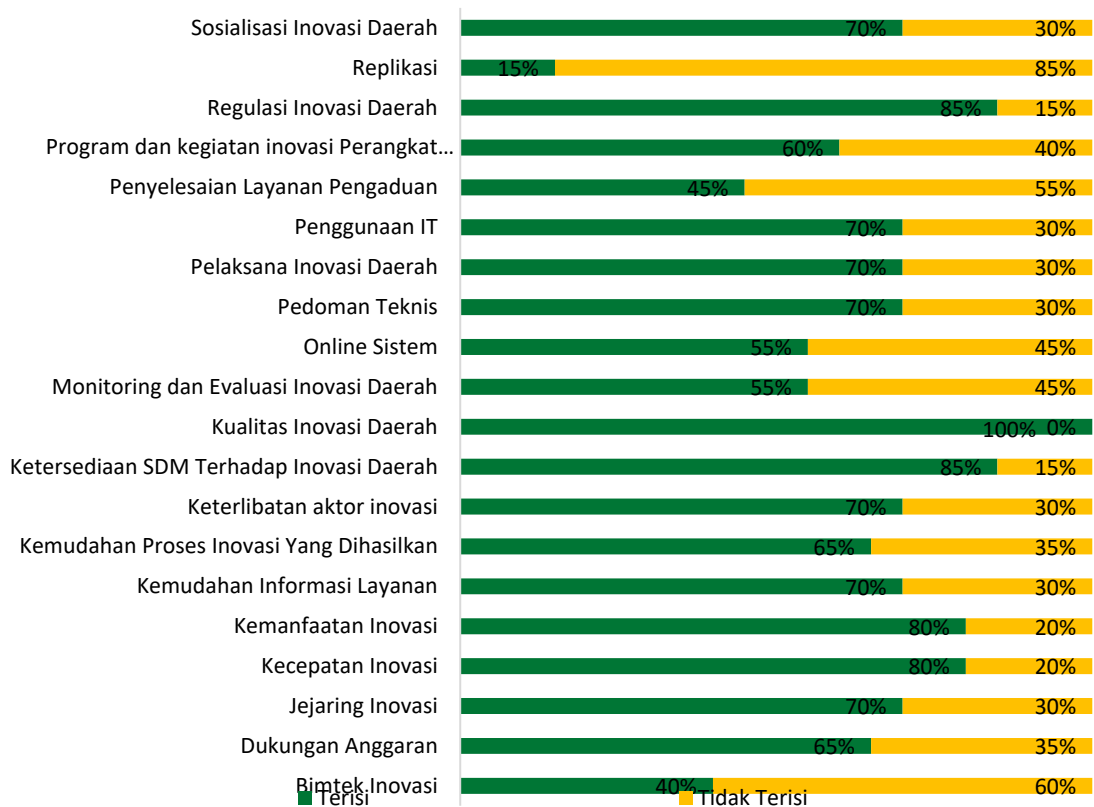
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 31. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Kutai Kartanegara

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, seluruh inovasi tersebar pada seluruh tingkat skor kematangan, yang meliputi skor kematangan rendah, sedang, dan tinggi. Sebagian besar inovasi tergolong dalam skor kematangan sedang, yakni sebanyak 11 (55,00%) inovasi dari 20 inovasi. Sementara itu, 7 (35,00%) inovasi tergolong ke dalam skor kematangan rendah. Adapun 2 (10,00%) inovasi sisanya mencapai skor kematangan tinggi. Sebagai informasi, skor kematangan tinggi adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

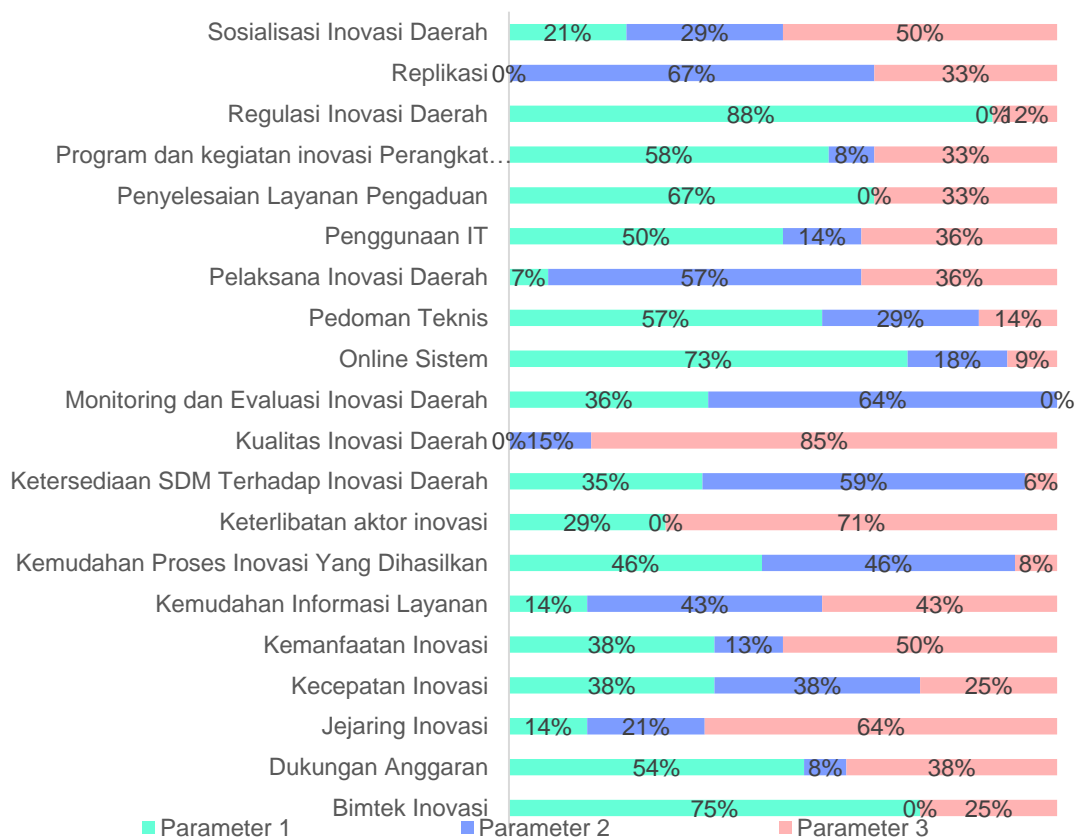
h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 32. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Dari 20 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Kutai Kartanegara, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 34,00% sedangkan 66,00% lainnya telah terisi data pendukung. Dengan kata lain, sebagian besar inovasi yang dilaporkan sudah terisi data-data pendukung yang diperlukan. Adapun indikator dengan tingkat keterisian tertinggi adalah Indikator Kualitas Inovasi Daerah dengan tingkat keterisian 100%. Artinya, seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Kutai Kartanegara telah terisi data pendukung pada indikator - indikator tersebut. Di sisi lain, indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah adalah indikator replikasi yaitu sebesar 15% artinya 15% inovasi yang dilaporkan masih belum terisi data pendukung dari indikator tersebut.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 33. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Kualitas Inovasi Daerah sebesar 85%. Artinya 85% inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut masuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Replikasi sebesar 67%. Dengan kata lain, 67% inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Regulasi Inovasi Daerah sebesar 88%. Dengan kata lain, 88% inovasi telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk indikator tersebut.

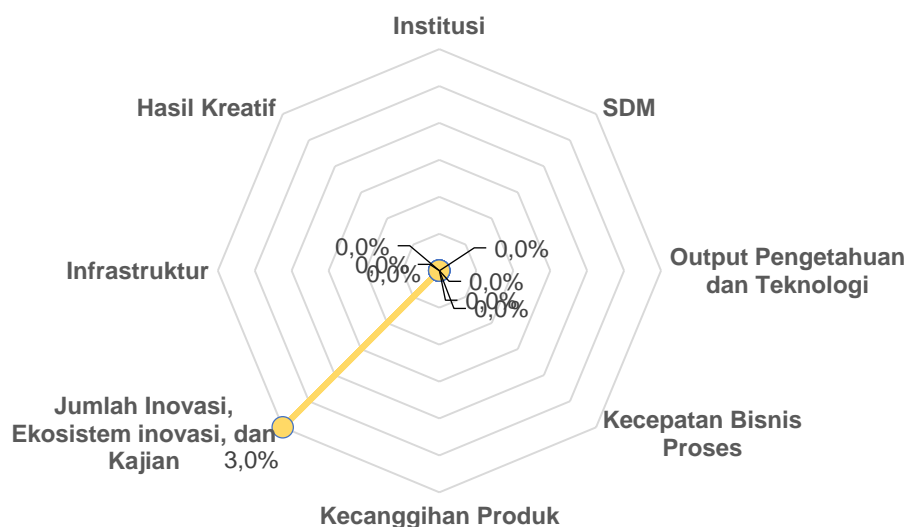
j. Daftar Inovasi Kabupaten Kutai Kartanegara beserta Skor Kematangannya

Tabel 4. Daftar Inovasi Kabupaten Kutai Kartanegara beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
BERWISATA AMAN COVID -19	15
TERPADU CEGAH COVID-19 SEKTOR PASAR TRADISIONAL	15
Senyum Pariwisata	81
Bilik Digital	61
Relaksasi Bergerak Lintas Sungai Aman Covid-19	15

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
RAJA PELET (RAMUAN JAMU DAN AZOLLA PENGGANTI PELET)	23
SI MANIS PANGGILAN SAYANG (SISTEM LAYANAN MEDIS KLINIK HEWAN & LAYANAN PANGGILAN MEDIS HEWAN KESAYANGAN)	19
Ikan Asin (Replika Kelola Listrik Komunal Tenaga Surya Sepatin)	70
Mengenalkan Potensi Manifestasi Panas Bumi dan Pemanfaatannya di Kabupaten Kutai Kartanegara (NASI BUMIKU)",	90
DILAN BerKoBAR (Digital Informasi Lampu Penerangan Jalan Berbasis KodeBAR)	82
GASAK-JARGASKU " Gas Untuk Rakyat, Aplikasi Titik Sebaran Daftar Pelanggan Tetap Jaringan Gas Rumah Tangga di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara"	71
" DARI HATI " DENGAN ENERGI MATAHARI BERTAMBAH USAHA DAN BERTAMBAH REJEKI	72
" MEMBUKA PELUANG USAHA PEMANFAATAN LANGSUNG PANAS BUMI KUTAI KARTANEGARA (KALUNG MANIK)"	80
KUKAR CSR AWARD	75
KUKAR PINTAR (Program Peningkatan Kualitas Pembelajaran SMP dengan sistem "Blended Learning")	126
KELOLA LISTRIK KOMUNAL MUARA ENGGELAM (KLIK ME)	100
Olah Bebaya Putri Kencana (Optimalisasi Pemberdayaan Perempuan Kreatif Kecamatan Anggana)	49
KLINIK WPM (Klinik Wirausaha Pemuda Mandiri)	76
Pasar Online Kecamatan Anggana di Masa Pandemi Covid 19	60
Inovasi Dagang Kemitraan	47

D. KABUPATEN KUTAI TIMUR



Gambar 34. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Kutai Timur

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Kutai Timur memiliki skor tertinggi pada variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi, dan Kajian, yaitu 3,0%. Artinya, secara umum indikator - indikator pada variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi, dan Kajian masih sangat rendah dan belum mencapai skor maksimal (parameter 3). Di sisi lain, variabel-variabel lainnya masih memiliki capaian 0%. Dengan kata lain, sebagian besar capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih belum tercapai atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



Gambar 35. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Kutai Timur

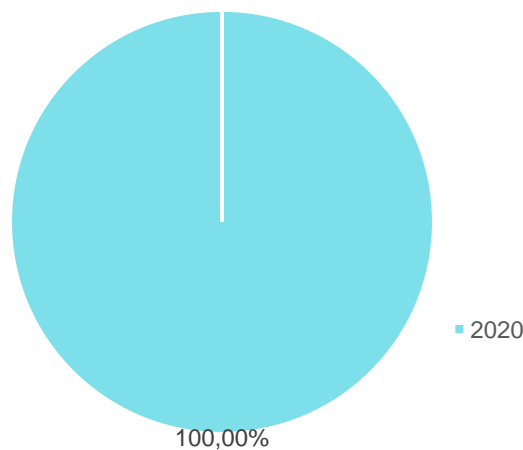
Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa seluruh indikator pada Kabupaten Kutai Timur tidak mengalami perubahan. Meskipun demikian, beberapa di antaranya masih belum memenuhi standar nasional parameter indeks inovasi daerah, yaitu Jumlah Peningkatan Investasi, Jumlah Peningkatan PAD,

Kualitas Peningkatan Perizinan, dan Penurunan Angka Kemiskinan. Pertama, Jumlah Peningkatan Investasi seharusnya mengalami peningkatan paling tidak sebesar 0,45%. Kedua, Jumlah Peningkatan PAD juga ditargetkan naik, yaitu sebesar 8%. Ketiga, standar nasional pada Kualitas Peningkatan Perizinan adalah adanya peningkatan sebesar 5%. Terakhir, Penurunan Angka Kemiskinan seharusnya naik sebesar 0,02%. Artinya, Angka Kemiskinan ditargetkan menurun sebesar 0,02% pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan periode 2019.

Di sisi lain, indikator yang sudah memenuhi standar nasional parameter indeks inovasi daerah di antaranya adalah Jumlah Pendapatan Perkapita, Nilai IPM, dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Capaian Kabupaten Kutai Timur pada Jumlah Pendapatan Perkapita sudah melampaui standar nasional parameter indeks inovasi daerah di mana indikator tersebut mengalami penurunan sebesar 1,85%. Demikian pula dengan nilai IPM yang sudah memenuhi standarnya di mana nilai IPM ditargetkan tidak mengalami perubahan atau tetap (0%). Terakhir, Tingkat Pengangguran Terbuka juga tidak mengalami perubahan. Indikator tersebut sudah sesuai dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah di mana jumlah pengangguran terbuka pada tahun 2020 naik 0,92% dibandingkan tahun 2019.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

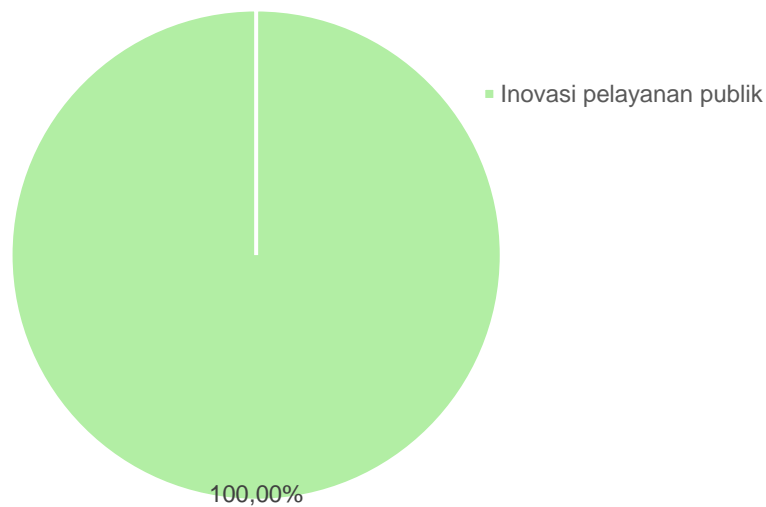
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 36. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Kutai Timur

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Kutai Timur telah diterapkan sejak tahun 2020, lebih tepatnya sebanyak 2 inovasi. Sementara itu, belum ada inovasi yang diterapkan sejak tahun 2019.

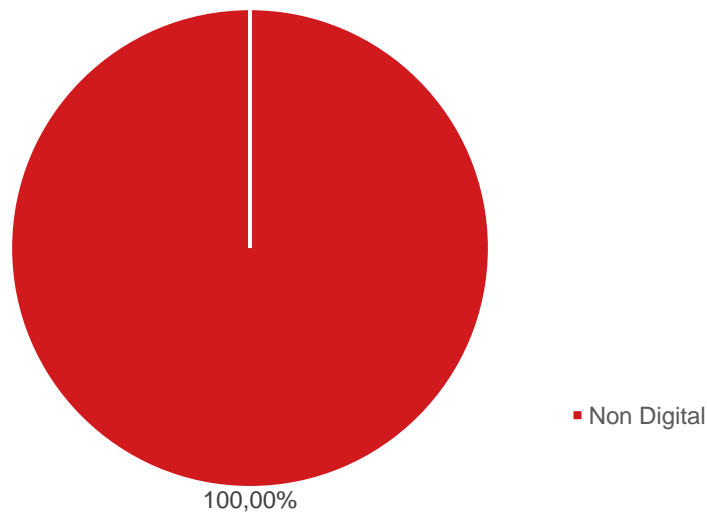
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 37. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Kutai Timur

Berdasarkan bentuk inovasi, seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Kutai Timur merupakan inovasi pelayanan publik, atau sejumlah 2 inovasi. Sementara itu, belum ada inovasi terlapor yang merupakan inovasi tata kelola pemerintahan daerah maupun inovasi lainnya.

c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 38. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Kutai Timur

Jika melihat jenis inovasinya, Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 yang dilaporkan oleh Kabupaten Kutai Timur hanya terdiri atas Inovasi Non Digital. Dengan kata lain, sebanyak 2 inovasi daerah yang dilaporkan Kabupaten Kutai Timur merupakan inovasi non digital. Sementara itu, belum ada inovasi non digital dan inovasi teknologi yang dilaporkan.

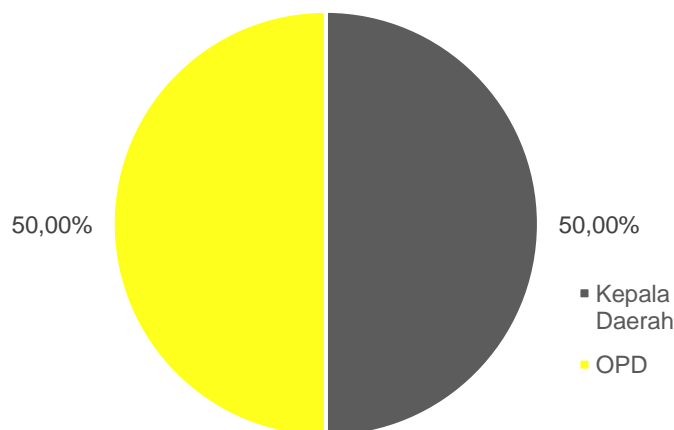
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 39. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Kutai Timur

Dari bagan di atas, dapat disimpulkan bahwa inovasi Kabupaten Kutai Kertanegara dilaporkan pada tahun 2020 dan termasuk dalam inovasi non digital. Sementara itu, tidak ada inovasi yang dilaporkan pada tahun 2019 ataupun yang termasuk dalam inovasi digital dan teknologi.

e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 40. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Kutai Timur

Bagan di atas menunjukkan bahwa inovasi pada Kabupaten Kutai Timur hanya diinisiasi oleh dua unsur, di antaranya adalah Kepala Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Lebih lanjut, terdapat proporsi yang sama antara kedua unsur tersebut, di mana terdapat masing-masing 1 (50,00%) inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Kutai Timur, baik yang diinisiasi oleh Kepala Daerah maupun OPD. Untuk inovasi yang diinisiasi oleh DPRD, ASN, dan Masyarakat belum dilaporkan di tahun 2021.

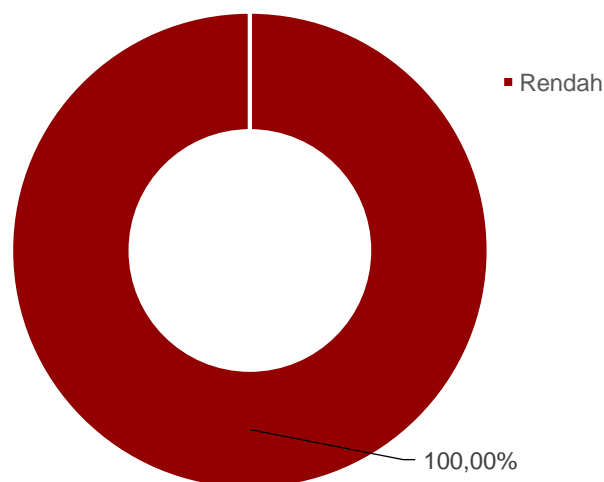
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 41. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Kutai Timur

Bagan di atas menunjukkan bahwa inovasi daerah pada Kabupaten Kutai Timur tersebar pada 2 urusan berbeda, di mana 1 di antaranya merupakan bagian dari urusan wajib pelayanan dasar. Urusan tersebut adalah urusan Kesehatan, dengan jumlah inovasi sebanyak 1 inovasi. Sementara itu, 1 urusan lainnya merupakan urusan Perdagangan dengan 1 inovasi.

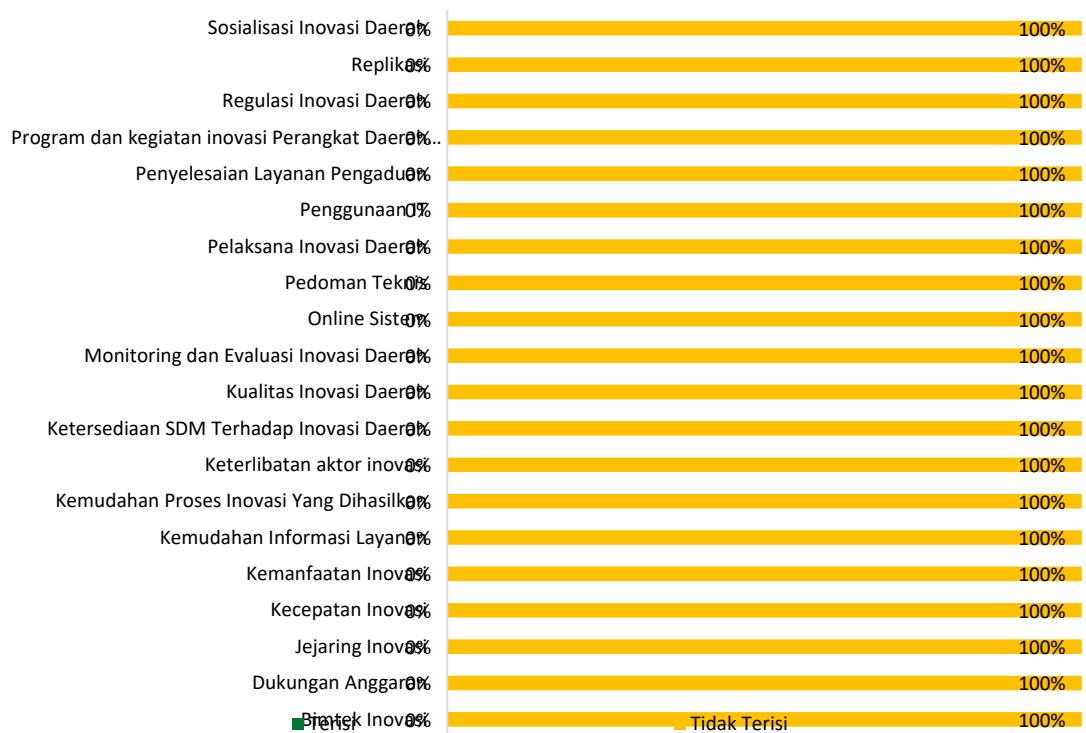
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 42. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Kutai Timur

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan inovasinya, seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Kutai Timur memiliki skor kematangan yang rendah. Sementara itu, belum terdapat inovasi dengan skor kematangan sedang dan tinggi. Sebagai informasi, skor kematangan tinggi adalah inovasi yang mencapai skor kematangan di bawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

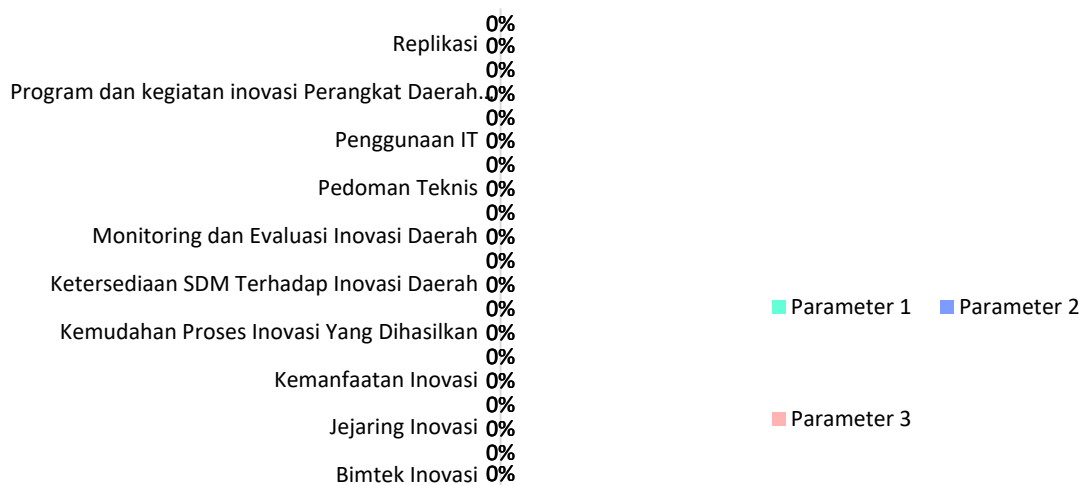
h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 43. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Timur

Dari 2 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Kutai Timur, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 100% sedangkan 0% lainnya telah terisi data pendukung. Dengan kata lain, seluruh indikator dalam satuan inovasi daerah masih belum terisi data pendukung yang diperlukan.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 44. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

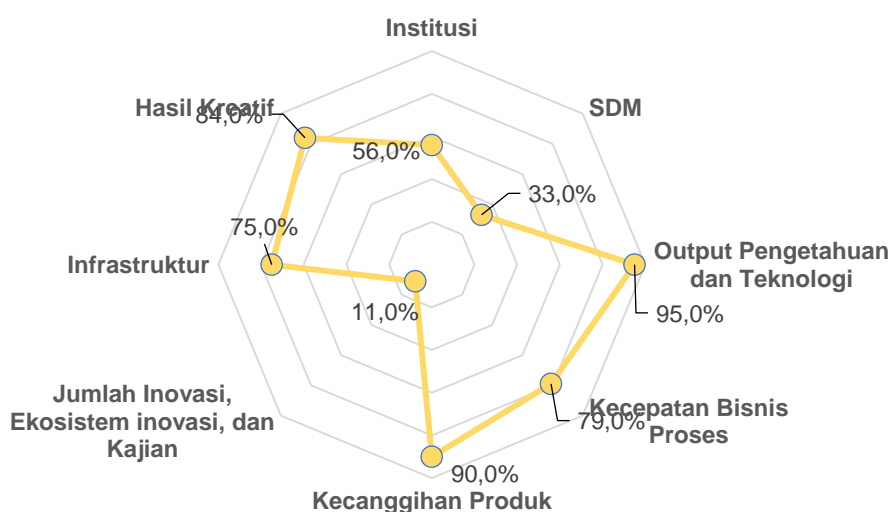
Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung bahwa seluruh indikator masih belum terisi data pendukung yang diperlukan, baik pada parameter 3 (tiga), parameter 2 (dua), maupun parameter 1 (satu).

j. Daftar Inovasi Kabupaten Kutai Timur beserta Skor Kematangannya

Tabel 5. Daftar Inovasi Kabupaten Kutai Timur beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
Alat Cuci Tangan Otomatis	0
Aplikasi My ASPAL	0

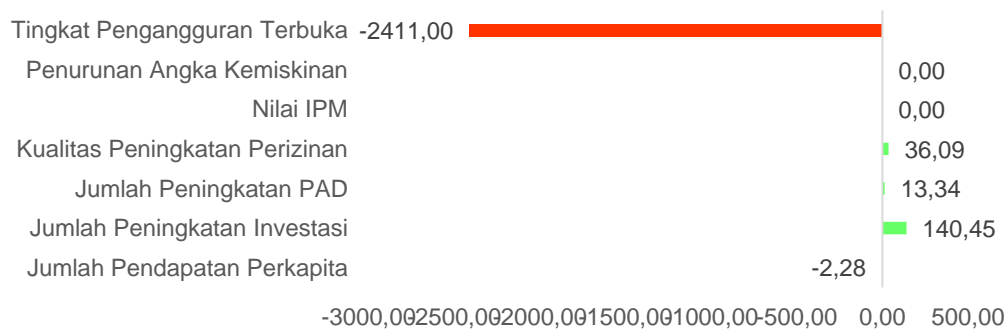
E. KABUPATEN PASER



Gambar 45. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Paser

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Paser memiliki skor tertinggi pada variabel Output Pengetahuan dan Teknologi, yaitu 95,0%. Artinya, secara umum indikator - indikator pada variabel Output Pengetahuan dan Teknologi sudah mencapai skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi, dan Kajian masih rendah, yakni sebesar 11%. Dengan kata lain, secara umum capaian skor indikator - indikator pada variabel tersebut masih rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



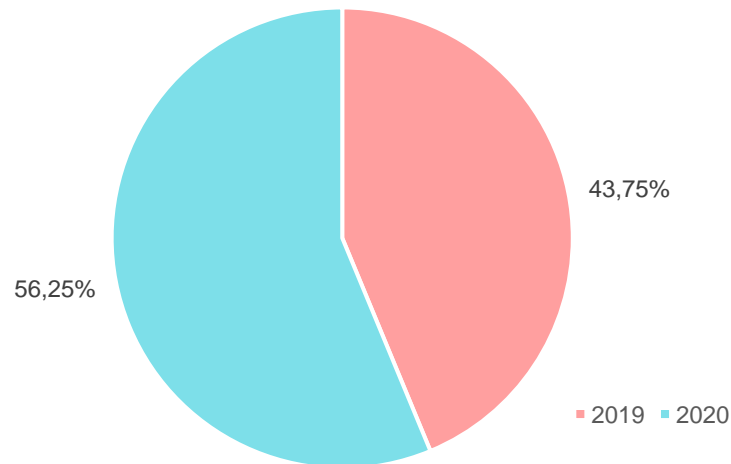
Gambar 46. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Paser

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Paser cukup mengalami perkembangan yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Meskipun demikian, terdapat beberapa penurunan pada beberapa indikator. Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan yang paling signifikan, bahkan melampaui 100%. Hal tersebut menunjukkan bahwa selain capaian yang tidak memenuhi standar nasional parameter indeks inovasi daerah (naik 0,92%), data yang diinput pada indikator tersebut tidak sesuai yang diminta. Selanjutnya, pada indikator Jumlah Pendapatan Perkapita terdapat penurunan sebesar 2,28%. Penurunan ini masih belum sesuai dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah di mana seharusnya hanya turun sebesar 1,85%. Adapun indikator Penurunan Angka Kemiskinan tidak mengalami perubahan, dan capaian tersebut masih belum memenuhi standar nasional parameter indeks inovasi daerah di mana seharusnya turun sebesar 0,02%. Nilai IPM juga tidak mengalami perubahan, namun nilai tersebut sudah sesuai dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah sebesar 0% atau tetap.

Adapun indikator-indikator yang sudah mencapai atau melampaui standar nasional parameter indeks inovasi daerah di antaranya adalah Kualitas Peningkatan Perizinan, Jumlah Peningkatan PAD, dan Jumlah Peningkatan Investasi. Kualitas Peningkatan Perizinan Kabupaten Paser naik sebesar 36,09%, melampaui standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang naik 5%. Selanjutnya, Jumlah Peningkatan PAD terpantau naik 13,34% pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019. Angka tersebut sudah melampaui standar nasional parameter indeks inovasi daerah di mana Jumlah Peningkatan PAD naik sebesar 8%. Terakhir, indikator yang mengalami peningkatan paling signifikan adalah Jumlah Peningkatan Investasi. Jumlah Peningkatan Investasi Kabupaten Paser mengalami peningkatan sebesar 140,45%. Jika dibandingkan dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah, angka tersebut sudah sangat melampaui angka standarnya, dengan peningkatan investasi sebesar 0,45%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

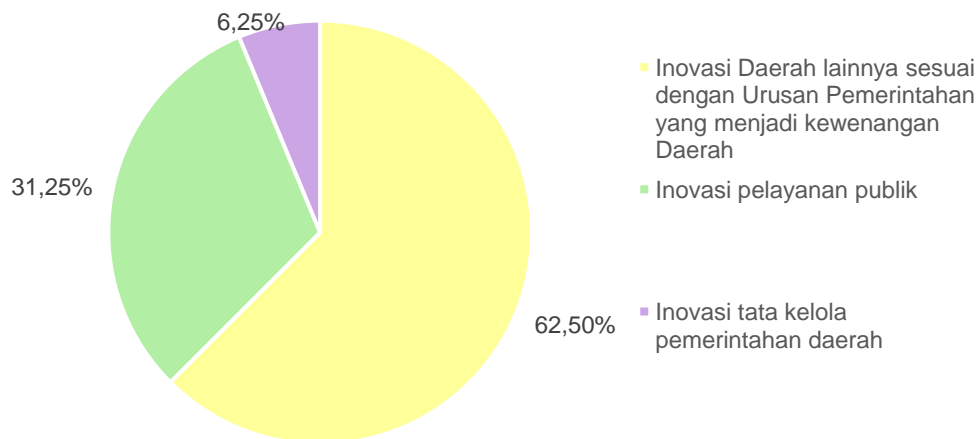
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 47. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Paser

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, mayoritas inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Paser telah diterapkan sejak tahun 2020. Terdapat 9 (56,25%) inovasi dari 16 inovasi yang dilaporkan tersebut diterapkan sejak tahun 2020 dan 7 (43,75%) inovasi lainnya diterapkan sejak tahun 2019.

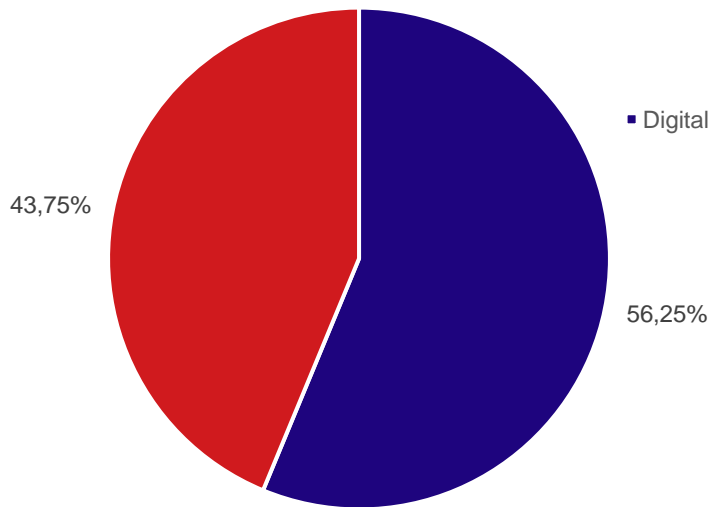
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 48. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Paser

Berdasarkan bentuk inovasi, inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Paser sudah mencakup seluruh jenis inovasi. Sebagian besar inovasi yang dilaporkan adalah inovasi lainnya sejumlah 10 (62,50%) inovasi dari 16 inovasi. Sementara itu, 5 (31,25%) inovasi merupakan inovasi pelayanan publik dan 1 (6,25%) sisanya merupakan inovasi tata kelola pemerintahan daerah.

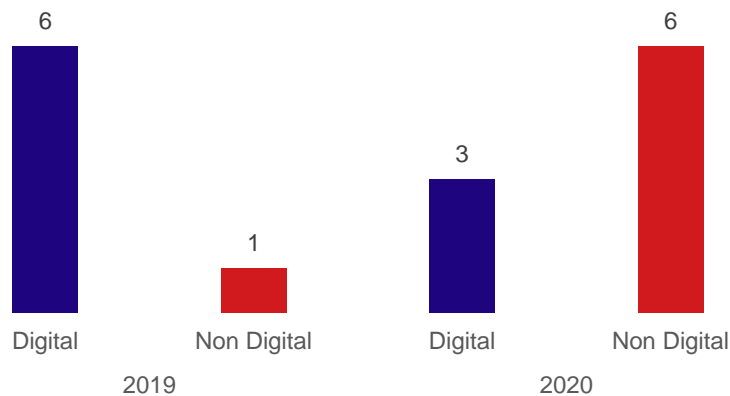
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 49. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Paser

Jika melihat jenis inovasinya, Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 yang dilaporkan oleh Kabupaten Paser terdiri atas Inovasi Digital dan Inovasi Non Digital. Dari 16 inovasi daerah yang dilaporkan Kabupaten Paser, sebagian besar di antaranya merupakan inovasi digital, yaitu sebanyak 9 (56,25%) inovasi. Sementara itu, 7 (43,75%) inovasi sisanya merupakan inovasi non digital.

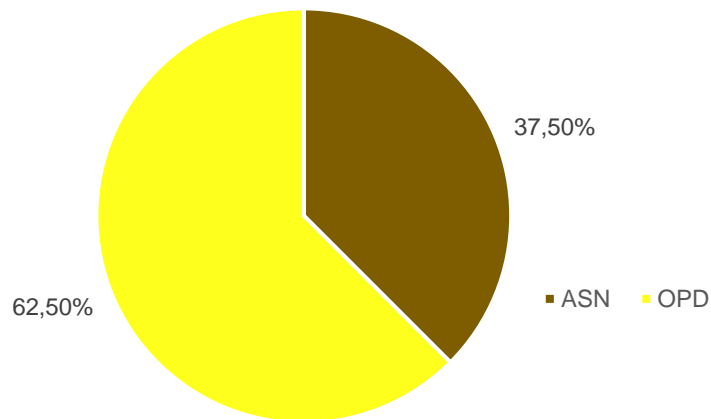
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 50. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Paser

Berdasarkan bagan di atas, inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Paser mengalami perkembangan yang bertolak belakang. Pada tahun 2019, jumlah inovasi digital yang dilaporkan adalah sebanyak 6 inovasi, kemudian menurun menjadi 3 inovasi pada tahun 2020. Sebaliknya, inovasi non digital yang dilaporkan pada tahun 2019 adalah sebanyak 1 inovasi. Pada tahun 2020, jumlah inovasi non digital meningkat menjadi 6 inovasi.

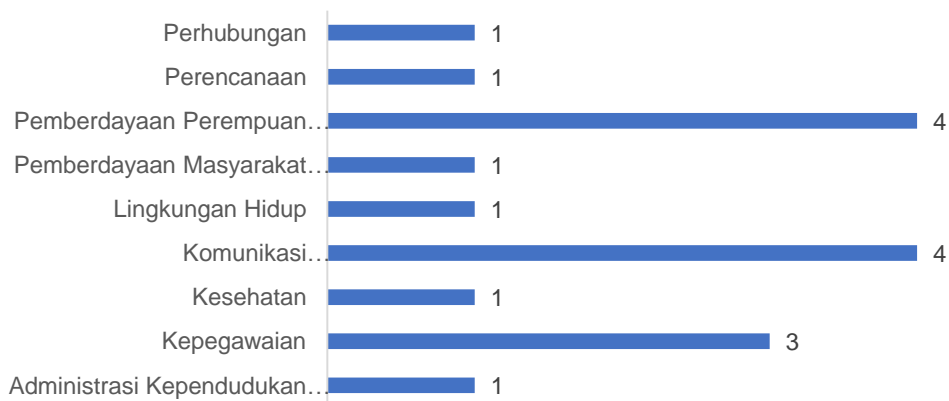
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 51. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Paser

Bagan di atas menunjukkan bahwa inovasi pada Kabupaten Paser diinisiasi oleh dua unsur, di antaranya adalah ASN dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sebagian besar inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Paser pada tahun 2021 diinisiasi oleh OPD, yaitu sejumlah 10 (62,50%) inovasi. Selanjutnya, 6 (37,50%) inovasi sisanya diinisiasi oleh ASN. Untuk inovasi yang diinisiasi oleh Masyarakat, Kepala Daerah, dan DPRD belum dilaporkan di tahun 2021.

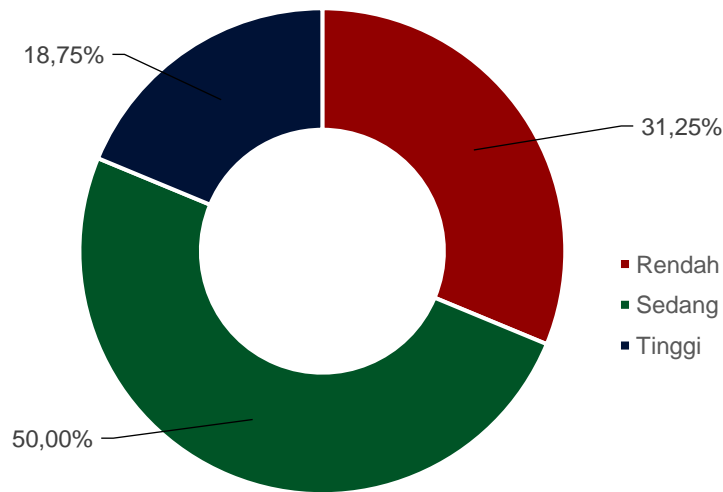
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 52. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Paser

Bagan di atas menunjukkan bahwa inovasi daerah pada Kabupaten Paser tersebar pada 9 urusan berbeda, dan 1 di antaranya merupakan urusan wajib pelayanan dasar. Urusan tersebut adalah urusan Kesehatan, dengan jumlah inovasi sebanyak 1 inovasi. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Komunikasi dan Informatika merupakan urusan dengan jumlah inovasi terbanyak, yaitu sebanyak 4 inovasi pada masing-masing urusan. Selanjutnya, terdapat 3 inovasi yang merupakan urusan Kepegawaian. Sementara itu, 5 urusan sisanya memiliki jumlah inovasi sebanyak 1 inovasi pada masing-masing urusan, yaitu pada urusan Perhubungan, Perencanaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Lingkungan Hidup, serta Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

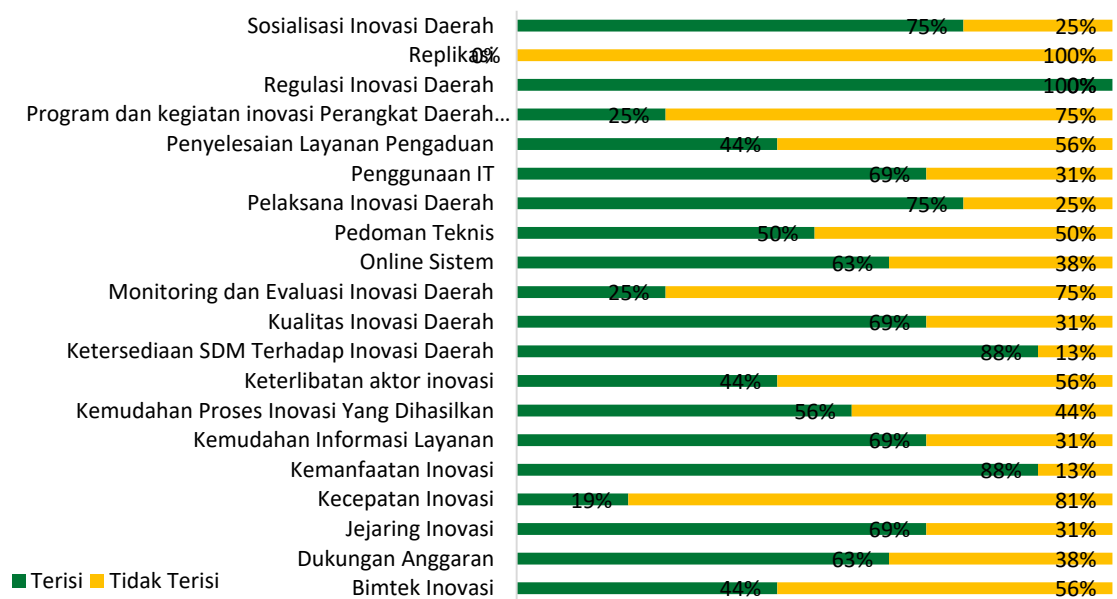
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 53. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Paser

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, seluruh inovasi tersebar pada seluruh tingkat skor kematangan, yang meliputi skor kematangan rendah, sedang, dan tinggi. Dapat dilihat bahwa sebagian besar inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Paser memiliki skor kematangan yang sedang, yakni sebanyak 8 (50,00%) inovasi dari 16 inovasi. Sementara itu, 5 (31,25%) inovasi memiliki skor kematangan rendah dan 3 (18,75%) inovasi sisanya memiliki skor kematangan yang tinggi. Sebagai informasi, skor kematangan tinggi adalah inovasi yang mencapai skor kematangan di bawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

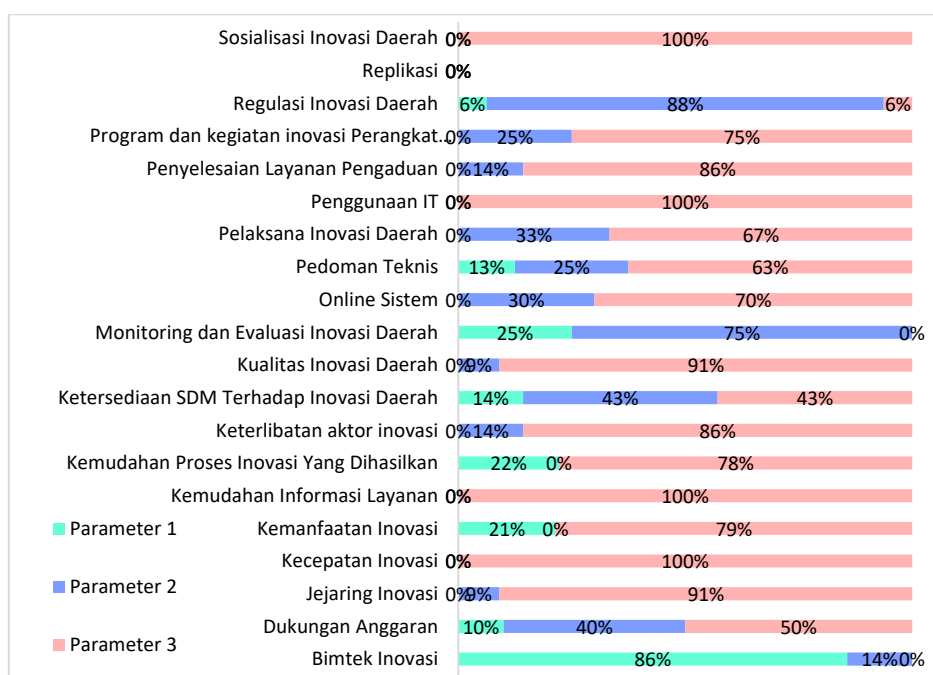
h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 54. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Paser

Dari 16 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Paser, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 43,44% sedangkan 56,56% lainnya telah terisi data pendukung. Dengan kata lain, sebagian besar inovasi yang dilaporkan sudah terisi data-data pendukung yang diperlukan. Adapun indikator dengan tingkat keterisian tertinggi adalah Indikator Regulasi Inovasi Daerah dengan tingkat keterisian 100%. Artinya, seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Paser telah terisi data pendukung pada indikator tersebut. Di sisi lain, indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah adalah indikator replikasi yaitu sebesar 0%. Dengan kata lain, belum ada inovasi terlapor yang telah terisi data pendukung dari indikator tersebut.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 55. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

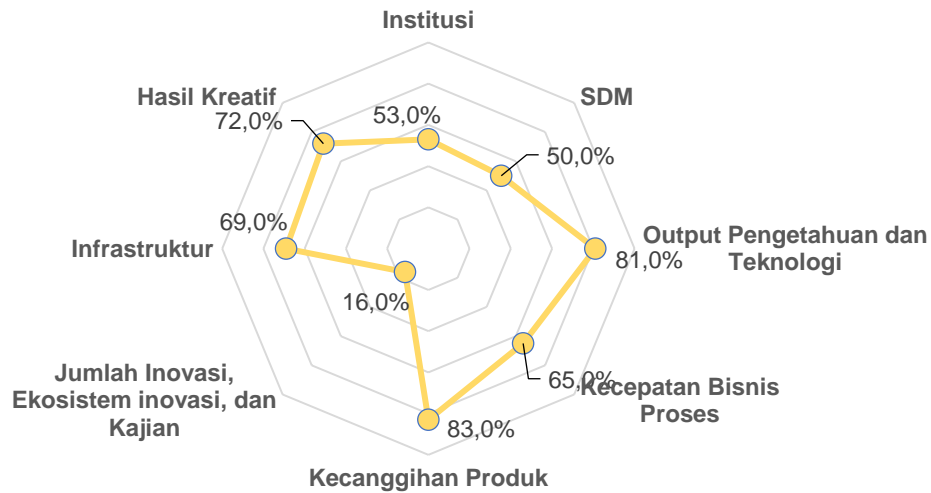
Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah Sosialisasi Inovasi Daerah, Penggunaan IT, Kemudahan Informasi Layanan, dan Kecepatan Inovasi, yaitu sebesar 100%. Hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator-indikator tersebut masuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Regulasi Inovasi Daerah sebesar 88%. Dengan kata lain, 88% inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Bimtek Inovasi yakni sebesar 86%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa 86% inovasi telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk indikator tersebut.

j. Daftar Inovasi Kabupaten Paser beserta Skor Kematangannya

Tabel 6. Daftar Inovasi Kabupaten Paser beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
Klinik Konseling PPRG	0
Elektronik Kenaikan Gaji Berkala (E-KGB)	97
Sistem Informasi Administrasi Penilaian Kinerja ASN (SIAPKERJA)	103
Sistem Informasi ASN Berbasis Elektronik (SICABE)	83
SATE PUAN (Satu Desa Satu Usaha Perempuan)	44
ASAM PUTAR (Aspirasi Perempuan Dalam Pembangunan Daerah)	44
GEMAR UDANG (Gerakan Penanaman Gender Sejak Usia Dini Melalui Dongeng)	35
Metode Pengolahan dan Lomba Produk Unggulan Khas Desa	27
Antrian Capil	72
E-Kecamatan (Elektronik Kecamatan)	91
E-Rumah Sakit (Pelayanan secara Elektronik Rumah Sakit)	90
SiPaPah GanTeNg (Sistem Pengaduan Sampah dan Gangguan tentang Lingkungan)	113
Sistem Aplikasi Pengelolaan Perlengkapan Jalan (SIPANJA)	96
SILANTIH (Pelayanan Isbat Nikah)	90
Pengelolaan Data Pembangunan Berbasis SIDDA (Sistem Informasi Daerah Dalam Angka)	100
Peningkatan Pengelolaan Media Center Sebagai Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	97

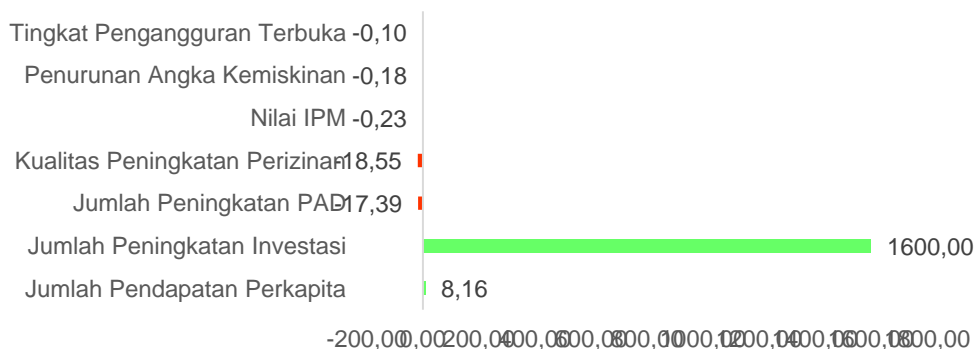
F. KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA



Gambar 56. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Penajam Paser Utara

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki skor tertinggi pada variabel Output Pengetahuan dan Teknologi, yaitu 81,0%. Artinya, secara umum indikator - indikator pada variabel Output Pengetahuan dan Teknologi sudah mencapai skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi, dan Kajian masih rendah, yakni sebesar 16%. Dengan kata lain, secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



Gambar 57. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Penajam Paser Utara

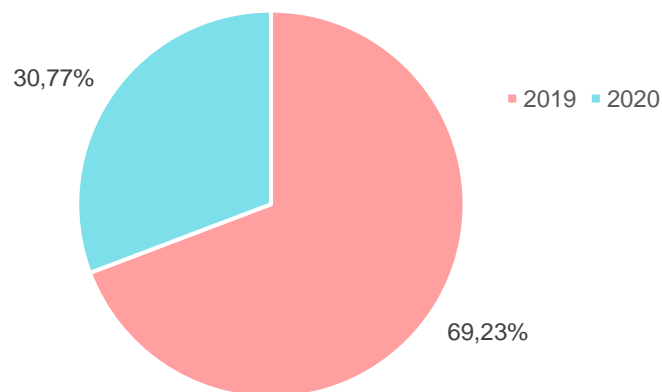
Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Penajam Paser Utara belum mengalami perkembangan yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal tersebut ditunjukkan dengan sebagian besar indikator yang

mengalami penurunan. Sebagai contoh, Penurunan Angka Kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,18%. Dengan kata lain, angka kemiskinan meningkat 0,18% dibandingkan periode sebelumnya. Capaian tersebut masih belum memenuhi standar nasional parameter indeks inovasi daerah di mana seharusnya turun sebesar 0,02%. Selanjutnya, nilai IPM juga mengalami penurunan sebesar 0,23%, dan masih belum sesuai dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah sebesar 0% atau tetap. Adapun Jumlah Peningkatan PAD menurun sebesar 17,39%, di mana nilai tersebut berada di bawah standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang naik 8%. Kualitas Peningkatan Perizinan mengalami penurunan yang paling signifikan, yakni sebesar 18,55%, cukup jauh di bawah standar nasional parameter indeks inovasi daerah di mana Kualitas Peningkatan Perizinan naik sebesar 5%.

Adapun indikator-indikator yang sudah mencapai atau melampaui standar nasional parameter indeks inovasi daerah di antaranya adalah Jumlah Pendapatan Perkapita, Jumlah Peningkatan Investasi, dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Jumlah Pendapatan Perkapita Kabupaten Penajam Paser Utara naik sebesar 8,16%, melampaui standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang turun 1,85%. Selanjutnya, Jumlah Peningkatan Investasi Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami peningkatan yang paling signifikan, yakni sebesar 1600%. Jika dibandingkan dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah, angka tersebut sudah sangat melampaui angka standarnya, dengan peningkatan investasi sebesar 0,45%. Terakhir, Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan sebesar 0,10%. Dengan kata lain, jumlah pengangguran terbuka pada tahun 2020 meningkat sebanyak 0,10% dibandingkan tahun 2019. Meskipun demikian, peningkatan tersebut sudah mencapai standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang naik sebesar 0,92%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

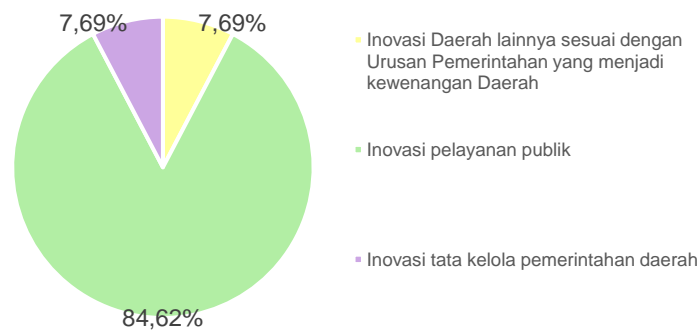
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 58. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Penajam Paser Utara

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, mayoritas inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Penajam Paser Utara telah diterapkan sejak tahun 2019. Terdapat 9 (69,23%) inovasi dari 13 inovasi yang dilaporkan tersebut diterapkan sejak tahun 2019 dan 4 (30,77%) inovasi lainnya diterapkan sejak tahun 2020.

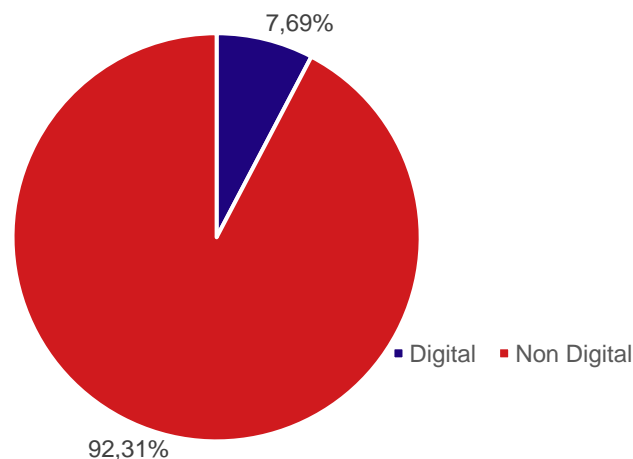
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 59. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Penajam Paser Utara

Berdasarkan bentuk inovasi, inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Penajam Paser Utara sudah mencakup seluruh jenis inovasi. Sebagian besar inovasi yang terlapor adalah inovasi pelayanan publik, yakni sejumlah 11 (84,62%) inovasi dari 13 inovasi. Sementara itu, 2 inovasi sisanya merupakan inovasi tata kelola pemerintahan daerah dan inovasi lainnya, dengan jumlah inovasi pada masing-masing inovasi sebanyak 1 (7,69%) inovasi.

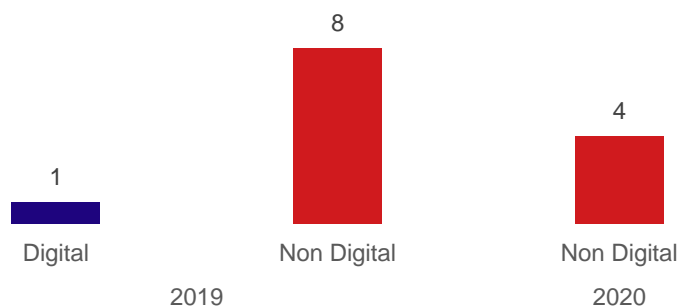
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 60. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Penajam Paser Utara

Jika melihat jenis inovasinya, Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 yang dilaporkan oleh Kabupaten Penajam Paser Utara terdiri atas Inovasi Digital dan Inovasi Non Digital. Dari 13 inovasi daerah yang dilaporkan Kabupaten Penajam Paser Utara, sebagian besar di antaranya merupakan inovasi non digital, yaitu sebanyak 12 (92,31%) inovasi. Sementara itu, 1 (7,69%) inovasi sisanya merupakan inovasi digital dan tidak ada yang termasuk dalam inovasi teknologi.

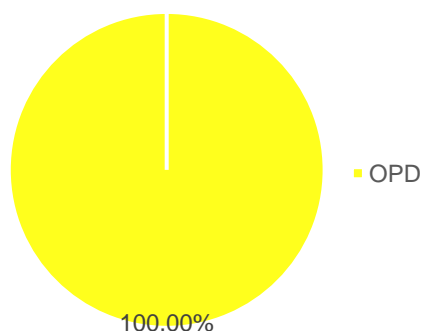
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 61. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Penajam Paser Utara

Berdasarkan bagan di atas, inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2019 terdiri atas 1 inovasi digital dan 8 inovasi non digital. Selanjutnya, pada tahun 2020 terdapat 4 inovasi non digital dan tidak terdapat inovasi digital yang dilaporkan. Selain itu, inovasi teknologi tidak dilaporkan pada kedua tahun tersebut.

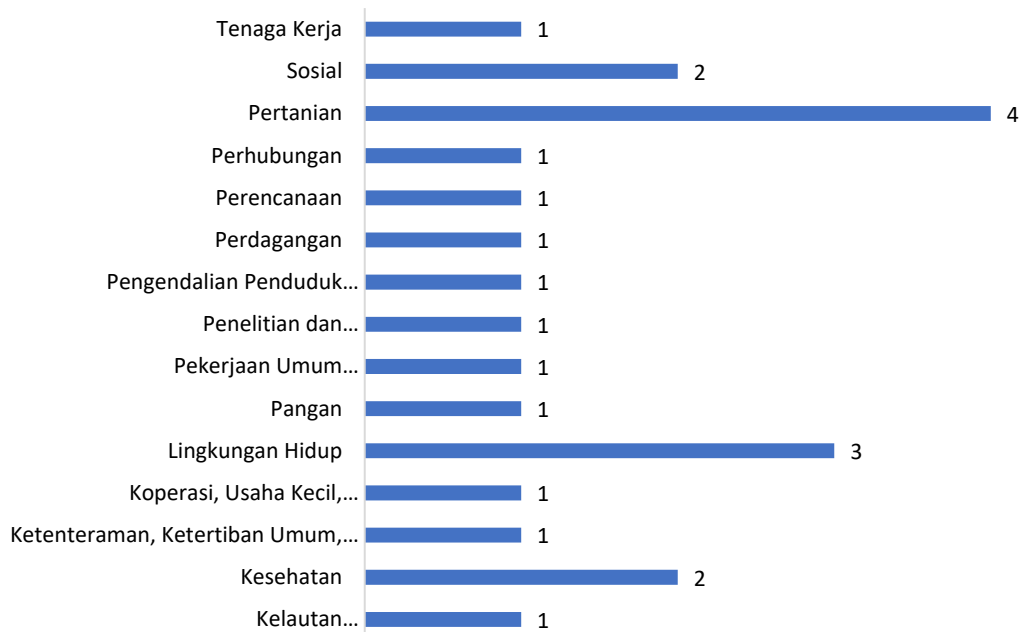
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 62. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Penajam Paser Utara

Bagan di atas menunjukkan bahwa seluruh inovasi pada Kabupaten Penajam Paser Utara diinisiasi oleh satu unsur, yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dengan kata lain, 13 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2021 diinisiasi oleh OPD. Untuk inovasi yang diinisiasi oleh ASN, Masyarakat, Kepala Daerah, dan DPRD belum dilaporkan di tahun 2021.

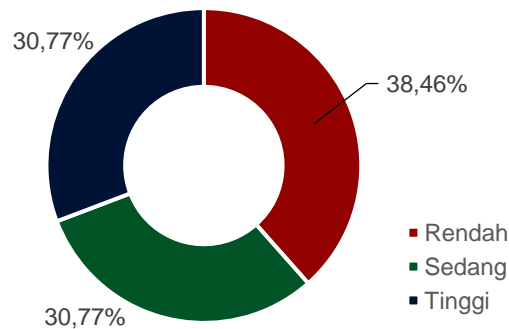
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 63. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Penajam Paser Utara

Bagan di atas menunjukkan bahwa inovasi daerah pada Kabupaten Penajam Paser Utara tersebar pada beberapa urusan berbeda, dan 4 di antaranya merupakan urusan wajib pelayanan dasar. Urusan tersebut adalah urusan Sosial, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat serta Kesehatan. Urusan Sosial dan Kesehatan memiliki jumlah inovasi sebanyak masing-masing 2 inovasi, dan masing-masing 1 inovasi terdapat pada urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat serta Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Adapun urusan Pertanian merupakan urusan dengan jumlah inovasi terbanyak, yaitu sebanyak 4 inovasi. Selanjutnya, terdapat 3 inovasi yang merupakan urusan Lingkungan Hidup. Sementara itu, 10 urusan memiliki jumlah inovasi sebanyak 1 inovasi pada masing-masing urusan, yaitu pada urusan Tenaga Kerja, Perhubungan, Perencanaan, Perdagangan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana, Penelitian dan Pengembangan, Pangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Kelautan dan Perikanan.

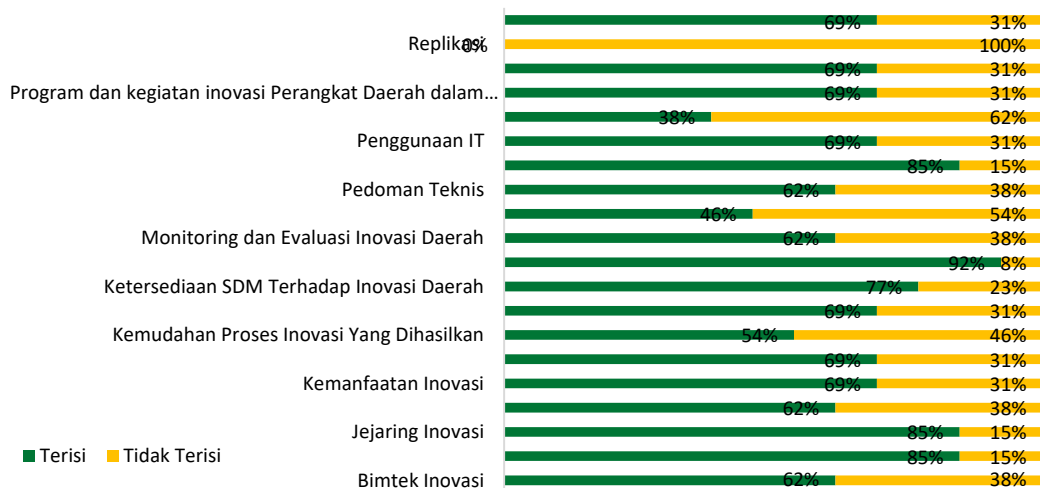
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 64. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Penajam Paser Utara

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, seluruh inovasi tersebar pada seluruh tingkat skor kematangan, yang meliputi skor kematangan rendah, sedang, dan tinggi. Dapat dilihat bahwa sebagian besar inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki skor kematangan yang rendah, yakni sebanyak 5 (38,46%) inovasi dari 13 inovasi. Sementara itu, 4 (30,77%) inovasi memiliki skor kematangan sedang dan 4 (30,77%) inovasi sisanya memiliki skor kematangan yang tinggi. Sebagai informasi, skor kematangan tinggi adalah inovasi yang mencapai skor kematangan di bawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

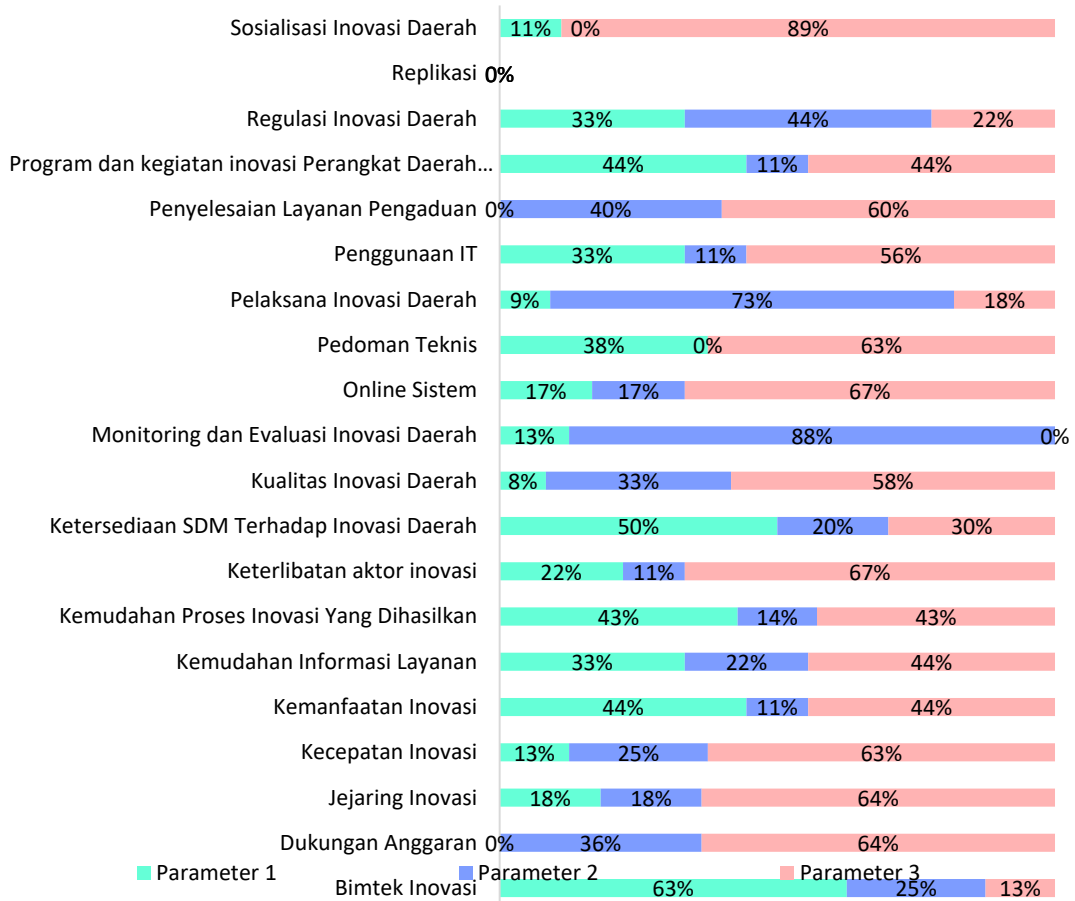


Gambar 65. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

Dari 13 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Penajam Paser Utara, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 35,38% sedangkan 64,62% lainnya telah terisi data pendukung. Dengan kata lain, sebagian besar inovasi yang dilaporkan sudah terisi data-data pendukung yang diperlukan.

Adapun indikator dengan tingkat keterisian tertinggi adalah Indikator Kualitas Inovasi Daerah dengan tingkat keterisian 92%. Artinya, hampir seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Penajam Paser Utara telah terisi data pendukung pada indikator tersebut. Di sisi lain, indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah adalah indikator Replikasi yaitu sebesar 0%. Dengan kata lain, belum ada inovasi terlapor yang telah terisi data pendukung dari indikator tersebut.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 66. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

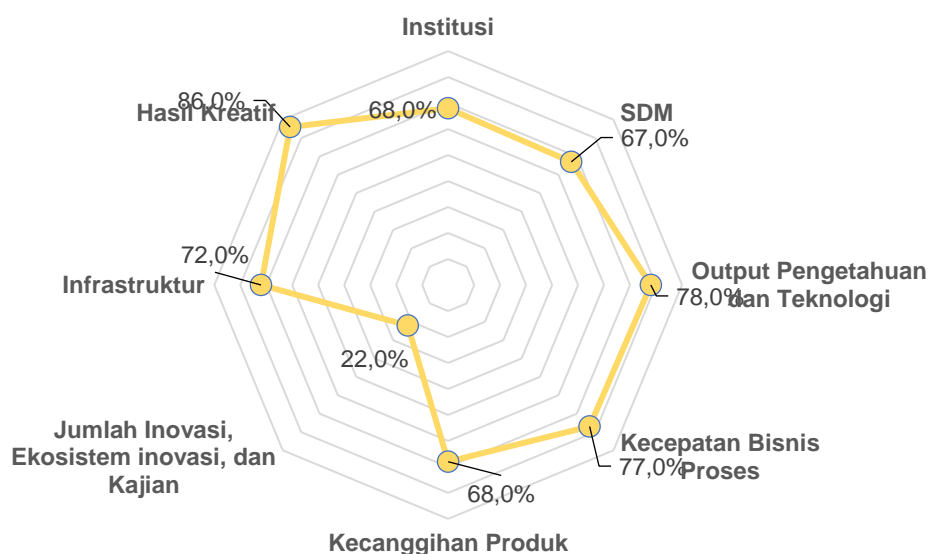
Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah Sosialisasi Inovasi Daerah, yaitu sebesar 89%. Hal tersebut menunjukkan bahwa 89% inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut masuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah sebesar 88%. Dengan kata lain, 88% inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Bimtek Inovasi yakni sebesar 63%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa 63% inovasi telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk indikator tersebut.

j. Daftar Inovasi Kabupaten Penajam Paser Utara beserta Skor Kematangannya

Tabel 7. Daftar Inovasi Kabupaten Penajam Paser Utara beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
Penanganan Transportasi Terpadu Covid-19	0
Inovasi Protokol Covid-19 di Pasar Induk Penajam	15
PEMUTUSAN JAMSOSKES PBI BAGI KARYAWAN PERUSAHAAN	32
MIRA KANSIL (Mini Ranch Tingkatkan Hasil)	98
SAHABAT LAMAA (sejahtera berkat layanan sampah mobile amanah)	104
Research and Development Center (RDC)	55
SERBU GASS (Seratus Bank Sampah Unit dan Gerakan Sedekah Sampah)	111
SIPELUNAK (Integrasi Pelaku Usaha Peternakan)	96
LAYANAN SETIA (SEDOT TINJA ANDA)	78
PERI SABUN ANDALAN (Perawatan Induk Sapi Bunting dan Anak Dua Bulan)	130
PERI SABUN ANDALAN (Perawatan Induk Sapi Bunting dan Anak Dua Bulan)	130
Kembang Paser (Kecamatan Membangun Embung Petani Sejahtera)	22
Percepatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Melalui Desa Gender Dan Anak (CETAR PUAN DESGENAK)	28
Penanganan Transportasi Terpadu Covid-19	0
Inovasi Protokol Covid-19 di Pasar Induk Penajam	15
PEMUTUSAN JAMSOSKES PBI BAGI KARYAWAN PERUSAHAAN	32
MIRA KANSIL (Mini Ranch Tingkatkan Hasil)	98
SAHABAT LAMAA (sejahtera berkat layanan sampah mobile amanah)	104
Research and Development Center (RDC)	55
SERBU GASS (Seratus Bank Sampah Unit dan Gerakan Sedekah Sampah)	111
SIPELUNAK (Integrasi Pelaku Usaha Peternakan)	96
LAYANAN SETIA (SEDOT TINJA ANDA)	78
PERI SABUN ANDALAN (Perawatan Induk Sapi Bunting dan Anak Dua Bulan)	130

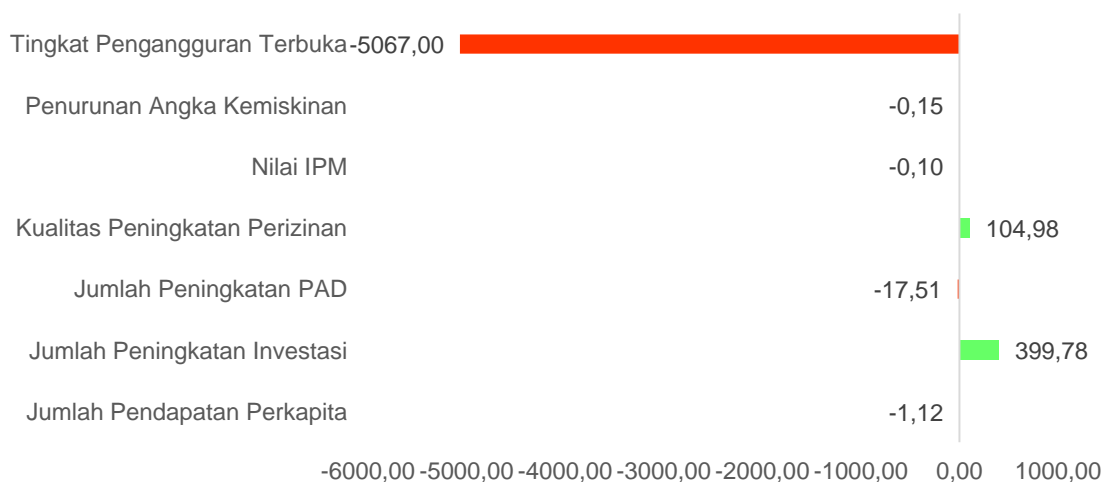
G. KOTA BALIKPAPAN



Gambar 67. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kota Balikpapan

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kota Balikpapan memiliki skor tertinggi pada variabel Hasil Kreatif, yaitu 85,0%. Artinya, secara umum indikator - indikator pada variabel Hasil Kreatif sudah mencapai skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi, dan Kajian masih cukup rendah, yakni sebesar 22%. Dengan kata lain, secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



Gambar 68. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Balikpapan

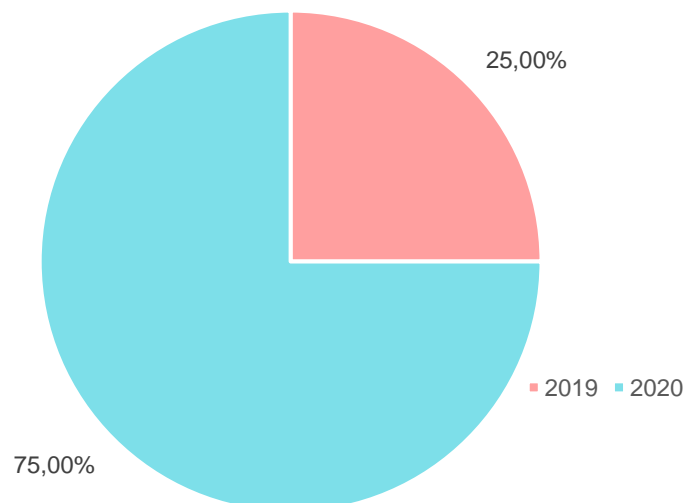
Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah

Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Balikpapan belum mengalami perkembangan yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal tersebut ditunjukkan dengan sebagian besar indikator yang mengalami penurunan. Sebagai contoh, Penurunan Angka Kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,15%. Dengan kata lain, angka kemiskinan meningkat 0,15% dibandingkan periode sebelumnya. Capaian tersebut masih belum memenuhi standar nasional parameter indeks inovasi daerah di mana seharusnya turun sebesar 0,02%. Selanjutnya, nilai IPM juga mengalami penurunan sebesar 0,10%, dan masih belum sesuai dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah sebesar 0% atau tetap. Adapun Jumlah Peningkatan PAD menurun sebesar 17,51%, di mana nilai tersebut berada di bawah standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang naik 8%. Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan yang paling signifikan, bahkan melebihi 100%. Selain capaian yang tidak memenuhi standar nasional parameter indeks inovasi daerah (naik 0,92%), data yang diinput tidak sesuai dengan yang diminta.

Adapun indikator-indikator yang sudah mencapai atau melampaui standar nasional parameter indeks inovasi daerah di antaranya adalah Kualitas Peningkatan Perizinan, Jumlah Pendapatan Perkapita, dan Jumlah Peningkatan Investasi. Meskipun Jumlah Pendapatan Perkapita Kota Balikpapan turun sebesar 1,12%, namun capaian tersebut telah melampaui standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang turun 1,85%. Selanjutnya, Kualitas Peningkatan Perizinan mengalami peningkatan sebesar 104,98%, jauh di atas standar nasional parameter indeks inovasi daerah di mana Kualitas Peningkatan Perizinan naik 5%. Terakhir, Jumlah Peningkatan Investasi Kota Balikpapan mengalami peningkatan yang paling signifikan, yakni sebesar 399,78%. Jika dibandingkan dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah, angka tersebut sudah sangat melampaui standarnya, dengan peningkatan investasi sebesar 0,45%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

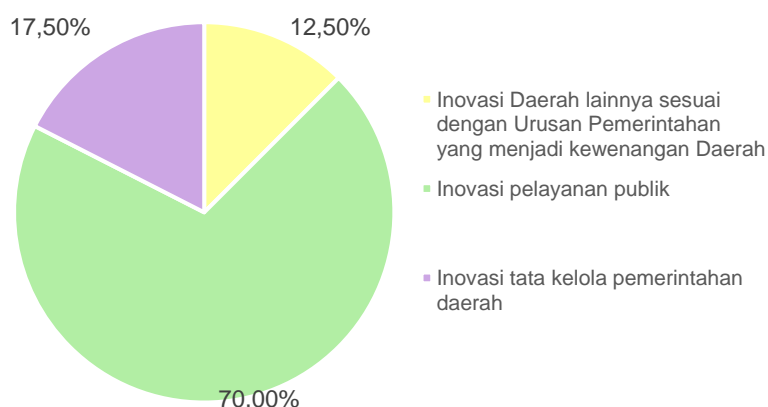
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 69. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kota Balikpapan

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, mayoritas inovasi yang dilaporkan oleh Kota Balikpapan telah diterapkan sejak tahun 2020. Terdapat 30 (75,00%) inovasi dari 40 inovasi yang dilaporkan tersebut diterapkan sejak tahun 2020 dan 10 (25,00%) inovasi lainnya diterapkan sejak tahun 2019.

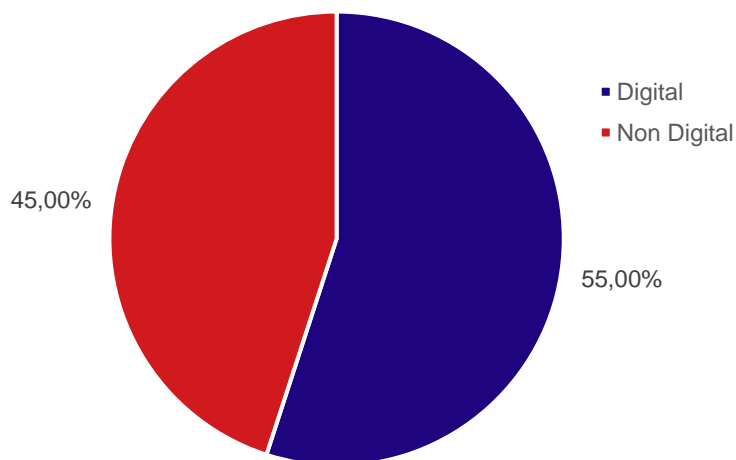
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 70. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kota Balikpapan

Berdasarkan bentuk inovasi, inovasi yang dilaporkan oleh Kota Balikpapan sudah mencakup seluruh jenis inovasi. Sebagian besar inovasi yang terlapor adalah inovasi pelayanan publik, yakni sejumlah 28 (70,00%) inovasi dari 40 inovasi. Sementara itu, 7 (17,50%) inovasi merupakan inovasi tata kelola pemerintahan daerah dan 5 (12,50%) sisanya merupakan inovasi lainnya.

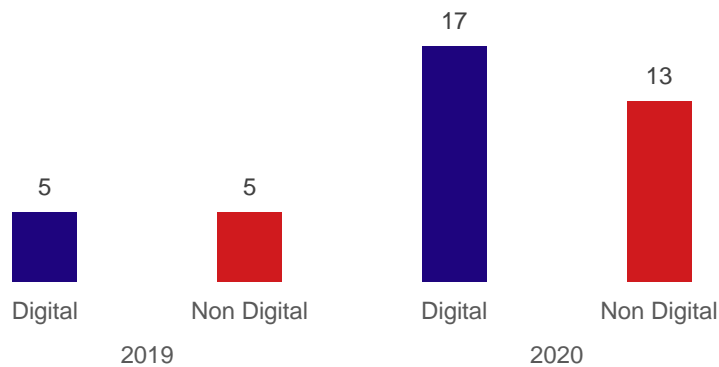
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 71. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kota Balikpapan

Jika melihat jenis inovasinya, Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 yang dilaporkan oleh Kota Balikpapan terdiri atas Inovasi Digital dan Inovasi Non Digital. Dari 40 inovasi daerah yang dilaporkan Kota Balikpapan, sebagian besar di antaranya merupakan inovasi digital, yaitu sebanyak 22 (55,00%) inovasi. Sementara itu, 18 (45,00%) inovasi sisanya merupakan inovasi non digital dan tidak ada yang termasuk dalam inovasi teknologi.

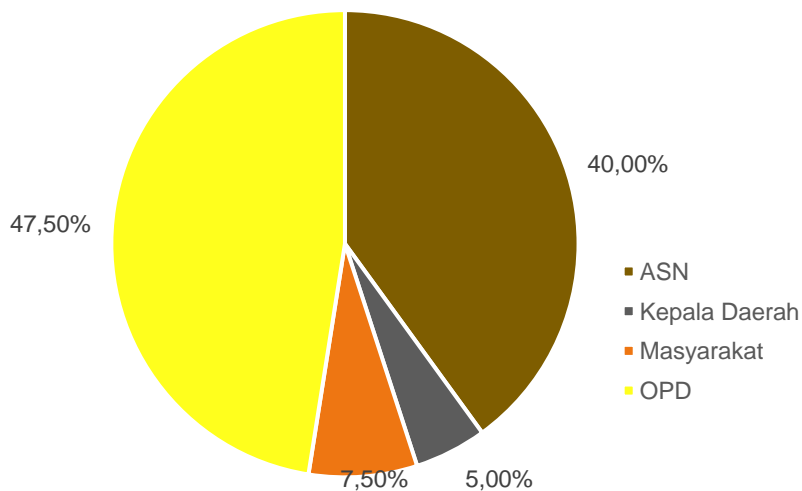
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 72. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kota Balikpapan

Berdasarkan bagan di atas, inovasi yang dilaporkan oleh Kota Balikpapan pada tahun 2019 terdiri atas 5 inovasi digital dan 5 inovasi non digital. Selanjutnya, pada tahun 2020 terdapat peningkatan jumlah inovasi, di mana terdapat 17 inovasi digital dan 13 inovasi non digital. Selain itu, inovasi teknologi tidak dilaporkan pada kedua tahun tersebut.

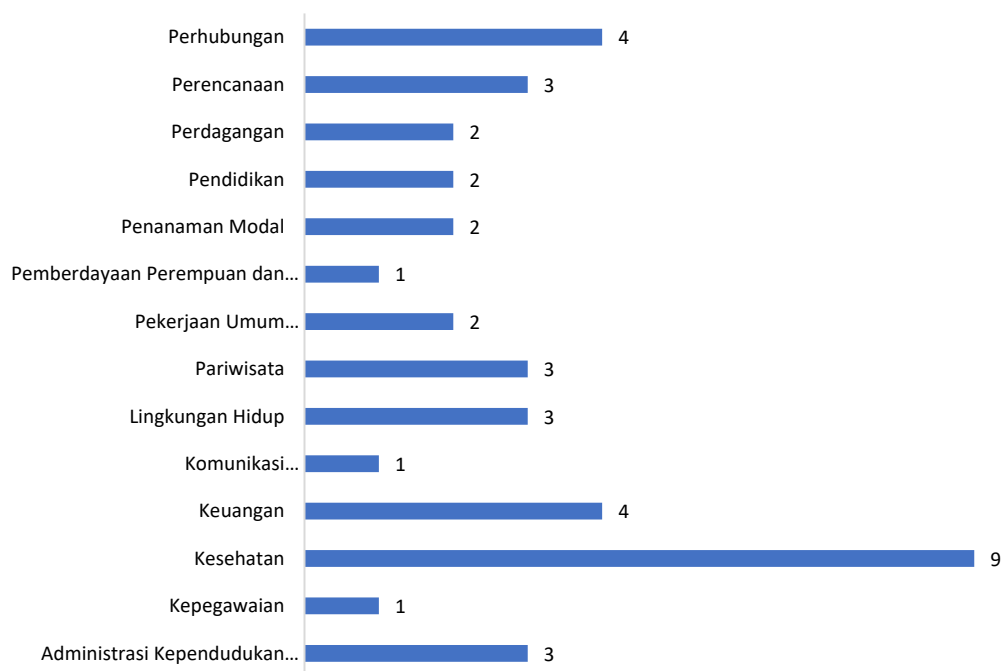
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 73. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kota Balikpapan

Bagan di atas menunjukkan bahwa seluruh inovasi pada Kota Balikpapan diinisiasi oleh empat unsur, yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala Daerah, ASN, dan Masyarakat. Sebagian besar inovasi yang dilaporkan oleh Kota Balikpapan pada tahun 2021 diinisiasi oleh OPD, yaitu sebanyak 19 (47,50%) inovasi. Sementara itu, sebanyak 16 (40,00%) inovasi diinisiasi oleh ASN, 3 (7,50%) inovasi diinisiasi oleh Masyarakat, dan 2 (5,00%) inovasi sisanya diinisiasi oleh Kepala Daerah. Untuk inovasi yang diinisiasi oleh DPRD belum dilaporkan di tahun 2021.

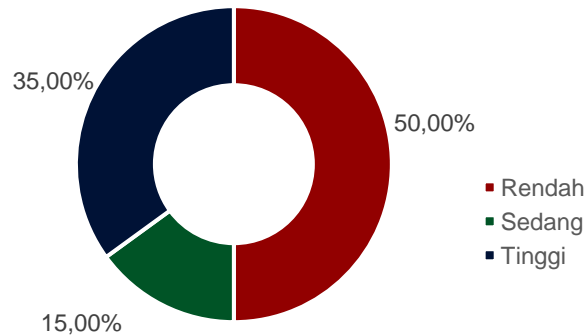
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 74. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kota Balikpapan

Bagan di atas menunjukkan bahwa inovasi daerah pada Kota Balikpapan tersebar pada beberapa urusan berbeda, dan 3 di antaranya merupakan urusan wajib pelayanan dasar. Urusan tersebut adalah urusan Pendidikan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Kesehatan. Urusan Kesehatan merupakan urusan dengan jumlah inovasi terbanyak, yakni sebanyak 9 inovasi. Sementara itu, urusan Pendidikan serta Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki jumlah inovasi sebanyak masing-masing 2 inovasi. Adapun urusan Perhubungan dan Keuangan memiliki jumlah inovasi masing-masing sebanyak 4 inovasi. Selanjutnya, terdapat masing-masing 3 inovasi yang merupakan urusan Perencanaan, Pariwisata, Lingkungan Hidup, serta Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Adapun urusan Perdagangan dan Penanaman Modal memiliki jumlah inovasi yang sama, yaitu 2 inovasi. Sementara itu, 3 urusan memiliki jumlah inovasi sebanyak 1 inovasi pada masing-masing urusan, yaitu pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komunikasi dan Informatika, serta Kepegawaian.

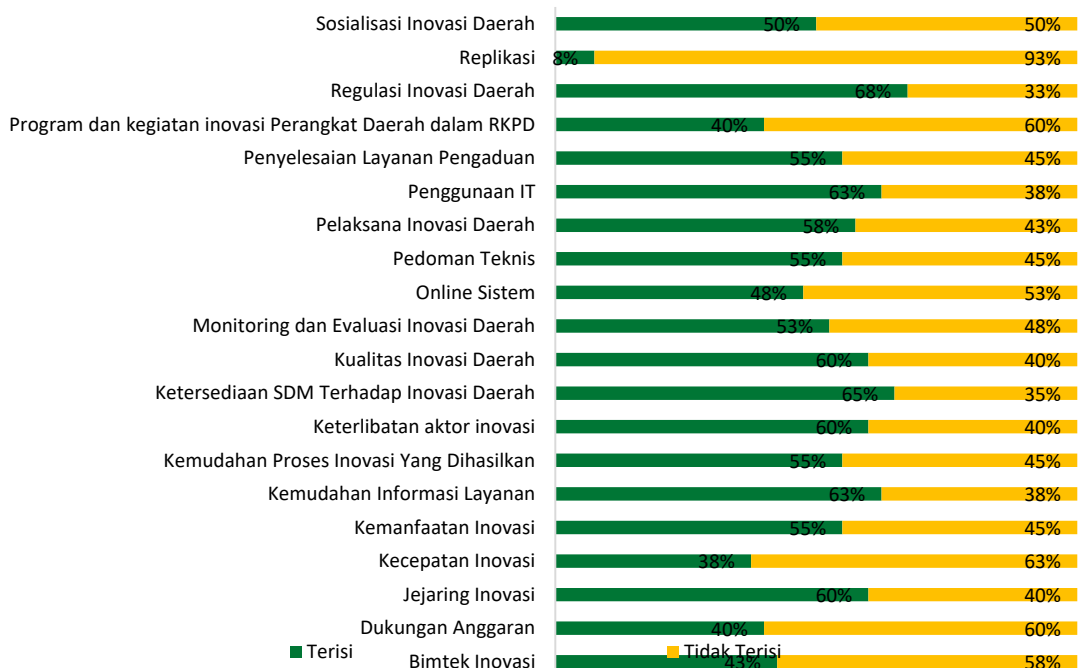
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 75. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kota Balikpapan

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, seluruh inovasi tersebar pada seluruh tingkat skor kematangan, yang meliputi skor kematangan rendah, sedang, dan tinggi. Dapat dilihat bahwa sebagian besar inovasi yang dilaporkan oleh Kota Balikpapan memiliki skor kematangan yang rendah, yakni sebanyak 20 (50,00%) inovasi dari 40 inovasi. Sementara itu, 14 (35,00%) inovasi memiliki skor kematangan tinggi dan 6 (15,00%) inovasi sisanya memiliki skor kematangan yang sedang. Sebagai informasi, skor kematangan tinggi adalah inovasi yang mencapai skor kematangan di bawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

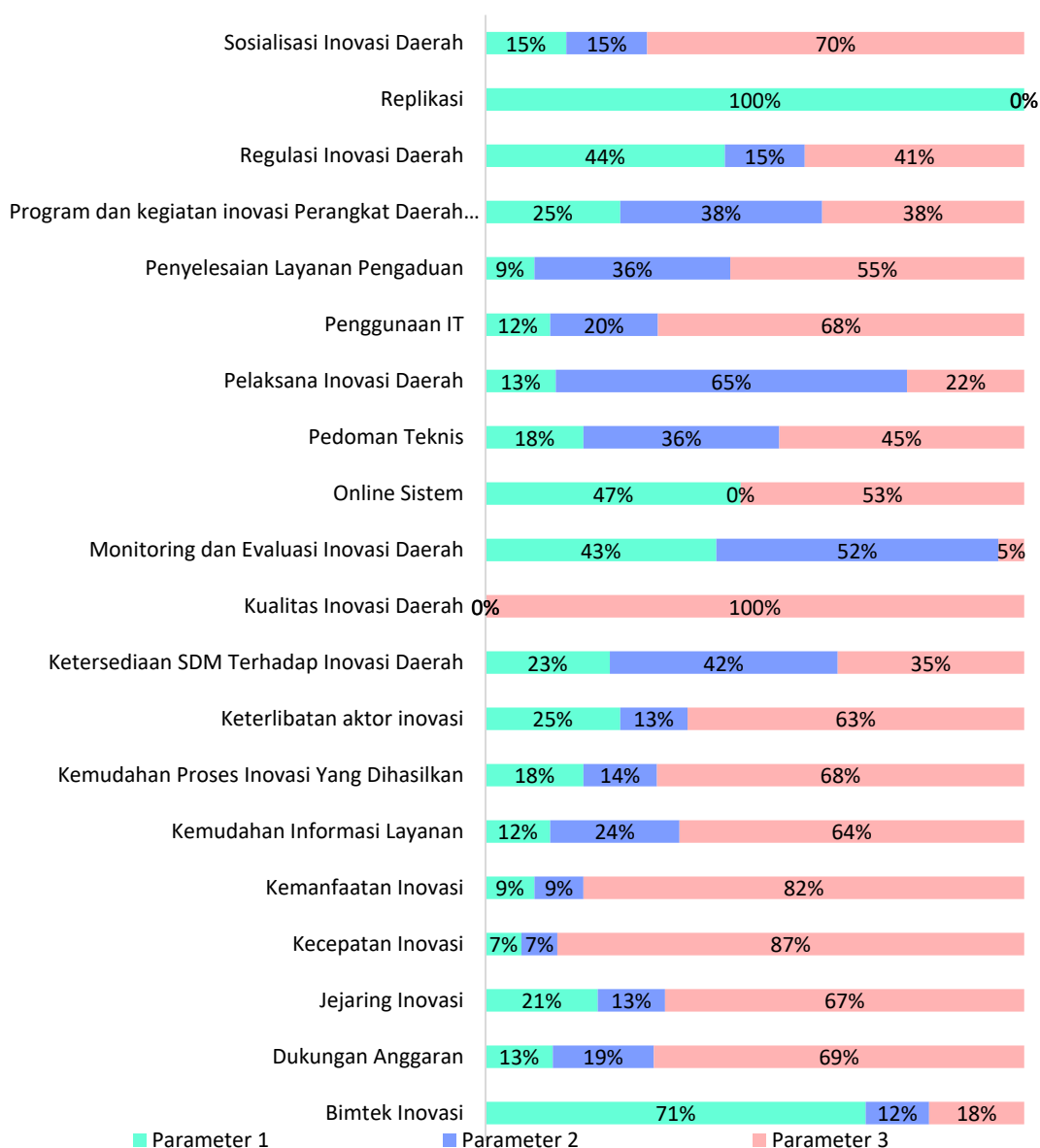
h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 76. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kota Balikpapan

Dari 40 inovasi yang dilaporkan oleh Kota Balikpapan, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 48,38% sedangkan 51,63% lainnya telah terisi data pendukung. Dengan kata lain, sebagian besar inovasi yang dilaporkan sudah terisi data-data pendukung yang diperlukan. Adapun indikator dengan tingkat keterisian tertinggi adalah Indikator Regulasi Inovasi Daerah dengan tingkat keterisian 68%. Artinya, 68% inovasi yang dilaporkan oleh Kota Balikpapan telah terisi data pendukung pada indikator tersebut. Di sisi lain, indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah adalah indikator Replikasi yaitu sebesar 8%. Dengan kata lain, masih terdapat 8% inovasi terlapor yang telah terisi data pendukung dari indikator tersebut.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 77. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah Kualitas Inovasi Daerah, yaitu sebesar 100%. Hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut masuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Pelaksana Inovasi Daerah sebesar 65%. Dengan kata lain, 65% inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Replikasi yakni sebesar 100%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa seluruh inovasi telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk indikator tersebut.

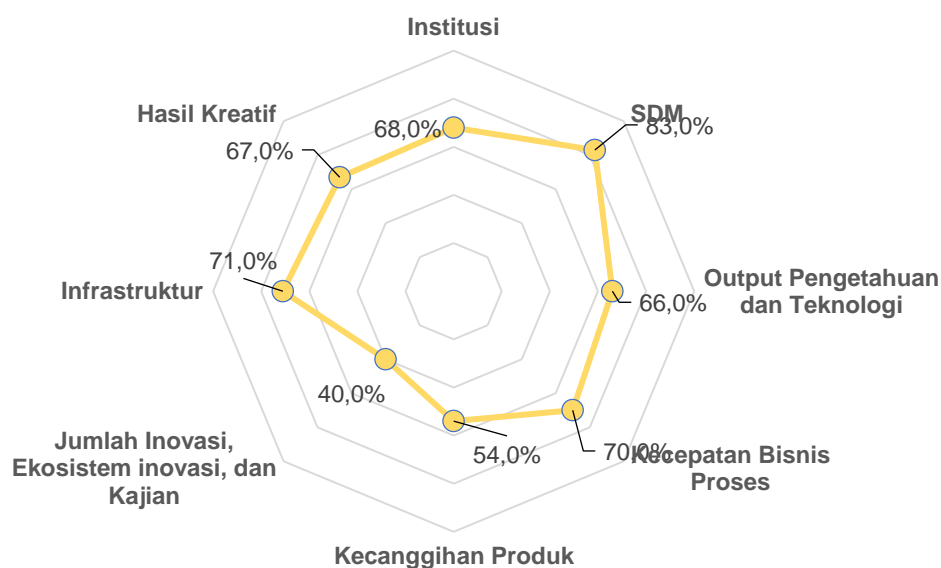
j. Daftar Inovasi Kota Balikpapan beserta Skor Kematangannya

Tabel 8. Daftar Inovasi Kota Balikpapan beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
TATANAN NEW NORMAL KAWASAN WISATA	0
tatanan normal baru pasar tradisional	0
Tatanan Normal Baru Pasar Modern Balikpapan Super Blok	0
SIGAP COVID-19 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU (DPMPT) KOTA BALIKPAPAN	0
tatanan normal baru hotel novotel Balikpapan	0
tatanan normal baru sektor transportasi umum	0
tatanan normal baru di sektor restoran	0
3SIS	0
Pengambilan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Melalui Gojek	0
SATGAS MONALISA	27
Payment Online Pajak Daerah	29
Cek Tagihan PBB melalui Handphone	14
GEMPITA (GERAKAN MELAWAN PENYAKIT TIDAK MENULAR)	109
SAHABAT REMAJA SEHAT	64
"Marga Sari Sayang Lansia"	71
POSTING (Program Konseling Terpadu Tangani Stunting)	108
BREAK (Beri Ide Balikpapan Kreatif)	51
DIGITASI KEBUN RAYA BALIKPAPAN (Data Informasi DIGITAL TANAMAN KOLEKSI)	95
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Online	0
Simpel Cerdas	0
CINTA BALIKPAPAN	0
e-DATABASE	110
Klinik SMART	13
Reklame Prioritas	110
Layanan PUSPAGA	0
SATYANMAS PERHUBUNGAN (SATUAN TUGAS PELAYANAN MASYARAKAT DINAS PERHUBUNGAN KOTA BALIKPAPAN)	0
BABE JUKI (Balikpapan Bebas Jukir Liar)	15

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
SIMASPRO (SISTEM INFORMASI HUMAS DAN PROTOKOL)	102
SIPANDU MAS (SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT)	56
PUSGA CERITA STUNTING	109
WA CAT (WARGAKU KE CAPIL AKU TAU)	130
OK 4 U (online KIR for you)	107
SAMPAH SIAGA	101
MARIKECE (Mekar Sari Kelurahan Cegah Covid 19)	123
Sistem Pengawasan Penduduk Pendetang (SP3)	27
PENINGKATAN TERTIB ADMINISTRASI PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BLUD (TIBA SIJULAK)	108
SI JANTAN (SISTEM INFORMASI PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN)	107
SNIPER ("STRATEGI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU KOTA BALIKPAPAN)	105
SI DOKTER RATIH (Sistem Pengadaan Obat/BMHP Kosong Berdasarkan Kemitraan Antar Rumah Sakit)	81
REVITALISASI APLIKASI E-OFFICE	128

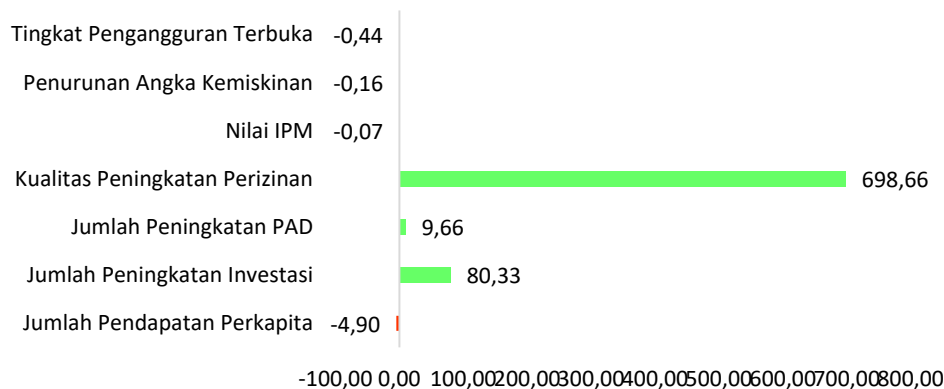
H. KOTA BONTANG



Gambar 78. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kota Bontang

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kota Bontang memiliki skor tertinggi pada variabel SDM, yaitu 83,0%. Artinya, secara umum indikator - indikator pada variabel SDM sudah mencapai skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi, dan Kajian masih cukup rendah, yakni sebesar 40%. Dengan kata lain, secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



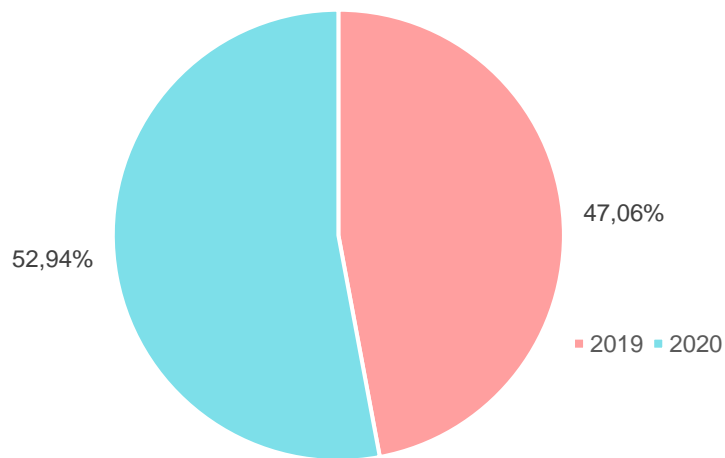
Gambar 79. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Bontang

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Bontang belum mengalami perkembangan yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal tersebut ditunjukkan dengan sebagian besar indikator yang mengalami penurunan. Sebagai contoh, Penurunan Angka Kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,16%. Dengan kata lain, angka kemiskinan meningkat 0,16% dibandingkan periode sebelumnya. Capaian tersebut masih belum memenuhi standar nasional parameter indeks inovasi daerah di mana seharusnya turun sebesar 0,02%. Selanjutnya, nilai IPM juga mengalami penurunan sebesar 0,07%, dan masih belum sesuai dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah sebesar 0% atau tetap. Adapun Jumlah Pendapatan Perkapita menurun sebesar 4,90%, di mana nilai tersebut berada di bawah standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang turun 1,85%. Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan yang paling signifikan, yakni sebesar 0,44%. Meskipun demikian, capaian tersebut memenuhi standar nasional parameter indeks inovasi daerah di mana Tingkat Pengangguran Terbuka naik sebesar 0,92%.

Adapun indikator-indikator lainnya yang sudah mencapai atau melampaui standar nasional parameter indeks inovasi daerah di antaranya adalah Kualitas Peningkatan Perizinan, Jumlah Peningkatan PAD, dan Jumlah Peningkatan Investasi. Jumlah Peningkatan PAD Kota Bontang naik sebesar 9,66%, dan capaian tersebut telah melampaui standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang naik 8%. Selanjutnya, Jumlah Peningkatan Investasi mengalami peningkatan sebesar 80,33%, jauh di atas standar nasional parameter indeks inovasi daerah di mana Jumlah Peningkatan Investasi naik 0,45%. Terakhir, Kualitas Peningkatan Perizinan Kabupaten Kota Bontang mengalami peningkatan yang paling signifikan, yakni sebesar 698,66%. Jika dibandingkan dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah, angka tersebut sudah sangat melampaui standarnya, dengan peningkatan kualitas peningkatan perizinan sebesar 5%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

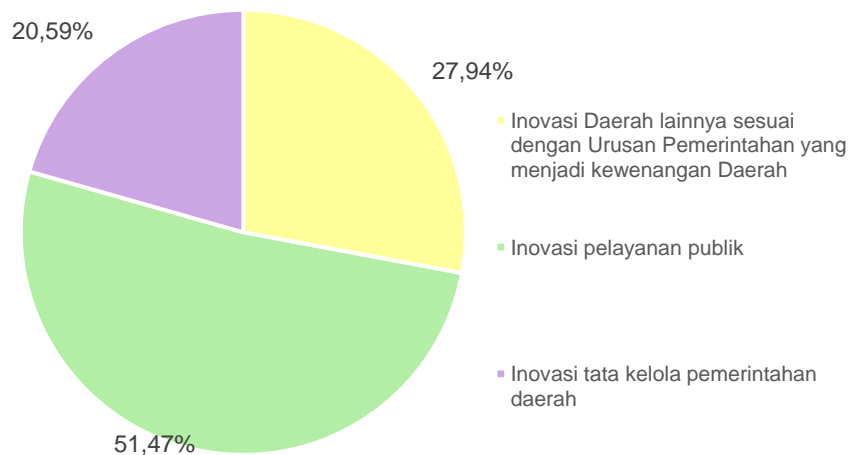
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 80. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kota Bontang

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, mayoritas inovasi yang dilaporkan oleh Kota Bontang telah diterapkan sejak tahun 2020. Terdapat 36 (52,94%) inovasi dari 68 inovasi yang dilaporkan tersebut diterapkan sejak tahun 2020 dan 32 (47,06%) inovasi lainnya diterapkan sejak tahun 2019.

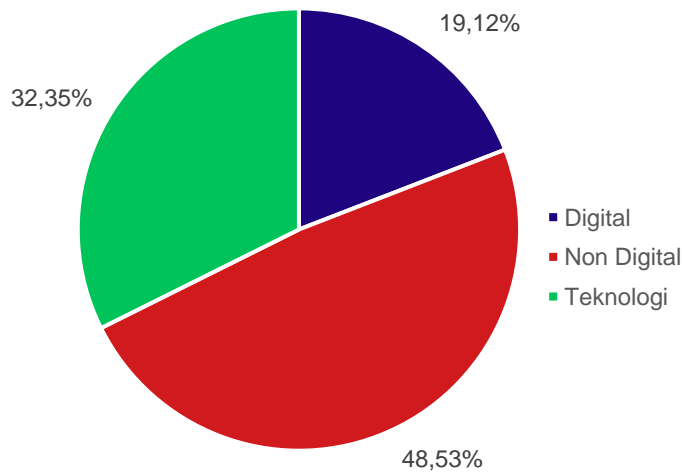
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 81. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kota Bontang

Berdasarkan bentuk inovasi, inovasi yang dilaporkan oleh Kota Bontang sudah mencakup seluruh jenis inovasi. Sebagian besar inovasi yang dilaporkan adalah inovasi pelayanan publik, yakni sejumlah 35 (51,47%) inovasi dari 68 inovasi. Sementara itu, 14 (20,59%) inovasi merupakan inovasi tata kelola pemerintahan daerah dan 19 (27,94%) sisanya merupakan inovasi lainnya.

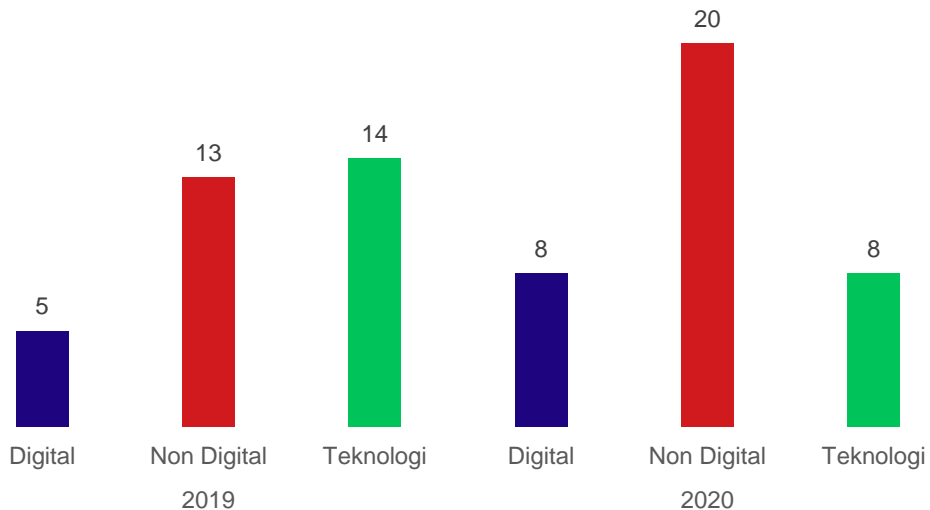
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 82. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kota Bontang

Jika melihat jenis inovasinya, Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 yang dilaporkan oleh Kota Bontang terdiri atas Inovasi Digital, Inovasi Non Digital, dan Inovasi Teknologi. Dari 68 inovasi daerah yang dilaporkan Kota Bontang, sebagian besar di antaranya merupakan inovasi non digital, yaitu sebanyak 33 (48,53%) inovasi. Sementara itu, 22 (32,35%) inovasi merupakan inovasi teknologi dan 13 (19,12%) inovasi sisanya termasuk dalam inovasi digital.

d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi

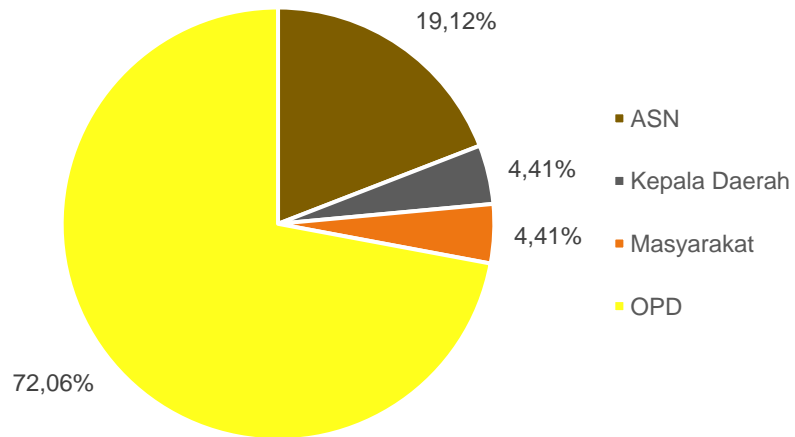


Gambar 83. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kota Bontang

Berdasarkan bagan di atas, inovasi yang dilaporkan oleh Kota Bontang pada tahun 2019 terdiri atas 5 inovasi digital, 13 inovasi non digital, dan 14 inovasi teknologi. Selanjutnya, pada tahun 2020 terdapat peningkatan jumlah inovasi non digital menjadi 20 inovasi.

Jumlah inovasi digital juga terpantau naik menjadi 8 inovasi di tahun yang sama. Sementara itu, inovasi teknologi mengalami penurunan menjadi 8 inovasi.

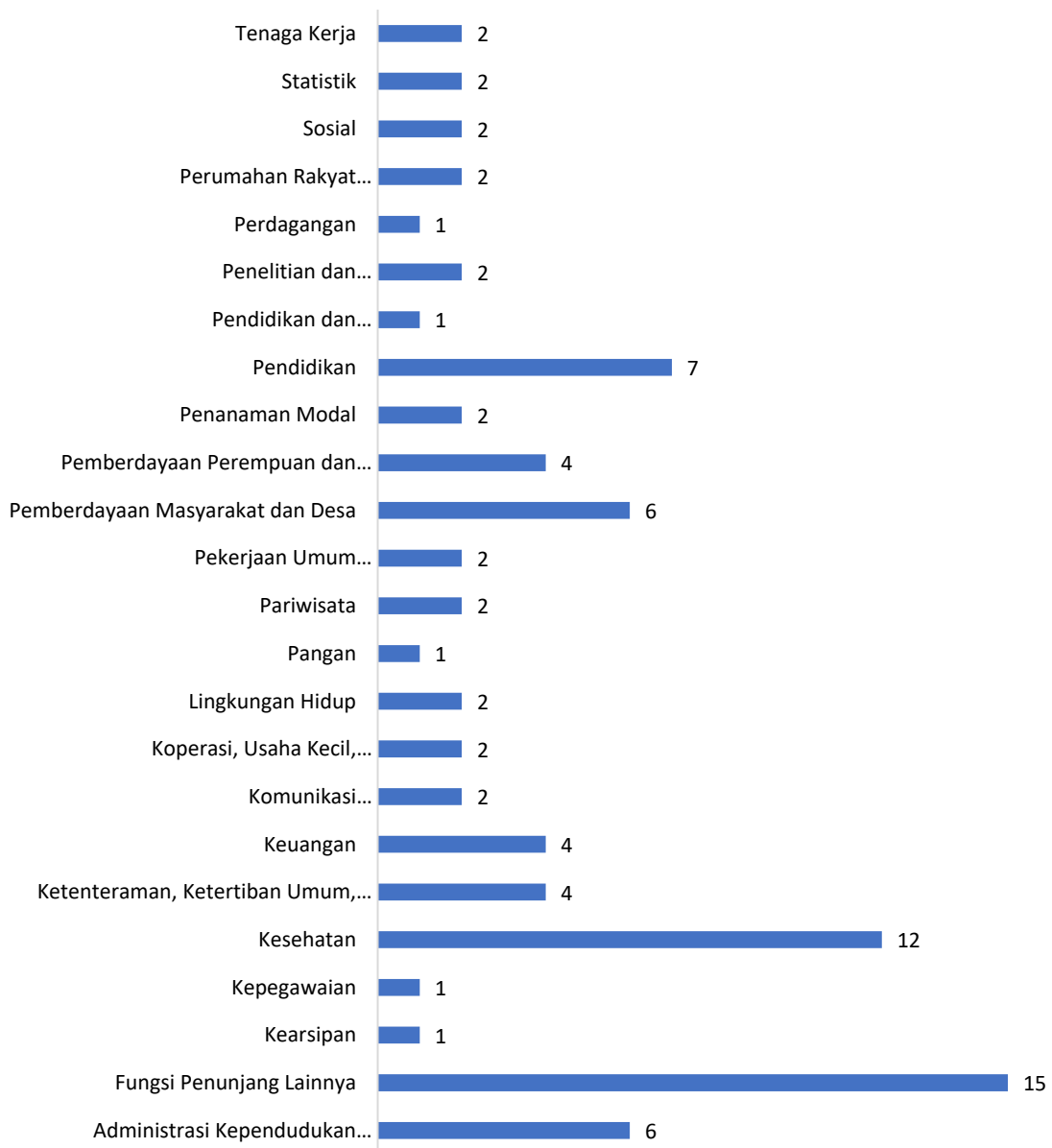
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 84. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kota Bontang

Bagan di atas menunjukkan bahwa seluruh inovasi pada Kota Bontang diinisiasi oleh empat unsur, yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala Daerah, ASN, dan Masyarakat. Sebagian besar inovasi yang dilaporkan oleh Kota Bontang pada tahun 2021 diinisiasi oleh OPD, yaitu sebanyak 49 (72,06%) inovasi. Sementara itu, sebanyak 13 (19,12%) inovasi diinisiasi oleh ASN, 3 (4,41%) inovasi diinisiasi oleh Masyarakat, dan 3 (4,41%) inovasi sisanya diinisiasi oleh Kepala Daerah. Untuk inovasi yang diinisiasi oleh DPRD belum dilaporkan di tahun 2021.

f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan

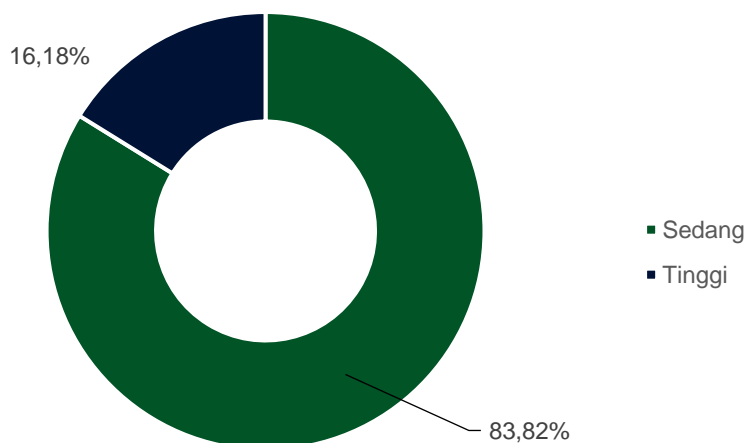


Gambar 85. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kota Bontang

Bagan di atas menunjukkan bahwa inovasi daerah pada Kota Bontang tersebar pada beberapa urusan berbeda. Selain itu, seluruh urusan yang terkait dengan urusan wajib pelayanan dasar juga termasuk dalam inovasi-inovasi yang dilaporkan. Dari 6 urusan wajib pelayanan dasar, urusan Kesehatan merupakan urusan dengan jumlah inovasi terbanyak, yakni sebanyak 12 inovasi. Sementara itu, 7 inovasi tergolong dalam urusan Pendidikan, 4 inovasi termasuk urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan masing-masing 2 inovasi termasuk dalam urusan Sosial, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Adapun urusan Fungsi Penunjang Lainnya merupakan urusan dengan jumlah inovasi tertinggi, yaitu sebanyak 15 inovasi. Selanjutnya, urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki jumlah inovasi masing-masing 6 inovasi. Sebanyak masing-masing 4 inovasi berada pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak dan Keuangan. Adapun urusan Tenaga Kerja, Statistik, Sosial, Penelitian dan Pengembangan, Penanaman Modal, Pariwisata, Lingkungan Hidup, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Komunikasi dan Informatika memiliki jumlah inovasi masing-masing sebanyak 2 inovasi. Terakhir, terdapat masing-masing 1 inovasi pada urusan Perdagangan, Pendidikan dan Pelatihan, Pangan, Kepegawaian, dan Kearsipan.

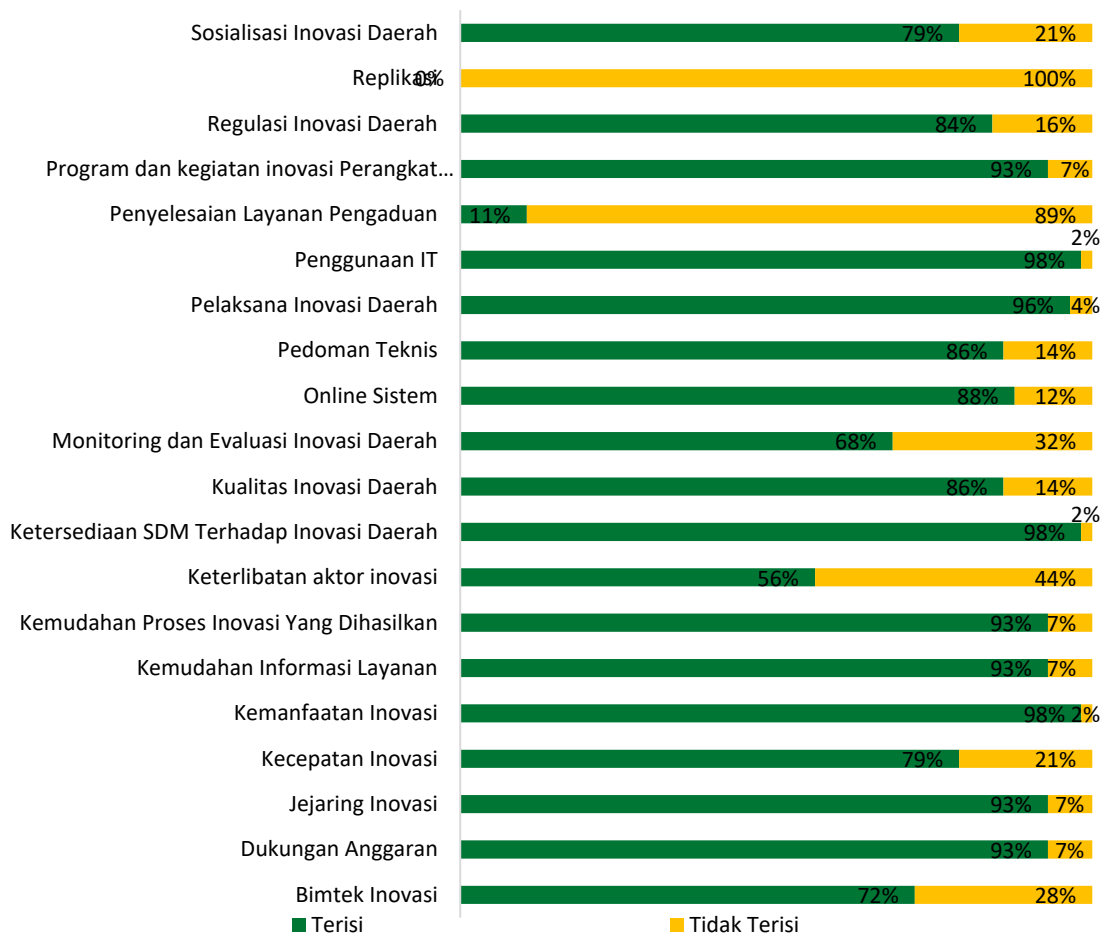
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 86. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kota Bontang

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, seluruh inovasi tersebar pada skor kematangan sedang dan tinggi. Dapat dilihat bahwa sebagian besar inovasi yang dilaporkan oleh Kota Bontang memiliki skor kematangan yang sedang, yakni sebanyak 57 (83,82%) inovasi dari 68 inovasi. Sementara itu, 11 (16,18%) inovasi memiliki skor kematangan tinggi dan tidak ada inovasi dengan skor kematangan yang rendah. Sebagai informasi, skor kematangan tinggi adalah inovasi yang mencapai skor kematangan di bawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

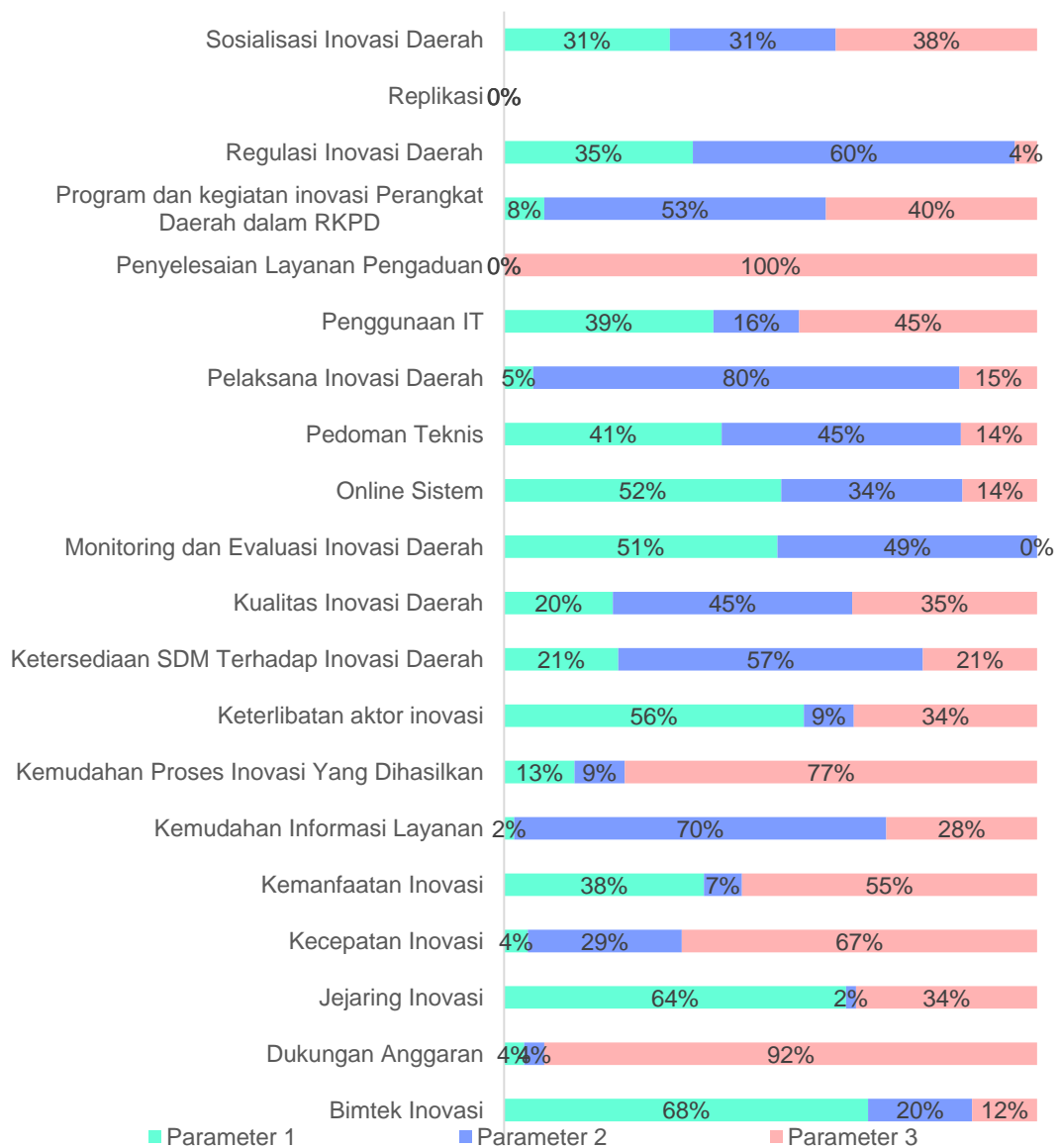
h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 87. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kota Bontang

Dari 68 inovasi yang dilaporkan oleh Kota Bontang, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 21,75% sedangkan 78,25% lainnya telah terisi data pendukung. Dengan kata lain, sebagian besar inovasi yang dilaporkan sudah terisi data-data pendukung yang diperlukan. Adapun indikator dengan tingkat keterisian tertinggi adalah Indikator Penggunaan IT, Ketersediaan SDM terhadap Inovasi Daerah, dan Kemanfaatan Inovasi dengan tingkat keterisian 98%. Artinya, hampir seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kota Bontang telah terisi data pendukung pada indikator-indikator tersebut. Di sisi lain, indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah adalah indikator Replikasi yaitu sebesar 100%. Dengan kata lain, masih belum terdapat inovasi terlapor yang telah terisi data pendukung dari indikator tersebut.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 88. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah Penyelesaian Layanan Pengaduan, yaitu sebesar 100%. Hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut masuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Pelaksana Inovasi Daerah sebesar 80%. Dengan kata lain, 80% inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Bimtek Inovasi yakni sebesar 68%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa 68% inovasi telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk indikator tersebut.

j. Daftar Inovasi Kota Bontang beserta Skor Kematangannya

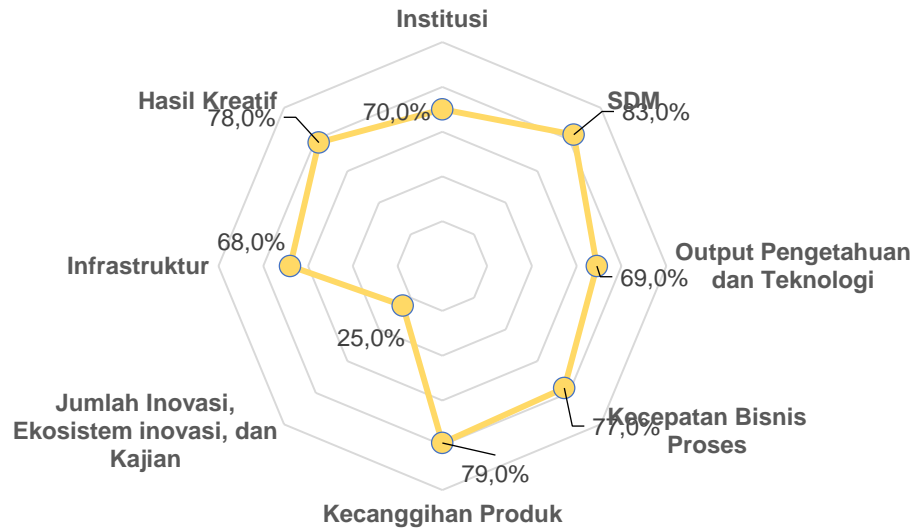
Tabel 9. Daftar Inovasi Kota Bontang beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
Sistem dan Prosedur Rumah Layanan Bantuan Partai Politik (SI MAYA BATIK)	110
Pencil (Pregnacy Class Mobile) Pedekatan pelayanan Ibu Hamil)	86
Sistem Seven In One	94
Pepes ikan belanak (Penyampaian informasi upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak)	74
Pesta Lontin (Penyuluhan stunting bagi calon pengantin)	68
Relawan Daerah Program Sembako (Reda Ombak)	79
Sistem Informasi Pengelolaan Data Statistik Terpadu (SIMPATIKU)	119
Rumah Ibadah Ramah Anak (MAHIRA)	114
KLIK KONTAK BONTANG (KLINIK KONSULTASI INSPEKTORAT KOTA BONTANG)	81
KLIK BOS BONTANG (KLINIK LAYANAN INFORMASI DAN KONSELING DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KOTA BONTANG)	80
PATROLI KARHUTLA (KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN)	83
Pelayanan Komplain Pelanggan RSUD Taman Husada Bontang (PeaCe Gan Tamada)	82
Pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan melalui Sambang O-Mas (organisasi Kemasyarakatan) di Kota Bontang	64
Sistem Manajemen Arsip Inspektorat (SI MANIS) Bontang	72
PBB Etam (Electronic Tax Management)	105
Pelaporan Keuangan dan Pencatatan Aset (PAK POS)	66
Kelas Pengendalian Hipertensi dan Diabetes Militus (Kenali Si Dia)	112
Sistem Informasi Global Aktif Unggul dan Luas (Si Gaul)	86
Bontang Lestari Basmi Stunting (Bola Banting)	87
Seputar Capaian Kinerja Puskesmas (Secangkir Emas)	92
Sistem Pendaftaran Berbasis Android (SI PERBAN)	97
Program Pangan Aman Berbasis Partisipasi Gender	68
E-TAKAH DIGITAL ONLINE (ETA DIGIT) Terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMAK) dan KENPA Otomatis	96
Penyuluhan Tanpa Mengumpulkan Masyarakat (Penyu dan Talas)	106
SIJAJAN (Sistem Informasi Jaringan Jalan)	96
Tourism Ambassador Camp 4.0	96
Sistem Informasi Pelayanan dan Penataan Ruang (SIMPELTARU)	86
Mata Elang Loktuan (MELOK)	97

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
Penambah Usia RT (Pendataan Disabilitas RT)	66
Optimalisasi Layanan Ormas melalui Si O Mas (Sistem Organasasi Kemasyarakatan) di Kota Bontang	89
PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA KAMPUNG DI ATAS AIR (BAHARI)	67
SHARE (Pemeriksaan Kesehatan Perangkat Daerah)	69
RELAWAN MUDA SIAGA COVID (ReMesSicoVid)	90
SI PENONTON (Sistem Pembayaran Non Tunai Retribusi)	74
Surat Pengantar RT Online (PeRTaline)	99
Belimbing Deteksi Dini Kanker Serviks (Be Care With IVA Test)	98
Bantuan Paket Sembako Perusahaan Untuk Masyarakat Terdampak Corona (BAKSO SATU MAMA)	81
Disini PELayanan untUK ANda SeMUa (DIPELUKANMU)	69
Kelurahan Belimbing Ramah Anak (KB AMAN)	61
Media Informasi Ruang Pelayanan Kependudukan (MAIN RAPEL KEDUA)	81
Kolam Pembesaran Ikan Karang Taruna (KOSA KATA)	67
Pemberdayaan Komunitas Rentan Berwawasan Lingkungan (BEKANTAN)	71
Sistem Informasi Penelitian, Pengembangan dan Kreasi Inovasi Daerah (INSPIRASI SIDA)	79
Lampu Lampion Warnai Lingkungan Warga Rukun Tetangga (LAIN LARUTAN)	93
KAPURRUNG - KAmPung jerUk beRdayakan masyaRakat kelUrahan belimbiNG	65
Pendampingan dan Pengawalan Kegiatan di Pesisir (Dekati Kasir)	83
SIPAK GURU (Sistem Informasi Penilaian Angka Kredit Guru)	105
SIBU CANTIK (SISTEM BUKU CATATAN TANPA KERTAS)	79
JEMPOL SIMAS (Jelas Mudah Pasti dan Online dengan Sistem Informasi Manajemen Arsip)	64
SMART BERBAS PANTAI	83
Peningkatan Daya Saing Kompetensi Tenaga Kerja (PADA SUKA KERJA)	89
INSPIRASEA BONTANG "COASTAL SCHOOL (SEKOLAH BERBAYAR SAMPAH)	81
DARING (Pendampingan Pembelajaran Online Untuk Warga)	90
PANDUKASIH (Pelayanan Dokumen Kependudukan Sinergi Untuk Ibu Hamil)	96
PATIN BAKAR (Pelayanan Akta Kematian Bersama Kelurahan dan Rumah Sakit)	89
PELANDUK SAKTI (Pelayanan Pengantaran Dokumen Kependudukan Sampai Ke Rumah Tanpa Antri)	89
Jaringan Data Masyarakat Rentan (Janda Matre)	89
INOVASI PELAYANAN LITERASI ANAK USIA DINI KELILING DUNIA	101

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
BERSAMA (KEDUBES) BUNDA PAUD KOTA BONTANG	
IDOLAKU (Informasi Data Online Agregat Kependudukan)	93
Sosialisasi Tatap Muka Langsung di Perairan (SITAMU LAPAR)	69
Alat Pengolah Limbah ECOLYMA (Easy maintenance, COmpact, Low energy, sMall Area)	84
SANAK SAUDARA (Sapa Anak Sewaktu Covid Agar Tetap Gembira)	71
"Beras Basah" Bersama Pemerintah dan Pengusaha Membangun Sistem Ketenagakerjaan yang harmonis.	80
Perizinan Digital (PD)	126
Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIM BMD)	87
Pendampingan dan Coaching Inovasi Daerah (PENA INDAH)	92
Pojok Layanan PTSP (Pola PTSP)	117
BiSha SaJa (Bincang Sharing Satu Jam)	111

I. KOTA SAMARINDA



Gambar 89. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kota Samarinda

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kota Samarinda memiliki skor tertinggi pada variabel SDM, yaitu 83,0%. Artinya, secara umum indikator - indikator pada variabel SDM sudah mencapai skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi, dan Kajian masih cukup rendah, yakni sebesar 25%. Dengan kata lain, secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



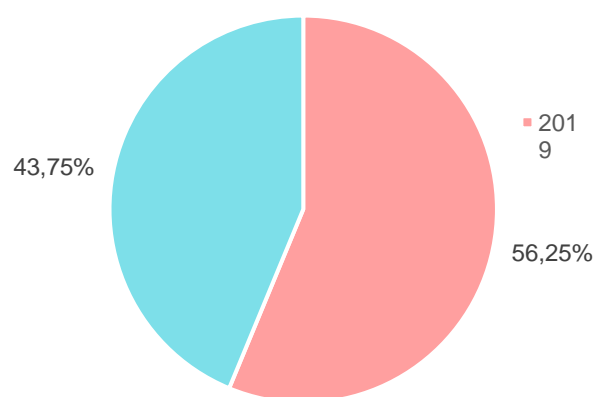
Gambar 90. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Samarinda

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Samarinda belum mengalami perkembangan yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal tersebut ditunjukkan dengan sebagian besar indikator yang mengalami penurunan. Sebagai contoh, Penurunan Angka Kemiskinan mengalami penurunan sebesar 2,12%. Dengan kata lain, angka kemiskinan meningkat 2,12% dibandingkan periode sebelumnya. Capaian tersebut masih belum memenuhi standar nasional parameter indeks inovasi daerah di mana seharusnya turun sebesar 0,02%. Selanjutnya, nilai IPM juga mengalami penurunan sebesar 0,09%, dan masih belum sesuai dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah sebesar 0% atau tetap. Adapun Jumlah Pendapatan Perkapita menurun sebesar 28,97%, berada di bawah standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang turun 1,85%. Selanjutnya, Kualitas Peningkatan Perizinan Kabupaten Kota Samarinda juga menurun sebesar 72,59%. Jika dibandingkan dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah, angka tersebut masih jauh dari standarnya, yakni peningkatan sebesar 5%. Terakhir, Jumlah Peningkatan Investasi mengalami penurunan yang paling signifikan, yakni sebesar 92,23%. Nilai tersebut jauh di bawah standar nasional parameter indeks inovasi daerah di mana Jumlah Peningkatan Investasi naik 0,45%.

Adapun indikator-indikator lainnya yang sudah mencapai atau melampaui standar nasional parameter indeks inovasi daerah di antaranya adalah Jumlah Peningkatan PAD dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Jumlah Peningkatan PAD Kota Samarinda naik sebesar 11,69%, dan capaian tersebut telah melampaui standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang naik 8%. Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami peningkatan yang paling signifikan, bahkan melampaui angka 100%. Dengan kata lain, angka pengangguran terbuka pada tahun 2020 menurun lebih dari 100% dibandingkan tahun 2019. Meskipun capaian tersebut memenuhi standar nasional parameter indeks inovasi daerah di mana Tingkat Pengangguran Terbuka naik sebesar 0,92%, namun data yang diinput pada indikator tersebut tidak sesuai yang diminta.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

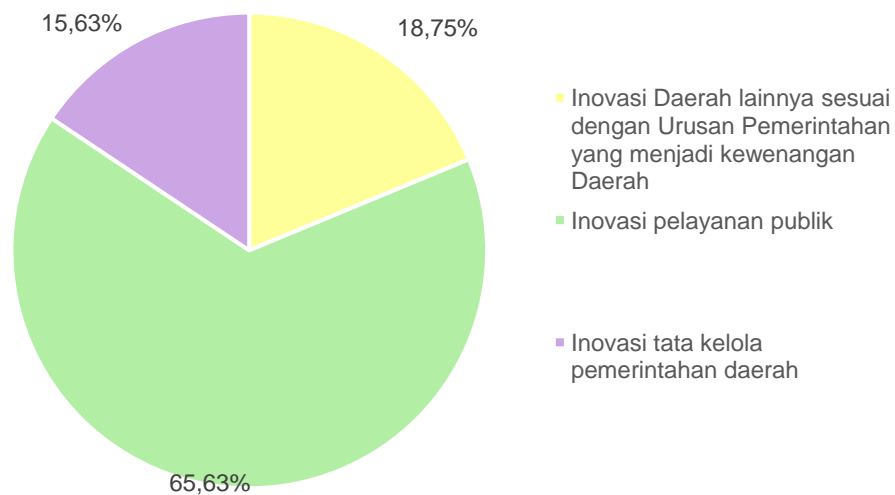
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 91. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kota Samarinda

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, mayoritas inovasi yang dilaporkan oleh Kota Samarinda telah diterapkan sejak tahun 2019. Terdapat 18 (56,25%) inovasi dari 3 inovasi yang dilaporkan tersebut diterapkan sejak tahun 2019 dan 14 (43,75%) inovasi lainnya diterapkan sejak tahun 2020.

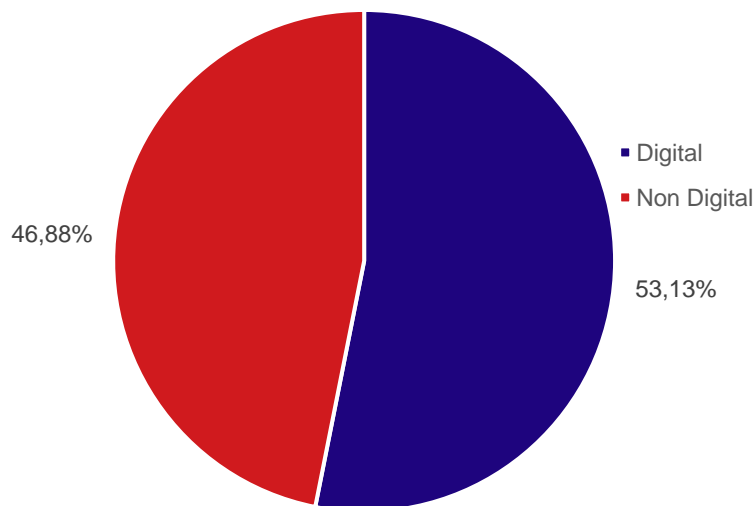
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 92. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kota Samarinda

Berdasarkan bentuk inovasi, inovasi yang dilaporkan oleh Kota Samarinda sudah mencakup seluruh jenis inovasi. Sebagian besar inovasi yang dilaporkan adalah inovasi pelayanan publik, yakni sejumlah 21 (65,63%) inovasi dari 32 inovasi. Sementara itu, 5 (15,63%) inovasi merupakan inovasi tata kelola pemerintahan daerah dan 6 (18,75%) sisanya merupakan inovasi lainnya.

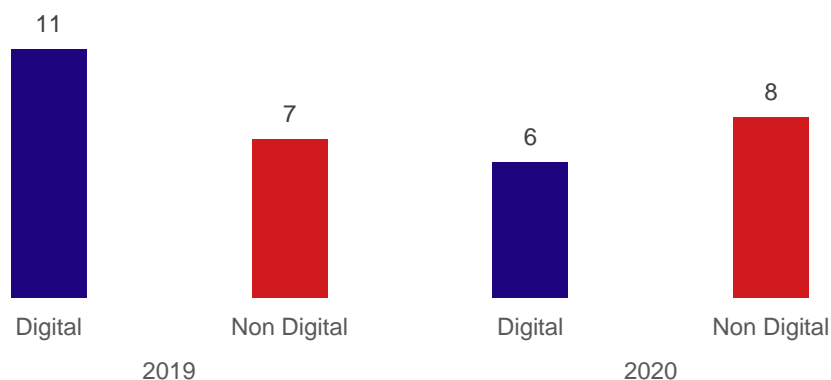
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 93. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kota Samarinda

Jika melihat jenis inovasinya, Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 yang dilaporkan oleh Kota Samarinda terdiri atas Inovasi Digital dan Inovasi Non Digital. Dari 32 inovasi daerah yang dilaporkan Kota Samarinda, sebagian besar di antaranya merupakan inovasi digital, yaitu sebanyak 17 (53,13%) inovasi. Sementara itu, 15 (46,88%) inovasi merupakan inovasi non digital dan belum ada inovasi teknologi yang dilaporkan.

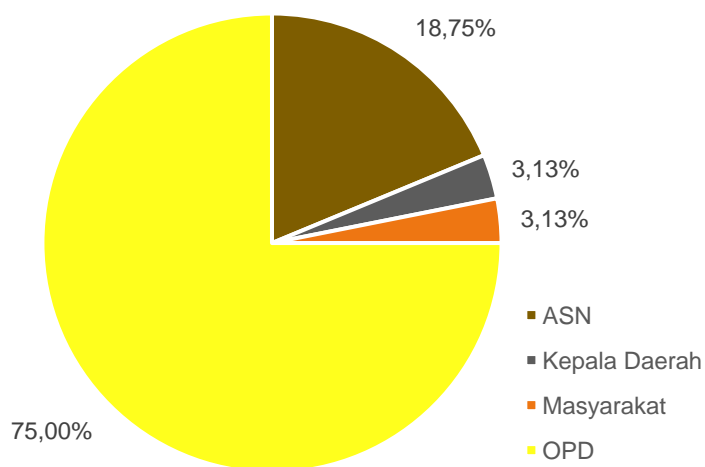
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 94. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kota Samarinda

Berdasarkan bagan di atas, inovasi yang dilaporkan oleh Kota Samarinda pada tahun 2019 terdiri atas 11 inovasi digital dan 7 inovasi non digital. Selanjutnya, pada tahun 2020 terdapat peningkatan jumlah inovasi non digital menjadi 8 inovasi. Di sisi lain, inovasi digital mengalami penurunan di tahun yang sama menjadi 6 inovasi.

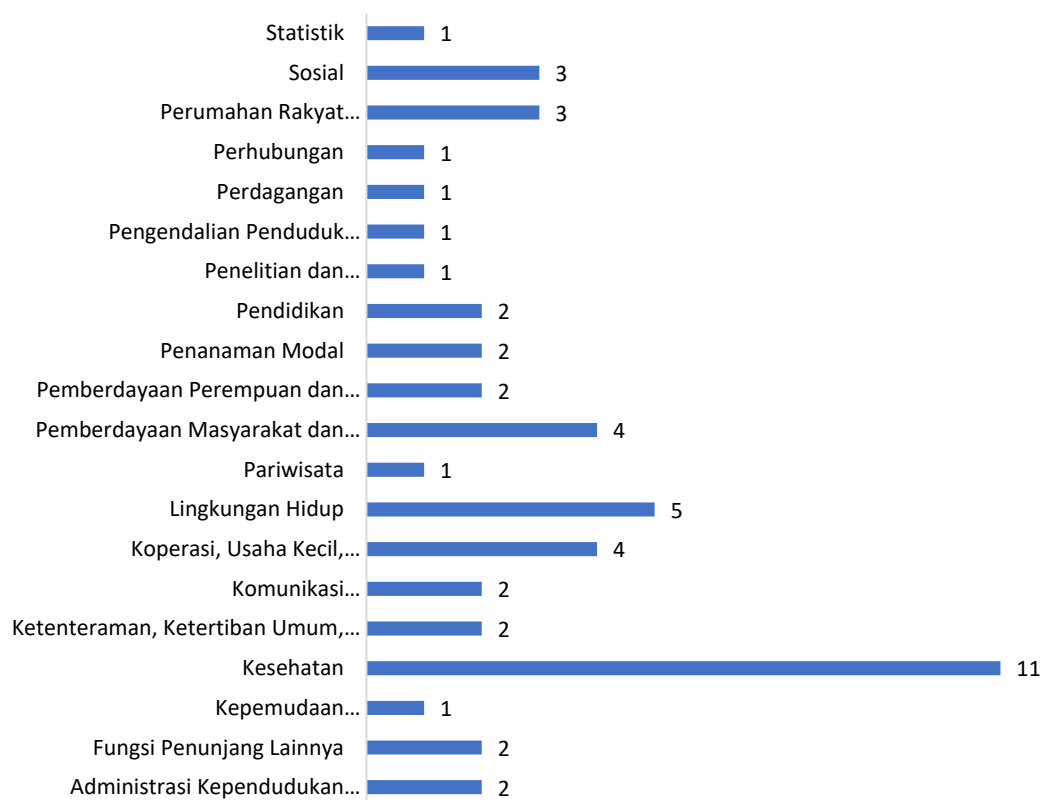
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 95. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kota Samarinda

Bagan di atas menunjukkan bahwa seluruh inovasi pada Kota Samarinda diinisiasi oleh empat unsur, yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala Daerah, ASN, dan Masyarakat. Sebagian besar inovasi yang dilaporkan oleh Kota Samarinda pada tahun 2021 diinisiasi oleh OPD, yaitu sebanyak 24 (75,00%) inovasi. Sementara itu, sebanyak 6 (18,75%) inovasi diinisiasi oleh ASN, 1 (3,13%) inovasi diinisiasi oleh Masyarakat, dan 1 (3,13%) inovasi sisanya diinisiasi oleh Kepala Daerah. Untuk inovasi yang diinisiasi oleh DPRD belum dilaporkan di tahun 2021.

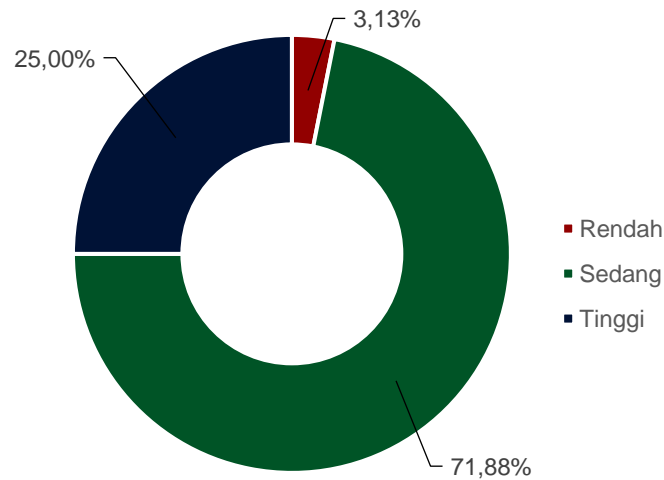
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 96. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kota Samarinda

Bagan di atas menunjukkan bahwa inovasi daerah pada Kota Samarinda tersebar pada beberapa urusan berbeda. Selain itu, 5 urusan yang terkait dengan urusan wajib pelayanan dasar juga termasuk dalam inovasi-inovasi yang dilaporkan. Dari 5 urusan wajib pelayanan dasar yang tercantum, urusan Kesehatan merupakan urusan dengan jumlah inovasi terbanyak, yakni sebanyak 11 inovasi. Sementara itu, masing-masing 3 inovasi tergolong dalam urusan Sosial serta Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Sebanyak masing-masing 2 inovasi termasuk dalam urusan Pendidikan serta Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Selanjutnya, urusan Lingkungan Hidup merupakan urusan dengan jumlah inovasi tertinggi, yaitu sebanyak 5 inovasi. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memiliki jumlah inovasi masing-masing 4 inovasi. Adapun urusan Penanaman Modal, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komunikasi dan Informatika, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Penunjang Lainnya memiliki jumlah inovasi masing-masing sebanyak 2 inovasi. Terakhir, terdapat masing-masing 1 inovasi pada urusan Statistik, Perhubungan, Perdagangan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Penelitian dan Pengembangan, Pariwisata, serta Kepemudaan dan Olah Raga.

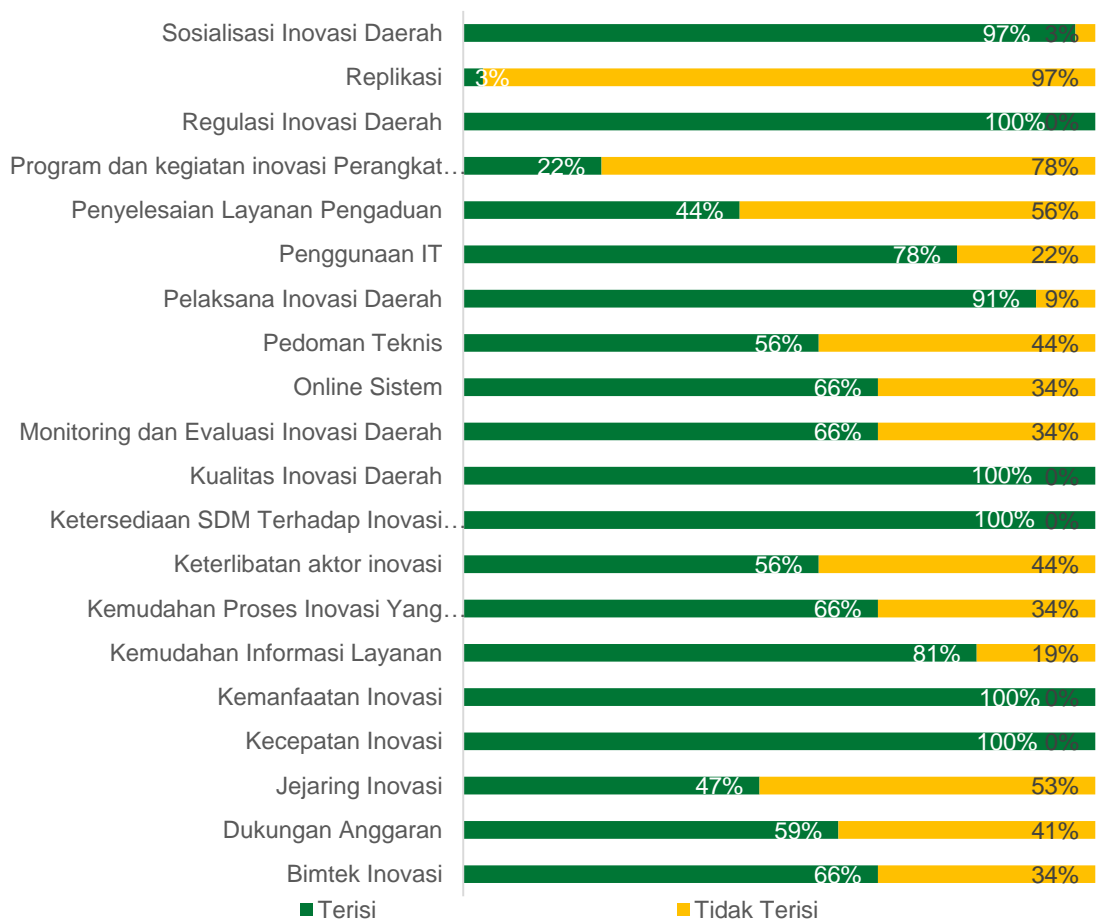
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 97. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kota Samarinda

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, seluruh inovasi tersebar pada skor kematangan rendah, sedang dan tinggi. Dapat dilihat bahwa sebagian besar inovasi yang dilaporkan oleh Kota Samarinda memiliki skor kematangan yang sedang, yakni sebanyak 23 (71,88%) inovasi dari 32 inovasi. Sementara itu, 8 (25,00%) inovasi memiliki skor kematangan tinggi dan 1 (3,13%) inovasi memiliki skor kematangan yang rendah. Sebagai informasi, skor kematangan tinggi adalah inovasi yang mencapai skor kematangan di bawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

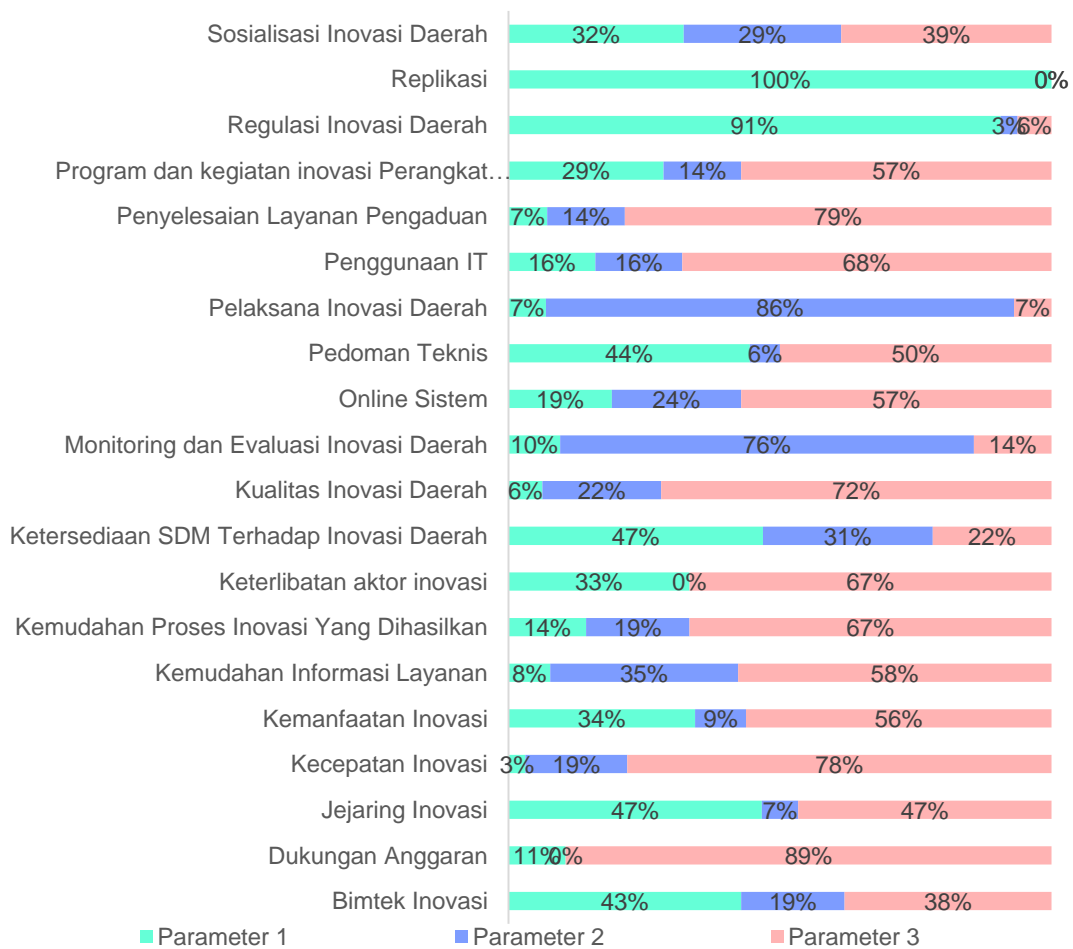
h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 98. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kota Samarinda

Dari 32 inovasi yang dilaporkan oleh Kota Samarinda, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 30,16% sedangkan 69,84% lainnya telah terisi data pendukung. Dengan kata lain, sebagian besar inovasi yang dilaporkan sudah terisi data-data pendukung yang diperlukan. Adapun indikator dengan tingkat keterisian tertinggi adalah Indikator Regulasi Inovasi Daerah, Kualitas Inovasi Daerah, Ketersediaan SDM terhadap Inovasi Daerah, Kemanfaatan Inovasi, dan Kecepatan Inovasi dengan tingkat keterisian 100%. Artinya, seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kota Samarinda telah terisi data pendukung pada indikator-indikator tersebut. Di sisi lain, indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah adalah indikator Replikasi yaitu sebesar 3%. Dengan kata lain, masih 3% inovasi terlapor yang telah terisi data pendukung dari indikator tersebut.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 99. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah Dukungan Anggaran, yaitu sebesar 89%. Hal tersebut menunjukkan bahwa 89% inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut masuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Pelaksana Inovasi Daerah sebesar 86%. Dengan kata lain, 86% inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Replikasi yakni sebesar 100%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa seluruh inovasi telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk indikator tersebut.

j. Daftar Inovasi Kota Samarinda beserta Skor Kematangannya

Tabel 10. Daftar Inovasi Kota Samarinda beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
ANTRIAN ONLINE DI MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA SAMARINDA	72
AKU PINTAR (Akupunktur dan Pijat Bayi Bikin Nyaman Sehat dan Bugar)	53

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
JARISISI (JARingan AplikaSI InovaSI)	110
OTAN / OSS DIKECAMATAN	105
SIPPEKA (Sisten Informasi Pencatatan dan Pelaporan Kekerasan Perempuan dan Anak Kota Samarinda)	84
Si PAHIT (Sistem Pelayanan Hitungan Menit)	113
PAK DOLA KADIS (Pelayanan Dokumen Langsung Antar Kerjasama Disabilitas)	110
PENGIKAT	79
JENG RINDA (JElantah membaNGun samaRINDA)	87
GEMA TAMU (GERAKAN MASYARAKAT TAHU JAMU)	90
CERIA	76
e-Retribusi	66
SIMPONIS	64
LAMORAL GERINUM (Layanan Tanaman Obat Herbal Dan Gerakan Minum Jamu)	67
PAKLEK ANDI (PUSKESMAS LEMPAKE DENGAN ANTRIAN DIGITAL)	73
RUBIK (Ruang tunggU ekoBrIK)	58
Posting (Pos Stunting), Cegah Stunting Sejak Dini di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Mangkupalas	87
SUKMA (Survey Kepuasan Masyarakat)	103
LAPAKOPIKU (Laporan Peningkatan Kualitas data Koperasi dan UKM)	101
THE CREATOR (Tim Konten Kreatif Promosi dan Pemasaran)	79
Samut Pesat (Samarinda Utara dalam Pelayanan Satu Pintu)	107
Samarinda Smart Edu (SSE)	80
LaPak PasTi (Pengelolaan Sampah Kertas dan Sampah Plastik)	53
TemAnOK (Sistem Pelayanan Online Kecamatan)	79
TemAn RinDu (Sistem Laporan Terintegrasi Terpadu)	89
BRO EKO	69
PETA DIKSI SAMARINDA (PErcepatan pemerATAan PendiDIKlan inklusi di kota SAMARINDA)	83
Samarinda Siaga 112	141
BANK SAMPAH SUGAS	34
LAKOLING (Laporan Koperasi Keliling)	76
(BEKEN SIKAT) Kampung cegah dini bencana kebakaran berbasis masyarakat	66
Sistem Layanan Penerangan Jalan Umum Perumahan Permukiman (SILAJU PERKIM)	98

J. KABUPATEN MAHAKAM ULU

Belum ada capaian berdasarkan variabel ukur indeks inovasi daerah dari Kabupaten Mahakam Ulu mengingat belum adanya inovasi yang dilaporkan.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah

Pada tahun 2021, belum ada inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Mahakam Ulu dilihat dari aspek satuan pemerintah daerah.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

Pada tahun 2021, belum ada inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Mahakam Ulu dilihat dari aspek satuan inovasi daerah.

The Page Left is Blank

BAB III

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Pada Provinsi Kalimantan Timur terdapat 10 Kabupaten/Kota namun tiap daerah memiliki predikat yang berbeda pada Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021.

A. KABUPATEN BERAU

Kabupaten Berau memiliki predikat daerah kurang inovatif dengan skor 27,34. Maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: pendampingan penyusunan proposal inovasi, pemberian pelatihan inovasi teknis, dan pemetaan inovasi daerah. Namun Provinsi Kalimantan Timur dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Berau melalui bentuk pembinaan antara lain: pendampingan penyusunan proposal, pelatihan inovasi teknis bidang, dan pemetaan inovasi daerah.

B. KABUPATEN KUTAI BARAT

Kabupaten Kutai Barat memiliki predikat daerah kurang inovatif dengan skor 0,34. Maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: pendampingan penyusunan proposal inovasi, pemberian pelatihan inovasi teknis, dan pemetaan inovasi daerah. Namun Provinsi Kalimantan Timur dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Kutai Barat melalui bentuk pembinaan antara lain: pendampingan penyusunan proposal, pelatihan inovasi teknis bidang, dan pemetaan inovasi daerah.

C. KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki predikat daerah inovatif dengan skor 41,38. Maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: penyusunan kebijakan inovasi, manajemen kelitbangan, pengembangan digitalisasi pemerintah, dan kolaborator inovasi. Namun Provinsi Kalimantan Timur juga dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Kutai Kartanegara melalui bentuk pembinaan antara lain: pengintegrasian sistem teknologi Infomatika (IT), pengembangan pemerintahan digital, dan manajemen kelitbangan.

D. KABUPATEN KUTAI TIMUR

Kabupaten Kutai Timur memiliki predikat daerah kurang inovatif dengan skor 0,56. Maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: pendampingan penyusunan proposal inovasi, pemberian pelatihan inovasi teknis, dan pemetaan inovasi daerah. Namun Provinsi Kalimantan Timur dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Kutai Timur melalui bentuk pembinaan antara lain: pendampingan penyusunan proposal, pelatihan inovasi teknis bidang, dan pemetaan inovasi daerah.

E. KABUPATEN PASER

Kabupaten Paser memiliki predikat daerah inovatif dengan skor 42,43. Maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: penyusunan kebijakan inovasi, manajemen kelitbangan, pengembangan digitalisasi pemerintah, dan kolaborator inovasi. Namun Provinsi Kalimantan Timur juga dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Paser melalui bentuk pembinaan antara lain: pengintegrasian sistem teknologi Infomatika (IT), pengembangan pemerintahan digital, dan manajemen kelitbangan.

F. KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki predikat daerah inovatif dengan skor 41,50. Maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: penyusunan kebijakan inovasi, manajemen kelitbangan, pengembangan digitalisasi pemerintah, dan kolaborator inovasi. Namun Provinsi Kalimantan Timur juga dapat melakukan pembinaan kepada

Kabupaten Penajam Paser Utara melalui bentuk pembinaan antara lain: pengintegrasian sistem teknologi Infomatika (IT), pengembangan pemerintahan digital, dan manajemen kelitbangan.

G. KOTA BALIKPAPAN

Kota Balikpapan memiliki predikat daerah inovatif dengan skor 39,20. Maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: penyusunan kebijakan inovasi, manajemen kelitbangan, pengembangan digitalisasi pemerintah, dan kolaborator inovasi. Namun Provinsi Kalimantan Timur juga dapat melakukan pembinaan kepada Kota Balikpapan melalui bentuk pembinaan antara lain: pengintegrasian sistem teknologi Infomatika (IT), pengembangan pemerintahan digital, dan manajemen kelitbangan.

H. KOTA BONTANG

Kota Bontang memiliki predikat daerah inovatif dengan skor 56,12. Maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: penyusunan kebijakan inovasi, manajemen kelitbangan, pengembangan digitalisasi pemerintah, dan kolaborator inovasi. Namun Provinsi Kalimantan Timur juga dapat melakukan pembinaan kepada Kota Bontang melalui bentuk pembinaan antara lain: pengintegrasian sistem teknologi Infomatika (IT), pengembangan pemerintahan digital, dan manajemen kelitbangan.

I. KOTA SAMARINDA

Kota Samarinda memiliki predikat daerah inovatif dengan skor 52,71. Maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: penyusunan kebijakan inovasi, manajemen kelitbangan, pengembangan digitalisasi pemerintah, dan kolaborator inovasi. Namun Provinsi Kalimantan Timur juga dapat melakukan pembinaan kepada Kota Samarinda melalui bentuk pembinaan antara lain: pengintegrasian sistem teknologi Infomatika (IT), pengembangan pemerintahan digital, dan manajemen kelitbangan.

J. KABUPATEN MAHAKAM ULU

Kabupaten Mahakam Ulu memiliki predikat daerah tidak dapat dinilai dengan skor 0,00. Maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: bimbingan teknis penginputan data inovasi daerah, pendampingan penciptaan inovasi, lomba inovasi daerah, dan melakukan adaptasi inovasi praktik baik (*benchmarking*). Namun Provinsi Kalimantan Timur dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Mahakam Ulu melalui bentuk pembinaan antara lain: bimbingan teknis penginputan data inovasi daerah, pendampingan penciptaan inovasi, lomba inovasi daerah, dan melakukan adaptasi inovasi praktik baik.